

LAPORAN STUDI

POTENSI DAN PELUANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SUMBER DAYA ALAM HUTAN DESA KATIMPUN

Desa Katimpun, Kecamatan Mentangai,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Bekerja sama dengan :
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Katimpun
dan para pihak terkait

Disusun oleh :
MUKHLIS SAI PUTRA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Studi Potensi Hutan Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disusun sebagai bahan awal penguatan pengelolaan Hutan Desa berbasis Perhutanan Sosial.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai kondisi umum wilayah, karakter kawasan, potensi sumber daya alam, peluang usaha ekonomi masyarakat, prioritas pengembangan, rekomendasi tindak lanjut, serta kebutuhan penguatan kelembagaan LPHD dan KUPS. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi masyarakat, pemerintah desa, KPHL, pemerintah daerah, dan mitra pendamping.

Hutan Desa Katimpun merupakan bagian dari kawasan Hutan Lindung rawa gambut yang memiliki nilai penting bagi perlindungan tata air, penyimpanan karbon, pencegahan kebakaran, habitat flora-fauna, serta sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, pengembangan usaha diarahkan pada HHBK, perikanan rawa, agroforestri/paludikultur, pembibitan tanaman gambut, jasa lingkungan, ekowisata terbatas, serta usaha pendukung off-farm yang tidak menekan kawasan hutan.

Materi laporan disusun dengan mengacu pada Hasil Studi Potensi HD Katimpun, Profil Desa Katimpun, RKPS LPHD Katimpun 2025-2034, laporan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta hasil penyusunan ulang bab-bab laporan yang telah memperkuat narasi, tabel, analisis potensi, prioritas usaha, rekomendasi, dan penutup.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LPHD Katimpun, Pemerintah Desa Katimpun, KUPS, KPHL Kapuas Kahayan, masyarakat Desa Katimpun, serta para pihak pendamping dan mitra yang telah memberikan data, informasi, dan masukan dalam proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada aspek data kuantitatif produksi, analisis finansial, peta sebaran potensi, dan data pasar. Oleh karena itu, verifikasi lapangan lanjutan tetap diperlukan agar rekomendasi dalam laporan ini dapat diimplementasikan secara lebih akurat. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penguatan Perhutanan Sosial dan ekonomi hijau di Hutan Desa Katimpun.

Katimpun, Juli 2026

Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Studi Potensi Hutan Desa Katimpun disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kawasan, potensi sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan pengelola, peluang usaha, prioritas pengembangan, serta rekomendasi tindak lanjut pengelolaan Hutan Desa Katimpun. Laporan ini diarahkan sebagai dasar awal bagi LPHD Katimpun, Pemerintah Desa, KPHL Kapuas Kahayan, pemerintah daerah, KUPS, dan mitra pembangunan dalam menyusun program pengelolaan Hutan Desa yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Hutan Desa Katimpun berada di Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini dikelola melalui skema Perhutanan Sosial oleh LPHD Katimpun dengan luas sekitar 2.642 hektare pada fungsi Hutan Lindung. Secara ekologis, kawasan ini merupakan bagian dari lanskap rawa gambut yang memiliki nilai penting sebagai pengatur tata air, penyimpan karbon, habitat keanekaragaman hayati, serta ruang kehidupan masyarakat.

Gambaran umum wilayah menunjukkan bahwa Hutan Desa Katimpun memiliki karakter biofisik berupa topografi datar, tutupan belukar rawa yang dominan, keberadaan rawa, lahan terbuka terbatas, serta sistem hidrologi gambut yang sensitif terhadap pengeringan dan kebakaran. Karena itu, seluruh rencana pengembangan usaha harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan fungsi Hutan Lindung dan konservasi gambut.

Hasil identifikasi potensi menunjukkan bahwa arah pengembangan Hutan Desa Katimpun tidak bertumpu pada hasil hutan kayu, tetapi pada hasil hutan bukan kayu, perikanan rawa, pembibitan dan pengayaan jenis gambut, agroforestri/paludikultur, jasa lingkungan, ekowisata terbatas, dan usaha pendukung off-farm. Komoditas yang menonjol antara lain rotan dan kerajinan anyaman, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, jamur hutan, pembibitan tanaman gambut, aren/gula aren, serta jasa lingkungan berbasis tata air, karbon, biodiversitas, dan edukasi gambut.

Dalam penyusunan terbaru, laporan juga memasukkan peternakan ayam petelur dan pembuatan pakan ternak berbasis tanaman jagung sebagai usaha pendukung jangka pendek/off-farm. Usaha ini tidak ditempatkan sebagai inti pemanfaatan kawasan Hutan Desa, melainkan sebagai penguat ekonomi rumah tangga, ketahanan pangan, dan diversifikasi pendapatan masyarakat. Pengembangan ayam petelur dan jagung pakan harus dilakukan di luar kawasan hutan, pada pekarangan atau lahan desa yang sudah tersedia, tanpa pembukaan hutan, tanpa bakar, dan tanpa drainase gambut.

Analisis prioritas menunjukkan bahwa usaha yang paling siap diperkuat pada tahap awal adalah rotan dan kerajinan anyaman, madu kelulut, perikanan rawa, serta usaha pendukung ayam petelur dan pakan jagung. Rotan memiliki keunggulan karena sudah ada keterampilan masyarakat dan KUPS pengrajin rotan. Madu kelulut memiliki kesesuaian ekologis karena bergantung pada vegetasi berbunga. Perikanan rawa dekat dengan mata pencaharian masyarakat. Ayam petelur dan pakan jagung dapat menjadi sumber pendapatan harian atau periodik tanpa meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan.

Prioritas jangka menengah diarahkan pada tanaman obat, tanaman hias, jamur, pembibitan tanaman gambut, agroforestri, dan paludikultur. Prioritas ini membutuhkan inventarisasi jenis, budidaya, standar mutu, pengolahan, dan penguatan pasar. Sementara itu, jasa lingkungan, karbon, jasa tata air, ekowisata edukasi, dan ekonomi hijau ditempatkan

sebagai agenda jangka panjang karena memerlukan baseline, sistem monitoring, SOP, pemandu, data teknis, serta kemitraan profesional.

Kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan Hutan Desa Katimpun. LPHD perlu diperkuat sebagai payung pengelolaan kawasan dan koordinator usaha, sedangkan KUPS menjadi unit pelaksana ekonomi berbasis komoditas. Penguatan kelembagaan perlu mencakup AD/ART, SOP, pembukuan, rencana usaha, mekanisme pembagian manfaat, pencatatan produksi, dan forum koordinasi multipihak.

Rekomendasi tindak lanjut menekankan pentingnya perlindungan kawasan, pengelolaan tata air gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penguatan usaha prioritas, peningkatan nilai tambah produk, pengembangan pasar, serta pembangunan kemitraan. Kemitraan perlu melibatkan KPHL Kapuas Kahayan, Pemerintah Desa, Dinas Kehutanan, BPSKL, dinas teknis, mitra konservasi, perguruan tinggi, swasta/offtaker, UMKM, dan lembaga pendanaan.

Secara keseluruhan, Hutan Desa Katimpun memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model Perhutanan Sosial berbasis ekonomi hijau di ekosistem rawa gambut. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan menjaga fungsi lindung kawasan, memperkuat kelembagaan lokal, memilih usaha yang sesuai dengan daya dukung ekologis, membangun pasar dan kemitraan, serta memastikan manfaat ekonomi dapat diterima masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Tabel RE-1. Ringkasan Potensi dan Arah Pengembangan

Kelompok Potensi	Contoh Kegiatan/ Komoditas	Arah Pengembangan
HHBK	Rotan, madu kelulut, tanaman obat, tanaman hias, jamur	Produk bernilai tambah, budidaya, pengemasan, pemasaran kolektif
Perikanan rawa	Ikan papuyu/betok, gabus/haruan, lele, ikan rawa lokal	Tangkap lestari, budidaya rawa/keramba, olahan ikan
Agroforestri/ paludikultur	Aren, cempedak, durian, rotan, tanaman lokal gambut	Pemulihan tutupan vegetasi dan ekonomi jangka menengah
Pembibitan	Balangeran, lampuda, hampuak, kambasira, aren, rotan	Pasar program rehabilitasi, restorasi, dan pengayaan kawasan
Jasa lingkungan	Tata air gambut, karbon, biodiversitas, edukasi, ekowisata	Ekonomi hijau jangka panjang berbasis data dan kemitraan
Usaha pendukung off-farm	Ayam petelur dan pakan jagung	Diversifikasi pendapatan rumah tangga tanpa tekanan terhadap kawasan HD

Tabel RE-2. Ringkasan Prioritas Pengembangan

Tahapan	Prioritas	Keterangan
Jangka pendek (0-2 tahun)	Rotan, madu kelulut, perikanan rawa, ayam petelur dan pakan jagung	Usaha paling dekat dengan kapasitas masyarakat dan dapat diperkuat segera
Jangka menengah (3-5 tahun)	Tanaman obat, tanaman hias, jamur, pembibitan, agroforestri/paludikultur	Membutuhkan penguatan teknis, fasilitas, standar mutu, dan pasar
Jangka panjang (>5 tahun)	Jasa lingkungan, karbon, tata air, ekowisata, edukasi gambut	Membutuhkan baseline, SOP, kelembagaan kuat, dan kemitraan profesional

Tabel RE-3. Rekomendasi Kunci

Bidang	Rekomendasi Utama
Kawasan	Perkuat perlindungan Hutan Lindung rawa gambut, patroli, tabat kanal, monitoring TMA, dan pencegahan karhutla.
Usaha prioritas	Fokus awal pada rotan, madu kelulut, perikanan rawa, serta ayam petelur dan pakan jagung sebagai usaha off-farm.
Kelembagaan	Perkuat LPHD sebagai koordinator kawasan dan KUPS sebagai unit usaha dengan SOP, AD/ART, pembukuan, dan rencana usaha.
Nilai tambah	Dorong desain produk rotan, kemasan madu, olahan ikan, produk herbal, branding, katalog, dan pemasaran digital.
Kemitraan	Bangun kerja sama dengan KPHL, pemerintah desa, dinas teknis, BPSKL, mitra konservasi, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga pendanaan.
Data lanjutan	Perkuat peta sebaran, data stok komoditas, produksi aktual, biaya usaha, margin, data pasar, dan baseline jasa lingkungan.

DAFTAR SINGKATAN

Daftar singkatan berikut digunakan untuk memudahkan pembaca memahami istilah kelembagaan, teknis, program, dan komoditas yang muncul dalam laporan.

Singkatan	Kepanjangan/Keterangan
AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BOSF	Borneo Orangutan Survival Foundation/Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo
BPSKL	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
BRG/BRGM	Badan Restorasi Gambut/Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
CSR	Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DAS	Daerah Aliran Sungai
HD	Hutan Desa
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HL	Hutan Lindung
Karhutla	Kebakaran Hutan dan Lahan
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KUPS	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LPHD	Lembaga Pengelola Hutan Desa
LSM/NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Governmental Organization
MRV	Measurement, Reporting, and Verification
NBS	Nature-Based Solutions/Solusi Berbasis Alam
PIRT	Pangan Industri Rumah Tangga
PPHD	Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RKPS	Rencana Kelola Perhutanan Sosial
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	Standard Operating Procedure/Prosedur Operasional Baku
TMA	Tinggi Muka Air
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

DAFTAR ISTILAH / GLOSARIUM

Glosarium ini disusun untuk membantu pembaca memahami istilah penting yang digunakan dalam laporan studi potensi Hutan Desa Katimpun.

Istilah	Pengertian
Agroforestri	Sistem pengelolaan lahan yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, perkebunan, atau tanaman produktif lain dalam satu unit pengelolaan. Dalam konteks Katimpun, agroforestri diarahkan pada jenis yang sesuai dengan lahan basah dan tidak merusak gambut.
Ayam petelur	Usaha peternakan ayam yang diarahkan untuk menghasilkan telur konsumsi. Dalam laporan ini, ayam petelur ditempatkan sebagai usaha pendukung off-farm di luar kawasan Hutan Desa, bukan sebagai pemanfaatan langsung kawasan hutan.
Baseline	Data dasar yang digunakan sebagai pembandingan awal untuk menilai perubahan pada periode berikutnya, misalnya baseline tutupan lahan, karbon, produksi, atau kondisi tata air.
Belukar rawa	Tipe tutupan lahan pada kawasan rawa yang didominasi semak, vegetasi muda, atau tumbuhan rawa. Pada Hutan Desa Katimpun, belukar rawa menjadi tutupan dominan dan penting untuk rehabilitasi serta pengembangan HHBK.
Biodiversitas/ Keanekaragaman hayati	Keanekaragaman makhluk hidup yang mencakup ekosistem, jenis, dan variasi genetik. Biodiversitas Hutan Desa Katimpun menjadi dasar penting bagi konservasi, pendidikan lingkungan, dan jasa lingkungan.
Ekonomi hijau	Pendekatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak fungsi ekologis. Usaha rotan, madu kelulut, pembibitan, perikanan berkelanjutan, dan jasa lingkungan merupakan contoh arah ekonomi hijau.
Ekosistem gambut	Ekosistem lahan basah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik dalam kondisi jenuh air. Gambut menyimpan karbon dan mengatur tata air, tetapi rentan terbakar jika mengering.
Ekowisata	Kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab, memberi manfaat bagi masyarakat, dan mendukung konservasi. Dalam laporan ini, ekowisata diarahkan secara terbatas untuk edukasi gambut, rotan, madu, tanaman obat, dan budaya lokal.
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Hasil hutan selain kayu, seperti rotan, madu, tanaman obat, tanaman hias, jamur, purun, getah, dan bahan pangan hutan. HHBK menjadi basis penting pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun.
Hutan Desa	Skema Perhutanan Sosial berupa pengelolaan kawasan hutan negara oleh lembaga desa untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Istilah	Pengertian
Hutan Lindung	Kawasan hutan yang memiliki fungsi utama melindungi sistem penyangga kehidupan, termasuk pengaturan tata air, pencegahan banjir, perlindungan tanah, dan konservasi lingkungan.
Jasa lingkungan	Manfaat yang diperoleh dari fungsi ekosistem, seperti tata air, penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, edukasi, dan wisata alam.
Karhutla	Kebakaran hutan dan lahan. Pada ekosistem gambut, karhutla merupakan risiko utama yang dapat merusak habitat, sumber daya ekonomi, kesehatan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok usaha yang dibentuk untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam skema Perhutanan Sosial, misalnya KUPS rotan, madu, perikanan, jasa lingkungan, atau usaha pendukung lainnya.
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)	Lembaga desa yang diberi mandat mengelola Hutan Desa, menyusun rencana kelola, mengoordinasikan perlindungan kawasan, membina KUPS, dan membangun kemitraan.
Madu kelulut	Madu yang dihasilkan lebah tanpa sengat. Usaha madu kelulut cocok dikembangkan karena bergantung pada vegetasi berbunga dan tidak membutuhkan pembukaan lahan.
MRV	Sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang diperlukan dalam skema karbon atau jasa lingkungan agar hasil pengurangan emisi atau peningkatan serapan karbon dapat dipertanggungjawabkan.
Off-farm	Kegiatan ekonomi yang dilakukan di luar kawasan atau di luar kegiatan langsung pemanfaatan hutan. Ayam petelur dan pakan jagung dalam laporan ini termasuk usaha pendukung off-farm.
Paludikultur	Sistem budidaya pada lahan gambut basah tanpa pengeringan. Jenis yang sesuai dapat meliputi purun, jelutung, sagu, rotan, atau tanaman lokal toleran genangan.
Pakan jagung	Pakan ternak yang sebagian komponennya berasal dari jagung lokal. Dalam laporan ini, jagung pakan diposisikan sebagai pendukung usaha ayam petelur dan harus dikembangkan di lahan non-hutan yang sesuai.
Perhutanan Sosial	Sistem pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga lingkungan, dan memperkuat dinamika sosial budaya melalui skema seperti Hutan Desa dan kemitraan kehutanan.
Rotan	Jenis palma merambat yang menjadi HHBK penting untuk bahan baku kerajinan. Pengembangan rotan membutuhkan panen lestari, budidaya, pengolahan, desain produk, dan pemasaran.
Ruang pemanfaatan	Bagian areal kelola Hutan Desa yang dapat dimanfaatkan secara terbatas sesuai rencana kelola, fungsi kawasan, dan aturan Perhutanan Sosial.

Istilah	Pengertian
Ruang perlindungan	Bagian areal kelola Hutan Desa yang diprioritaskan untuk menjaga fungsi ekologis, habitat, tata air, dan perlindungan gambut.
Sekat kanal/tabat	Bangunan sederhana untuk menahan aliran air pada kanal atau parit agar gambut tetap basah dan risiko kebakaran berkurang.
Silvofishery	Sistem pengelolaan perikanan yang dikaitkan dengan vegetasi hutan atau lahan basah. Di Katimpun, konsep ini dapat diterapkan pada budidaya ikan yang tetap menjaga fungsi rawa gambut.
Stup kelulut	Kotak atau rumah buatan untuk budidaya lebah kelulut agar panen madu lebih mudah dan higienis.
Tata air gambut	Sistem pengaturan air pada lahan gambut. Tata air yang baik menjaga gambut tetap basah, mencegah kebakaran, dan mendukung perikanan serta vegetasi lokal.
Tinggi Muka Air (TMA)	Ukuran tinggi air pada gambut atau kanal. Monitoring TMA penting untuk mengetahui kondisi basah-kering gambut dan risiko kebakaran.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sasaran dan Hasil yang Diharapkan.....	4
1.5 Ruang Lingkup Studi	5
1.6 Manfaat Studi.....	6
1.7 Posisi Studi dan Kerangka Pikir	6
1.8 Batasan Studi.....	7
1.9 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI	9
2.1 Pengantar	9
2.2 Profil Umum Hutan Desa Katimpun	9
2.3 Letak Administratif, Batas, dan Posisi Lanskap	10
2.4 Legalitas dan Status Pengelolaan Kawasan.....	11
2.5 Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar Wilayah.....	12
2.6 Kondisi Biofisik Kawasan.....	13
2.7 Topografi, Ketinggian, dan Kesesuaian Pemanfaatan	14
2.8 Ekosistem Gambut dan Hidrologi.....	14
2.9 Tutupan Lahan dan Implikasi Pengelolaan	15
2.10 Vegetasi dan Flora Penting	16
2.11 Fauna dan Keanekaragaman Hayati	16
2.12 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	17
2.13 Sarana, Prasarana, dan Kondisi Pendukung Desa	19
2.14 Kelembagaan Pengelola Hutan Desa	20
2.15 Potensi Awal Pengembangan Hutan Desa	20
2.16 Riwayat Kebakaran dan Kerawanan Kawasan.....	21
2.17 Isu Strategis Wilayah dan Implikasi terhadap Studi Potensi	22
BAB III METODOLOGI STUDI	24
3.1 Pendekatan Studi	24
3.2 Lokasi, Objek, dan Unit Analisis Studi	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4.2 Wawancara Mendalam.....	27
3.4.3 Diskusi Kelompok Terarah (FGD)	27
3.4.4 Observasi Lapangan.....	27
3.4.5 Pemetaan Partisipatif dan Dokumentasi	27
3.4.6 Penelusuran Pasar Awal	28
3.5 Aspek dan Indikator Kajian.....	28
3.6 Metode Analisis Data.....	29
3.6.8 Analisis Kemitraan dan Tindak Lanjut.....	30

3.7 Kriteria Penilaian Prioritas Pengembangan Usaha.....	31
3.8 Validasi dan Triangulasi Data.....	32
3.9 Tahapan Pelaksanaan Studi	33
3.10 Batasan Studi.....	33
3.11 Prinsip Etika dan Kehati-hatian Pengelolaan Data	34
BAB IV HASIL IDENTIFIKASI POTENSI DAN PELUANG USAHA	35
4.1 Pendahuluan.....	35
4.2 Kerangka Analisis Potensi dan Peluang Usaha.....	35
4.3 Gambaran Umum Potensi Kawasan Hutan Desa Katimpun	36
4.4 Identifikasi Komoditas dan Peluang Usaha Utama.....	37
4.4.1 Rotan dan Kerajinan Anyaman Rotan.....	37
4.4.2 Madu Kelulut dan Madu Hutan.....	38
4.4.3 Perikanan Rawa, Perikanan Tangkap, dan Silvofishery.....	39
4.4.4 Tanaman Obat dan Produk Herbal Lokal.....	40
4.4.5 Tanaman Hias, Kantong Semar, Anggrek Hutan, dan Jamur Hutan	41
4.4.6 Pembibitan, Pengayaan Jenis Asli, Agroforestry, dan Paludikultur.....	41
4.4.7 Jasa Lingkungan, Tata Air Gambut, Karbon, dan Ekowisata Terbatas	42
4.4.8 Usaha Pendukung Off-farm: Ayam Kampung, Ayam Petelur, dan Pakan Ternak Berbasis Jagung	43
4.4.9 Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Pengelolaan Usaha	45
4.5 Ringkasan Peluang Usaha Hutan Desa Katimpun	45
4.6 Analisis Kelayakan Awal dan Tingkat Kesiapan Usaha.....	47
4.7 Analisis SWOT Komoditas Unggulan.....	48
4.8 Analisis Rantai Nilai Komoditas Unggulan	50
4.9 Analisis Pasar Awal dan Nilai Tambah Produk.....	54
4.10 Risiko Ekologis dan Prinsip Pengamanan Usaha.....	55
4.11 Implikasi Hasil Identifikasi terhadap Prioritas Pengembangan.....	57
4.12 Data yang Perlu Diverifikasi dan Diperkuat	58
BAB V PRIORITAS PENGEMBANGAN USAHA.....	60
5.1 Kedudukan Prioritas Pengembangan Usaha.....	60
5.2 Prinsip Dasar Penetapan Prioritas	61
5.3 Kriteria dan Pembobotan Prioritas Pengembangan Usaha.....	62
5.4 Hasil Penilaian Prioritas Usaha	63
5.5 Prioritas Pengembangan Jangka Pendek (0-2 Tahun).....	65
5.6 Prioritas Pengembangan Jangka Menengah (3-5 Tahun).....	69
5.7 Prioritas Pengembangan Jangka Panjang (>5 Tahun).....	70
5.8 Integrasi Antar-Usaha dan Pembentukan Klaster Pengembangan.....	70
5.9 Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Prioritas Usaha	71
5.10 Analisis Kemitraan dan Peluang Kerja Sama	72
5.11 Roadmap Pengembangan Usaha Hutan Desa Katimpun	73
5.12 Indikator Keberhasilan Prioritas Pengembangan	73
5.13 Risiko Prioritas dan Mitigasi	74
BAB VI REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	76
6.1 Kedudukan dan Arah Umum Rekomendasi.....	76
6.2 Sintesis Temuan Utama sebagai Dasar Rekomendasi	76
6.3 Prinsip Operasional Tindak Lanjut	77

6.4 Rekomendasi Perlindungan Kawasan dan Pengamanan Ekologis	77
6.4.1 Penguatan Tata Air Gambut dan Pencegahan Karhutla	78
6.4.2 Rehabilitasi dan Pengayaan Jenis Lokal	78
6.5 Rekomendasi Pengembangan Usaha Prioritas Jangka Pendek	78
6.5.1 Rotan dan Kerajinan Anyaman	79
6.5.2 Madu Kelulut dan Madu Hutan	79
6.5.3 Perikanan Rawa dan Olahan Ikan	79
6.5.4 Ayam Petelur dan Pakan Jagung sebagai Usaha Pendukung Off-farm	79
6.6 Rekomendasi Pengembangan Usaha Jangka Menengah	80
6.7 Rekomendasi Pengembangan Usaha Jangka Panjang	81
6.8 Rekomendasi Peningkatan Nilai Tambah, Mutu, dan Pemasaran	81
6.9 Program Penguatan Masyarakat, LPHD, dan KUPS	82
6.10 Rekomendasi Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Manfaat	83
6.11 Rekomendasi Kemitraan dan Kerja Sama	84
6.12 Rekomendasi Investasi dan Pembiayaan Bertahap	85
6.13 Monitoring, Evaluasi, dan Pengelolaan Data	85
6.14 Matriks Rencana Tindak Lanjut Terpadu	86
6.15 Indikator Keberhasilan Tahapan	87
BAB VII PENUTUP	89
7.1 Kesimpulan	89
7.1.1 Kondisi Umum dan Posisi Strategis Hutan Desa Katimpun	89
7.1.2 Potensi dan Peluang Usaha yang Layak Dikembangkan	90
7.1.3 Kelembagaan dan Kemitraan sebagai Faktor Penentu	91
7.1.4 Risiko Pengelolaan dan Prinsip Kehati-hatian	92
7.2 Rekomendasi	93
7.2.1 Rekomendasi untuk LPHD Katimpun dan KUPS	93
7.2.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	93
7.2.3 Rekomendasi untuk KPHL, Dinas Teknis, dan BPS Kalimantan	94
7.2.4 Rekomendasi untuk Mitra Konservasi, Perguruan Tinggi, dan Swasta	94
7.3 Agenda Tindak Lanjut Prioritas	95
7.4 Kebutuhan Data dan Studi Lanjutan	95
7.5 Penutup Akhir	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan sosial merupakan salah satu pendekatan pengelolaan hutan yang memberi ruang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat secara legal, terencana, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan. Melalui skema ini, masyarakat tidak lagi hanya dipandang sebagai pihak yang tinggal di sekitar hutan, tetapi sebagai pelaku utama yang memiliki peran dalam menjaga fungsi ekologis kawasan, mengembangkan sumber penghidupan, serta memperkuat tata kelola sumber daya alam di tingkat tapak.

Salah satu bentuk perhutanan sosial adalah Hutan Desa, yaitu skema pengelolaan kawasan hutan negara yang diberikan kepada lembaga desa untuk dikelola bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Dalam konteks kawasan Hutan Lindung, pemanfaatan Hutan Desa tidak diarahkan pada eksploitasi kayu, melainkan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan yang tidak merusak, rehabilitasi, pengayaan vegetasi, dan pengembangan usaha masyarakat yang sesuai dengan daya dukung kawasan.

Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan salah satu desa yang memperoleh hak kelola melalui skema Hutan Desa. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/401/2015 tanggal 31 Juli 2015, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Katimpun memperoleh hak pengelolaan Hutan Desa seluas sekitar 2.642 hektare pada kawasan Hutan Lindung. Secara kelembagaan, pengelolaan tersebut menjadi dasar penting bagi masyarakat desa untuk mengelola kawasan secara sah, partisipatif, dan terarah.

Hutan Desa Katimpun berada pada lanskap hutan rawa gambut yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, habitat keanekaragaman hayati, serta penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Karakter rawa gambut membuat kawasan ini memiliki nilai strategis dalam mitigasi perubahan iklim, perlindungan biodiversitas, dan pengendalian risiko kebakaran. Namun, karakter tersebut juga menyebabkan kawasan sangat rentan terhadap gangguan hidrologi, pengeringan gambut, perubahan tutupan lahan, dan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan gambaran umum kawasan, Hutan Desa Katimpun memiliki kondisi biofisik yang didominasi oleh belukar rawa, rawa, dan sebagian kecil lahan terbuka. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang pengembangan usaha berbasis pemulihan ekosistem dan pemanfaatan non-kayu, seperti rotan, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan tanaman gambut, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, dan ekowisata edukasi. Pada saat yang sama, kondisi tersebut mengharuskan setiap rencana usaha diletakkan dalam kerangka perlindungan fungsi Hutan Lindung dan kehati-hatian pengelolaan gambut.

Secara sosial ekonomi, masyarakat Desa Katimpun memiliki hubungan yang kuat dengan sungai, rawa, lahan basah, dan sumber daya hutan. Mata pencaharian masyarakat meliputi petani, nelayan, pengrajin rotan, pembudidaya madu, pelaku usaha kecil, serta kegiatan lain yang bergantung pada sumber daya alam lokal. Keberadaan LPHD dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi modal kelembagaan yang penting untuk mengarahkan pemanfaatan potensi tersebut agar lebih tertib, produktif, dan memberi manfaat kolektif.

Beberapa KUPS yang telah berkembang atau direncanakan dalam pengelolaan Hutan Desa Katimpun antara lain KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun", KUPS Budidaya Lebah Madu, KUPS Perikanan, serta peluang penguatan KUPS atau unit usaha lain seperti pembibitan, jasa lingkungan, peternakan, dan usaha pendukung rumah tangga. Kelembagaan tersebut penting karena potensi sumber daya alam tidak akan berkembang menjadi manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa organisasi pengelola, rencana usaha, pencatatan produksi, pembukuan, pembagian manfaat, dan kerja sama pasar yang jelas.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa potensi utama Hutan Desa Katimpun tidak terletak pada hasil hutan kayu, melainkan pada hasil hutan bukan kayu, perikanan rawa, pembibitan tanaman gambut, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, dan usaha pendukung ekonomi masyarakat. Komoditas rotan dan kerajinan anyaman memiliki peluang nilai tambah yang besar karena telah didukung keterampilan masyarakat dan kelembagaan KUPS. Madu kelulut memiliki peluang sebagai produk ramah lingkungan yang sejalan dengan perlindungan vegetasi gambut. Perikanan rawa memiliki kedekatan dengan mata pencaharian masyarakat. Tanaman obat, tanaman hias, dan jamur memiliki peluang sebagai produk lokal dan edukasi, namun memerlukan kehati-hatian legal dan ekologis. Pembibitan, aren, cempedak, durian, dan pengayaan jenis lokal menjadi peluang jangka menengah yang menghubungkan pemulihan ekosistem dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, hasil daWawanca dan Penggalan data potensi menempatkan usaha ayam petelur dan pakan berbasis jagung sebagai usaha pendukung jangka pendek yang bersifat off-farm. Usaha ini tidak diposisikan sebagai kegiatan inti pemanfaatan kawasan Hutan Desa, melainkan sebagai strategi penguatan ekonomi rumah tangga di sekitar kawasan agar tekanan langsung terhadap hutan dapat dikurangi. Tanam jagung untuk bahan pakan harus diarahkan pada lahan non-kawasan hutan, pekarangan, lahan desa, atau lahan masyarakat yang sesuai, tanpa pembakaran dan tanpa mengganggu tata air gambut.

Berdasarkan prioritas kesiapan, pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun perlu dilakukan secara bertahap. Tahap awal diarahkan pada usaha yang paling dekat dengan kapasitas masyarakat, yaitu rotan dan kerajinan, madu kelulut, perikanan rawa, serta usaha pendukung ayam petelur dan pakan jagung. Tahap menengah diarahkan pada tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry, dan pengolahan produk. Tahap panjang diarahkan pada jasa lingkungan, tata air gambut, karbon, ekowisata edukasi, dan ekonomi hijau berbasis konservasi.

Hasil studi juga kemudian menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan potensi Hutan Desa Katimpun membutuhkan rekomendasi tindak lanjut yang operasional, mulai dari penguatan produksi, peningkatan nilai tambah, pemasaran, kelembagaan, kemitraan, investasi bertahap, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, laporan studi ini tidak berhenti pada daftar potensi, tetapi diarahkan menjadi dasar penyusunan strategi pengelolaan dan pengembangan usaha yang terukur, realistis, dan sejalan dengan fungsi ekologis kawasan.

Atas dasar itu, penyusunan Laporan Studi Potensi Hutan Desa Katimpun menjadi penting untuk menyediakan gambaran yang utuh mengenai kondisi kawasan, potensi sumber daya alam, peluang usaha, prioritas pengembangan, serta rekomendasi tindak lanjut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi LPHD Katimpun, KUPS, Pemerintah Desa Katimpun, KPHL Kapuas Kahayan, pemerintah daerah, mitra konservasi, perguruan tinggi, sektor swasta, dan pihak pendukung lain dalam mengembangkan Hutan Desa Katimpun sebagai model pengelolaan perhutanan sosial yang mengintegrasikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem gambut.

Tabel 1.1 Isu Kunci dan Implikasi terhadap Potensi Hutan Desa Katimpun

No	Isu Kunci	Kondisi Umum	Implikasi
1	Status kawasan	Hutan Desa Katimpun berada pada kawasan Hutan Lindung rawa gambut.	Usaha diarahkan pada HHBK, jasa lingkungan, agroforestry/paludikultur, perikanan, dan usaha pendukung yang tidak merusak.
2	Kerentanan gambut	Gambut rentan terhadap pengeringan, kebakaran, dan perubahan tutupan lahan.	Setiap potensi usaha harus disertai prinsip perlindungan tata air, larangan bakar, dan rehabilitasi.
3	Potensi ekonomi lokal	Terdapat rotan, madu, ikan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, jasa lingkungan, dan usaha off-farm.	Studi perlu menilai potensi, kesiapan, rantai nilai, pasar, dan risiko tiap kelompok usaha.
4	Kelembagaan masyarakat	LPHD dan KUPS menjadi pelaksana utama pengelolaan dan usaha.	Perlu penguatan tata kelola, administrasi, pembukuan, SOP, dan pembagian manfaat.
5	Akses pasar dan nilai tambah	Produk masih berisiko dijual dalam bentuk sederhana atau mentah.	Perlu strategi pengolahan, branding, kemasan, pemasaran kolektif, dan kemitraan.
6	Kemitraan dan pembiayaan	Pengembangan usaha dan jasa lingkungan membutuhkan dukungan para pihak.	Studi perlu mengarahkan peluang kerja sama dengan KPHL, pemerintah, mitra konservasi, perguruan tinggi, swasta, dan offtaker.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Laporan Studi Potensi Hutan Desa Katimpun dirumuskan untuk menjawab kebutuhan perencanaan pengelolaan kawasan dan pengembangan usaha masyarakat. Rumusan masalah tidak hanya berfokus pada jenis komoditas, tetapi juga pada keterkaitan antara kawasan, masyarakat, kelembagaan, peluang usaha, risiko, dan tindak lanjut.

1. Bagaimana kondisi umum Hutan Desa Katimpun ditinjau dari aspek legalitas, lokasi, biofisik, ekosistem gambut, sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan, dan tantangan pengelolaan?
2. Apa saja potensi sumber daya alam dan peluang usaha yang dapat dikembangkan di Hutan Desa Katimpun dan wilayah pendukungnya secara legal, produktif, dan lestari?
3. Komoditas atau jenis usaha apa saja yang paling realistis diprioritaskan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan kesiapan sumber daya, kelembagaan, pasar, dan risiko ekologis?
4. Bagaimana usaha rotan, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, ekowisata, serta usaha pendukung ayam petelur dan pakan jagung dapat dikembangkan secara bertahap?

5. Dukungan kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan monitoring seperti apa yang dibutuhkan agar pengembangan Hutan Desa Katimpun memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi lindung rawa gambut?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Studi Potensi Hutan Desa Katimpun adalah menyediakan dasar informasi dan analisis yang utuh mengenai kondisi kawasan, potensi sumber daya alam, sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan pengelola, peluang usaha, prioritas pengembangan, serta rekomendasi tindak lanjut pengelolaan Hutan Desa Katimpun secara berkelanjutan.

Studi ini dimaksudkan untuk menjadi pijakan awal bagi LPHD Katimpun, KUPS, Pemerintah Desa, KPHL Kapuas Kahayan, pemerintah daerah, dan para mitra dalam menyusun program pengembangan usaha perhutanan sosial yang produktif, berkeadilan, dan tetap menjaga fungsi Hutan Lindung rawa gambut.

1.3.2 Tujuan

1. Mendeskripsikan kondisi umum Hutan Desa Katimpun, meliputi aspek legalitas, lokasi, fungsi kawasan, biofisik, ekosistem gambut, aksesibilitas, sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan, dan isu strategis pengelolaan.
6. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan peluang usaha yang sesuai dengan fungsi Hutan Lindung rawa gambut, terutama HHBK, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan tanaman gambut, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, ekowisata edukasi, dan usaha pendukung off-farm.
7. Menganalisis tingkat kesiapan komoditas dan usaha berdasarkan aspek ketersediaan sumber daya, kemampuan masyarakat, kelembagaan LPHD/KUPS, nilai ekonomi, peluang pasar, risiko ekologis, serta kebutuhan penguatan.
8. Menetapkan arah prioritas pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun secara bertahap untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
9. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang mencakup penguatan produksi, nilai tambah, pemasaran, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, monitoring, evaluasi, dan pengamanan fungsi ekologis kawasan.

1.4 Sasaran dan Hasil yang Diharapkan

Sasaran utama studi ini adalah tersedianya dokumen yang dapat digunakan sebagai rujukan praktis dalam pengembangan Hutan Desa Katimpun. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi inventarisasi potensi, tetapi juga menjadi dasar penyusunan program, kemitraan, dan rencana aksi yang dapat dilaksanakan secara bertahap.

Tabel 1.2 Sasaran dan Hasil yang Diharapkan

No	Sasaran Studi	Hasil yang Diharapkan
1	Kawasan Hutan Desa	Tersedia gambaran legalitas, lokasi, biofisik, gambut, tutupan lahan, biodiversitas, akses, dan isu strategis.
2	Potensi sumber daya dan usaha	Tersedia identifikasi potensi rotan, madu, perikanan, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry, jasa lingkungan, ekowisata, dan usaha off-farm.

3	Prioritas pengembangan	Tersedia pengelompokan prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan kesiapan dan risiko.
4	Kelembagaan dan kemitraan	Tersedia arah penguatan LPHD, KUPS, kemitraan teknis, pemasaran, pembiayaan, dan kerja sama konservasi.
5	Tindak lanjut operasional	Tersedia rekomendasi program, rencana aksi, indikator monitoring, dan kebutuhan data lanjutan.

1.5 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi disusun untuk memastikan bahwa laporan ini menjawab kebutuhan pengelolaan Hutan Desa Katimpun secara menyeluruh. Ruang lingkup tidak hanya mencakup daftar komoditas, tetapi juga meliputi kondisi kawasan, kapasitas masyarakat, kelembagaan, rantai nilai, prioritas pengembangan, dan rekomendasi tindak lanjut.

Tabel 1.3 Ruang Lingkup Studi Potensi Hutan Desa Katimpun

No	Ruang Lingkup	Cakupan Pembahasan	Batasan Penting
1	Legalitas dan kawasan	Status Hutan Desa, fungsi Hutan Lindung, luas, batas, posisi dalam lanskap KPHL Kapuas Kahayan.	Tidak mengubah status kawasan dan tidak membahas pemanfaatan kayu sebagai usaha utama.
2	Biofisik dan ekologi	Topografi, tutupan lahan, gambut, hidrologi, vegetasi, flora-fauna, potensi jasa lingkungan.	Data rinci karbon dan inventarisasi biodiversitas penuh memerlukan studi teknis lanjutan.
3	Sosial ekonomi masyarakat	Mata pencaharian, hubungan masyarakat dengan sumber daya alam, peran kelompok perempuan dan pemuda, usaha rumah tangga.	Data pendapatan rumah tangga belum dianalisis secara finansial mendalam.
4	Kelembagaan	LPHD, KUPS, hubungan dengan pemerintah desa, KPHL, mitra konservasi, swasta, perguruan tinggi.	Evaluasi kelembagaan bersifat awal dan perlu audit organisasi lanjutan.
5	Potensi usaha	HHBK, perikanan, pembibitan, agroforestry, jasa lingkungan, ekowisata, ayam petelur dan pakan jagung off-farm.	Usaha off-farm tidak boleh ditempatkan di kawasan Hutan Lindung dan tidak boleh mendorong pembukaan gambut.
6	Prioritas dan rekomendasi	Penentuan prioritas, strategi, kemitraan, pembiayaan, monitoring, dan rencana aksi.	Perlu verifikasi biaya, margin, pasar, dan produksi aktual sebelum peningkatan skala usaha.

1.6 Manfaat Studi

Studi ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Desa Katimpun. Manfaat tersebut bersifat praktis dan strategis karena hasil studi dapat digunakan untuk merumuskan program, membangun kemitraan, dan memperkuat keputusan pengelolaan berbasis data.

Tabel 1.4 Manfaat Studi bagi Para Pihak

Pihak	Manfaat yang Diharapkan	Bentuk Pemanfaatan Hasil Studi
LPHD Katimpun	Memiliki dasar pengelolaan kawasan dan usaha yang lebih terarah.	Penyusunan rencana kerja, SOP, prioritas usaha, kemitraan, dan monitoring.
KUPS	Memiliki arah pengembangan usaha sesuai bidang masing-masing.	Perencanaan produksi, pengolahan, pemasaran, pembukuan, dan pengajuan dukungan.
Pemerintah Desa	Memiliki bahan integrasi program Hutan Desa ke perencanaan pembangunan desa.	Dukungan kebijakan, fasilitasi anggaran, penguatan kelembagaan, dan usaha off-farm.
KPHL Kapuas Kahayan dan instansi kehutanan	Memiliki bahan pembinaan dan pendampingan perhutanan sosial.	Penguatan tata kelola kawasan, HHBK, rehabilitasi, jasa lingkungan, dan perlindungan gambut.
Pemerintah daerah/dinas teknis	Memiliki rujukan lintas sektor untuk UMKM, perikanan, peternakan, koperasi, pariwisata, dan lingkungan.	Program pelatihan, akses pasar, sarana produksi, pendampingan usaha, dan pengendalian karhutla.
Mitra konservasi, perguruan tinggi, swasta, dan pendana	Memiliki dasar kerja sama berbasis kebutuhan lokal dan potensi kawasan.	Riset, pendampingan, investasi sosial, offtaker produk, ekowisata, karbon, dan jasa lingkungan.

1.7 Posisi Studi dan Kerangka Pikir

Laporan ini diposisikan sebagai studi potensi, bukan studi kelayakan finansial penuh dan bukan dokumen rencana bisnis final. Dengan demikian, hasil laporan berfungsi sebagai pijakan untuk menyusun prioritas dan rencana tindak lanjut. Studi ini membaca Hutan Desa Katimpun sebagai satu kesatuan antara kawasan, masyarakat, kelembagaan, potensi ekonomi, risiko ekologis, dan kemitraan.

Kerangka pikir studi dimulai dari pemahaman terhadap kondisi kawasan Hutan Desa Katimpun, dilanjutkan dengan identifikasi potensi sumber daya dan peluang usaha, analisis kesiapan dan prioritas, penyusunan rekomendasi tindak lanjut, serta penegasan agenda penguatan kelembagaan dan kemitraan. Dengan kerangka ini, pengembangan usaha

diharapkan tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memperkuat perlindungan kawasan dan tata kelola perhutanan sosial.

Tabel 1.5 Kerangka Pikir Studi Potensi Hutan Desa Katimpun

Tahap Analisis	Pertanyaan Utama	Output
Kondisi dasar kawasan	Apa karakter legal, biofisik, sosial, dan kelembagaan HD Katimpun?	Gambaran umum lokasi dan isu strategis.
Identifikasi potensi	Apa saja sumber daya dan peluang usaha yang tersedia?	Daftar dan analisis potensi usaha.
Penilaian kesiapan	Potensi mana yang paling realistis dikembangkan terlebih dahulu?	Prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang.
Rekomendasi tindak lanjut	Apa program, dukungan, dan kemitraan yang dibutuhkan?	Strategi implementasi dan rencana aksi.
Penegasan akhir	Apa kesimpulan dan agenda lanjutan?	Penutup dan arahan pengembangan.

1.8 Batasan Studi

Studi ini memiliki beberapa batasan yang perlu dipahami agar hasilnya digunakan secara tepat. Batasan ini tidak mengurangi manfaat studi, tetapi menjadi penanda bahwa beberapa aspek masih membutuhkan pendalaman lanjutan sebelum kegiatan ditingkatkan ke skala usaha atau investasi yang lebih besar.

1. Data produksi beberapa komoditas masih bersifat indikatif dan sebagian berasal dari dokumen rencana, sehingga perlu diverifikasi melalui pencatatan produksi aktual di lapangan.
2. Studi ini belum merupakan inventarisasi lengkap flora dan fauna, survei stok rotan, survei stok ikan, atau penghitungan karbon secara teknis.
3. Analisis ekonomi yang disajikan masih bersifat awal dan belum menggantikan analisis kelayakan finansial rinci yang menghitung biaya produksi, biaya tenaga kerja, transportasi, penyusutan alat, margin, dan risiko usaha.
4. Usaha ayam petelur dan pakan jagung diposisikan sebagai usaha pendukung off-farm di luar kawasan Hutan Lindung dan tidak boleh menjadi alasan pembukaan lahan baru di kawasan gambut.
5. Pengembangan jasa karbon, jasa tata air, dan ekowisata membutuhkan data baseline, SOP, kelembagaan, perizinan, serta mitra teknis khusus sebelum dapat dilaksanakan pada skala ekonomi.
6. Seluruh rekomendasi dalam studi ini harus diselaraskan dengan RKPS, aturan perhutanan sosial, fungsi Hutan Lindung, arahan KPHL, serta musyawarah masyarakat dan LPHD.

1.9 Sistematika Penulisan

Agar alur pembahasan mudah diikuti, laporan studi ini disusun secara bertahap dari gambaran umum kawasan, metodologi, hasil identifikasi, prioritas, rekomendasi, hingga penutup. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut.

Tabel 1.6 Sistematika Penulisan Laporan Studi Potensi Hutan Desa Katimpun

Bab	Isi Utama
Bagian Awal	Kata pengantar, ringkasan eksekutif, daftar singkatan, daftar istilah, dan daftar pustaka.
Bab I Pendahuluan	Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, manfaat, batasan, dan sistematika.
Bab II Gambaran Umum Wilayah Studi	Profil Hutan Desa Katimpun, legalitas, kondisi biofisik, sosial ekonomi, kelembagaan, akses, dan isu strategis.
Bab III Metodologi Studi	Pendekatan, jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tahapan studi.
Bab IV Hasil Identifikasi Potensi dan Peluang Usaha	Potensi sumber daya, komoditas, peluang usaha, analisis kesiapan, SWOT, rantai nilai, pasar, dan risiko.
Bab V Prioritas Pengembangan Usaha	Kriteria prioritas, usaha jangka pendek, menengah, panjang, klaster usaha, kemitraan, roadmap, dan indikator.
Bab VI Rekomendasi dan Tindak Lanjut	Strategi implementasi, rekomendasi program, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, monitoring, dan rencana aksi.
Bab VII Penutup	Kesimpulan, rekomendasi akhir, agenda lanjutan, dan penegasan arah pengelolaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

2.1 Pengantar

Bab ini menyajikan gambaran umum wilayah studi sebagai dasar untuk memahami konteks Hutan Desa Katimpun sebelum dilakukan identifikasi potensi dan peluang usaha pada bab berikutnya. Uraian dalam bab ini mencakup profil umum Hutan Desa Katimpun, legalitas dan status pengelolaan, letak administratif, kondisi biofisik, tutupan lahan, vegetasi dan keanekaragaman hayati, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan pengelola, aksesibilitas, serta permasalahan strategis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan potensi Hutan Desa.

Penyajian gambaran umum wilayah tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga diarahkan untuk menjelaskan keterkaitan antara kondisi kawasan dengan peluang pengembangan usaha berbasis sumber daya alam. Dengan demikian, pembaca dapat memahami mengapa pengembangan Hutan Desa Katimpun perlu diarahkan pada hasil hutan bukan kayu, agroforestri/paludikultur, perikanan rawa, jasa lingkungan, konservasi gambut, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

2.2 Profil Umum Hutan Desa Katimpun

Hutan Desa Katimpun merupakan salah satu kawasan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada di Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini berada pada fungsi Hutan Lindung dan dikelola oleh masyarakat desa melalui skema Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa. Dalam konteks studi ini, Hutan Desa Katimpun dipahami sebagai ruang kelola masyarakat yang memiliki dua mandat utama, yaitu menjaga fungsi ekologis hutan lindung rawa gambut dan mengembangkan manfaat ekonomi yang tidak merusak kawasan.

Pengelolaan Hutan Desa Katimpun dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Katimpun. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/401/2015 tanggal 31 Juli 2015, LPHD Katimpun memperoleh hak pengelolaan Hutan Desa dengan luas sekitar 2.642 hektare pada kawasan Hutan Lindung. Dengan status tersebut, pengembangan usaha masyarakat perlu diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan secara terbatas, jasa lingkungan, rehabilitasi, dan kegiatan ekonomi hijau yang sesuai dengan karakter ekosistem gambut.

Tabel 2.1 Identitas Umum Hutan Desa Katimpun

No	Uraian	Keterangan
1	Nama kawasan	Hutan Desa Katimpun
2	Skema pengelolaan	Perhutanan Sosial - Hutan Desa
3	Pengelola	Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Katimpun
4	Lokasi administratif	Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
5	Luas areal	±2.642 hektare

No	Uraian	Keterangan
6	Fungsi kawasan	Hutan Lindung
7	DAS	Kapuas Kahayan
8	KPH	KPHL Kapuas Kahayan
9	Tahun pemberian izin	2015

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034, diolah.

Secara substantif, Hutan Desa Katimpun memiliki arti penting sebagai bagian dari lanskap rawa gambut Kapuas-Mantangai. Kawasan ini berfungsi sebagai penyangga tata air, penyimpan karbon, habitat flora-fauna khas rawa gambut, sekaligus sumber penghidupan masyarakat melalui rotan, madu, perikanan, tanaman obat, tanaman hias, dan peluang jasa lingkungan.

2.3 Letak Administratif, Batas, dan Posisi Lanskap

Secara administratif, Hutan Desa Katimpun berada di Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Kecamatan Mantangai merupakan wilayah yang memiliki lanskap luas dengan karakter rawa, sungai, gambut, dan kawasan hutan. Posisi Hutan Desa Katimpun berdekatan dengan beberapa desa lain, sehingga pengelolaan kawasan tidak dapat dilepaskan dari konteks lanskap dan hubungan ekologis antardesa, terutama dalam aspek tata air, akses kanal, potensi kebakaran, pergerakan satwa, dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat.

Secara geografis, areal Hutan Desa Katimpun berada pada koordinat 114°27'26.108"-114°32'50.417" Bujur Timur dan 2°19'42.996"-2°21'59.949" Lintang Selatan. Koordinat tersebut menunjukkan bahwa kawasan berada pada bentang rawa gambut dataran rendah di Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.2 Letak Administratif Hutan Desa Katimpun

No	Parameter	Keterangan
1	Provinsi	Kalimantan Tengah
2	Kabupaten	Kapuas
3	Kecamatan	Mantangai
4	Desa	Katimpun
5	Koordinat Bujur Timur	114°27'26.108"-114°32'50.417" BT
6	Koordinat Lintang Selatan	2°19'42.996"-2°21'59.949" LS
7	Fungsi kawasan	Hutan Lindung
8	Luas areal	±2.642 hektare

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034.

Tabel 2.3 Batas Umum Areal Hutan Desa Katimpun

Arah	Batas Wilayah
Utara	Desa Sei Ahas
Selatan	Desa Kalumpang
Timur	Desa Mantangai Hulu
Barat	Desa Pilang

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034.

Posisi yang berbatasan dengan beberapa desa menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Desa Katimpun perlu memperhatikan hubungan antarruang. Pengendalian kebakaran, penataan akses kanal, perlindungan habitat satwa, dan pengembangan usaha berbasis lanskap membutuhkan koordinasi dengan desa-desa sekitar, KPHL Kapuas Kahayan, serta para pihak pendamping.

2.4 Legalitas dan Status Pengelolaan Kawasan

Legalitas merupakan dasar penting dalam pengelolaan Hutan Desa Katimpun. Persetujuan pengelolaan memberikan akses legal kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan negara melalui LPHD. Namun, hak pengelolaan tersebut bukan berarti kepemilikan atas tanah atau kawasan hutan. Pengelolaan tetap harus mengikuti fungsi kawasan, ketentuan perhutanan sosial, rencana kelola, dan prinsip kelestarian.

Karena Hutan Desa Katimpun berada pada fungsi Hutan Lindung, maka kegiatan pemanfaatan harus diarahkan pada kegiatan yang tidak mengubah bentang alam secara merusak, tidak mengeringkan gambut, tidak membuka lahan dengan cara bakar, dan tidak melakukan pemanfaatan kayu secara komersial. Kegiatan yang lebih sesuai adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pembibitan dan rehabilitasi tanaman gambut, agroforestri/paludikultur, perikanan rawa, ekowisata terbatas, edukasi lingkungan, dan jasa lingkungan.

Tabel 2.4 Dasar Legal dan Implikasi Pengelolaan

No	Dasar/Status	Isi Pokok	Implikasi bagi Studi Potensi
1	SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/401/2015	Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada LPHD Katimpun seluas ± 2.642 ha.	Menjadi dasar legal pengelolaan kawasan oleh LPHD Katimpun.
2	Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021	Mengatur Pengelolaan Perhutanan Sosial.	Pemanfaatan harus mengikuti prinsip perhutanan sosial dan kelestarian.
3	Keputusan Menteri LHK Nomor 1091 Tahun 2024	Mengatur mekanisme pengembangan pengelolaan perhutanan sosial.	Menjadi acuan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha.

No	Dasar/Status	Isi Pokok	Implikasi bagi Studi Potensi
4	Peraturan Dirjen PSKL Nomor 41 Tahun 2024	Petunjuk teknis penyusunan RKPS.	Menjadi rujukan penyusunan rencana kelola dan arah kegiatan.
5	Status Hutan Lindung	Fungsi utama perlindungan sistem penyangga kehidupan.	Usaha diarahkan pada HHBK, jasa lingkungan, dan pemanfaatan rendah dampak.

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034; dokumen regulasi perhutanan sosial.

2.5 Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar Wilayah

Aksesibilitas merupakan faktor penting dalam studi potensi Hutan Desa karena berpengaruh terhadap biaya produksi, distribusi hasil, intensitas pendampingan, pengawasan kawasan, dan pengembangan pasar. Hutan Desa Katimpun dapat diakses melalui jalur air dan jalur darat tertentu. Karakter wilayah rawa gambut menjadikan transportasi air, kanal, dan sungai sebagai bagian penting dalam mobilitas masyarakat dan pengelolaan kawasan.

Akses dari Hutan Desa menuju permukiman Desa Katimpun dapat ditempuh melalui jalur air. Berdasarkan dokumen RKPS, akses dari Hutan Desa ke Desa Katimpun dapat ditempuh sejauh sekitar 7 km dengan waktu sekitar 40 menit menggunakan perahu melalui Sungai Tantun dan DAM Beton. Alternatif lainnya melalui Anjir Tapisuk sejauh sekitar 18 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Akses menuju ibu kota kecamatan dan kabupaten juga perlu diperhitungkan karena berpengaruh terhadap pasar dan distribusi produk.

Tabel 2.5 Aksesibilitas Wilayah Katimpun dan Hutan Desa

No	Rute	Moda/Jalur	Jarak/Waktu Tempuh	Implikasi terhadap Pengembangan Usaha
1	Hutan Desa - Desa Katimpun melalui Sungai Tantun dan DAM Beton	Jalur air/perahu	±7 km; ±40 menit	Mendukung patroli, pengangkutan bahan, dan potensi wisata susur sungai/kanal.
2	Hutan Desa - Desa Katimpun melalui Anjir Tapisuk	Jalur air/kanal	±18 km; ±1 jam	Alternatif akses kawasan, tetapi memerlukan perhatian pada kondisi kanal dan tata air.
3	Desa Katimpun - Ibu Kota Kecamatan Mantangai	Jalur darat	±15 km; ±50 menit	Akses ke layanan kecamatan dan pasar awal.
4	Kecamatan Mantangai - Kota Kuala Kapuas	Jalur darat	±85 km; ±2,5 jam	Mempengaruhi biaya pemasaran produk dan kebutuhan pengolahan agar produk tahan simpan.

No	Rute	Moda/Jalur	Jarak/Waktu Tempuh	Implikasi terhadap Pengembangan Usaha
5	Desa Katimpun - Ibu Kota Provinsi	Jalur darat	±160 km; ±6 jam	Peluang pasar lebih luas membutuhkan pengemasan, kualitas, dan rantai distribusi yang lebih baik.

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034, diolah.

Kondisi akses yang relatif menantang menunjukkan bahwa pengembangan komoditas Hutan Desa Katimpun sebaiknya tidak hanya mengandalkan penjualan bahan mentah. Produk yang lebih tahan simpan dan memiliki nilai tambah, seperti kerajinan rotan, madu kemasan, produk olahan ikan, produk herbal, dan paket jasa lingkungan, lebih relevan dikembangkan dibandingkan produk segar yang sangat bergantung pada distribusi cepat.

2.6 Kondisi Biofisik Kawasan

Kondisi biofisik Hutan Desa Katimpun menunjukkan karakter kawasan rawa gambut dataran rendah. Secara umum, kawasan memiliki topografi datar, berada pada ketinggian rendah, dan didominasi tutupan belukar rawa serta rawa. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai. Komoditas dan usaha yang dikembangkan harus adaptif terhadap kondisi basah, tidak memerlukan drainase dalam, dan tidak merusak fungsi hidrologi gambut.

Tabel 2.6 Ringkasan Kondisi Biofisik Hutan Desa Katimpun

No	Komponen	Kondisi Umum	Implikasi Pengelolaan
1	Ekosistem utama	Rawa gambut dan lahan basah	Pengembangan usaha harus menjaga tata air dan menghindari pengeringan gambut.
2	Fungsi kawasan	Hutan Lindung	Pemanfaatan diarahkan pada HHBK, jasa lingkungan, dan kegiatan rendah dampak.
3	Topografi	Datar	Sesuai untuk paludikultur, perikanan rawa, dan rehabilitasi, tetapi rentan terhadap perubahan muka air.
4	Kemiringan lahan	0-8%	Seluruh kawasan termasuk kelas lereng datar.
5	Ketinggian	0-500 mdpl	Mencerminkan karakter dataran rendah rawa gambut.
6	Sistem hidrologi	Rawa, sungai, kanal, dan genangan gambut	Perlu pengelolaan tabat/sekat kanal dan pemantauan air.
7	Tutupan dominan	Belukar rawa	Membuka peluang pengayaan jenis lokal dan rehabilitasi gambut.

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034; Profil Desa Katimpun, diolah.

2.7 Topografi, Ketinggian, dan Kesesuaian Pemanfaatan

Berdasarkan data fisik wilayah, seluruh kawasan Hutan Desa Katimpun berada pada kelas lereng datar dengan kemiringan 0-8%. Tidak terdapat area yang masuk kategori landai, agak curam, curam, atau sangat curam. Kondisi ini memperkuat karakter Hutan Desa Katimpun sebagai kawasan rawa dataran rendah.

Tabel 2.7 Distribusi Kelas Lereng Hutan Desa Katimpun

No	Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
1	Datar	0-8	2.642	100	Mendominasi seluruh kawasan
2	Landai	9-15	-	-	Tidak tercatat
3	Agak curam	16-25	-	-	Tidak tercatat
4	Curam	26-40	-	-	Tidak tercatat
5	Sangat curam	>40	-	-	Tidak tercatat

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034.

Topografi datar mendukung kegiatan perikanan rawa, pembibitan tanaman gambut, budidaya rotan, madu kelulut, pengayaan vegetasi lokal, dan jasa lingkungan. Namun, kondisi datar pada ekosistem gambut juga menyebabkan air bergerak lambat dan sangat dipengaruhi oleh kanal, pasang-surut, serta musim. Karena itu, pemanfaatan kawasan harus menjaga tinggi muka air dan tidak memperbanyak drainase.

2.8 Ekosistem Gambut dan Hidrologi

Hutan Desa Katimpun berada dalam lanskap rawa gambut yang secara ekologis sangat penting. Gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, habitat keanekaragaman hayati, serta penyangga sumber penghidupan masyarakat. Di sisi lain, gambut sangat rentan terhadap gangguan. Pengeringan akibat kanal, penurunan muka air, pembakaran, dan pembukaan lahan dapat meningkatkan risiko kebakaran serta pelepasan emisi karbon.

Profil Desa Katimpun menjelaskan bahwa sistem hidrologi menentukan kelestarian lahan gambut. Lahan gambut di wilayah desa dipengaruhi oleh pasang surut air sungai dan keberadaan kanal eks Proyek Lahan Gambut. Oleh sebab itu, diperlukan tabat atau sekat kanal untuk menahan air agar gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar pada musim kemarau.

Tabel 2.8 Fungsi dan Kerentanan Ekosistem Gambut Hutan Desa Katimpun

Aspek	Fungsi/Potensi	Kerentanan	Arahan Pengelolaan
Tata air	Menahan dan mengatur air dalam lanskap rawa	Kanal dapat mempercepat pengeringan	Pemeliharaan tabat/sekat kanal dan pemantauan kondisi air
Karbon	Menyimpan karbon dalam tanah gambut dan vegetasi	Kebakaran dan pengeringan melepaskan karbon	Restorasi gambut dan rehabilitasi vegetasi lokal

Aspek	Fungsi/Potensi	Kerentanan	Arahan Pengelolaan
Biodiversitas	Habitat flora-fauna rawa gambut	Gangguan habitat dan kebakaran	Perlindungan habitat dan monitoring satwa/flora
Ekonomi masyarakat	Mendukung HHBK, perikanan, madu, dan jasa lingkungan	Pemanfaatan berlebihan dapat merusak daya dukung	Pengembangan usaha rendah dampak dan panen lestari

Sumber: Profil Desa Katimpun; RKPS LPHD Katimpun, diolah.

2.9 Tutupan Lahan dan Implikasi Pengelolaan

Tutupan lahan Hutan Desa Katimpun didominasi oleh belukar rawa seluas sekitar 2.453 hektare atau 92,85% dari luas kawasan. Selain itu terdapat rawa sekitar 180 hektare atau 6,81% dan lahan terbuka sekitar 9 hektare atau 0,34%. Komposisi ini menunjukkan bahwa kawasan masih memiliki fungsi lahan basah yang kuat dan berpeluang untuk pengayaan vegetasi, pemulihan tutupan, serta pengembangan komoditas adaptif gambut.

Tabel 2.9 Kondisi Tutupan Lahan Hutan Desa Katimpun

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Implikasi
1	Hutan primer	-	-	Tidak tercatat dalam data tutupan lahan RKPS.
2	Hutan sekunder	-	-	Tidak tercatat sebagai kelas utama dalam data RKPS.
3	Belukar rawa	2.453	92,85	Dominan; berpotensi untuk pengayaan vegetasi, rehabilitasi, rotan, madu, dan paludikultur.
4	Rawa	180	6,81	Mendukung perikanan rawa, tata air, dan habitat biodiversitas.
5	Lahan terbuka	9	0,34	Perlu dipulihkan melalui rehabilitasi dan pengayaan jenis lokal.
	Jumlah	2.642	100	

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034, diolah.

Dominasi belukar rawa tidak harus dipahami sebagai kelemahan semata. Dalam konteks rawa gambut, belukar rawa dapat menjadi area penting untuk pemulihan ekosistem, sumber HHBK tertentu, habitat satwa, dan lokasi pengembangan tanaman adaptif seperti rotan, belangeran, pulai, purun, tanaman obat, serta tanaman pakan lebah. Karena itu, strategi pengelolaan perlu menggabungkan rehabilitasi ekologis dan manfaat ekonomi masyarakat.

2.10 Vegetasi dan Flora Penting

Kondisi vegetasi Hutan Desa Katimpun mencerminkan karakter rawa gambut yang telah mengalami dinamika gangguan dan pemulihan. Data RKPS mencatat tumih sebagai pohon dominan pada belukar rawa, disertai jenis-jenis lain seperti belangeran, gemor, mipa, geronggang, hampoak, lampuda, manggis hutan, gantalang, tatumbu, tutup kabali, pulai, pantung, dan kambasira. Selain itu terdapat semak paku-pakuan seperti kelakai dan hawuk pada bagian lahan terbuka atau semak.

Tabel 2.10 Vegetasi Utama dan Relevansi Pengelolaan

No	Jenis Vegetasi	Keterangan/Fungsi	Arahan dalam Studi Potensi
1	Tumih	Jenis dominan pada belukar rawa	Indikator karakter vegetasi rawa; perlu dikaji untuk fungsi ekologis dan restorasi.
2	Belangeran	Jenis lokal gambut, adaptif pada lahan basah	Prioritas rehabilitasi, pengayaan, dan penyimpan karbon.
3	Gemor	Jenis hutan bernilai HHBK tertentu	Pemanfaatan harus sangat selektif dan berbasis budidaya/pengayaan.
4	Pulai	Vegetasi rawa dan lahan basah	Pengayaan kawasan dan rehabilitasi.
5	Rotan	HHBK utama dan bahan baku kerajinan	Komoditas prioritas KUPS dan pengembangan usaha.
6	Kelakai/hawuk	Paku-pakuan rawa	Pangan lokal, penutup tanah, dan indikator lahan basah.
7	Purun	Tanaman rawa bahan anyaman	Potensi kerajinan, terutama kelompok perempuan.
8	Kantong semar dan anggrek rawa	Flora khas gambut dan bernilai estetika	Potensi edukasi, ekowisata, dan budidaya legal.

Sumber: RKPS LPHD Katimpun; Hasil Studi Potensi HD Katimpun, diolah.

Jenis-jenis bernilai konservasi tidak diarahkan untuk pemanfaatan ekstraktif. Sebaliknya, jenis tersebut perlu ditempatkan sebagai dasar penguatan restorasi, jasa lingkungan, pendidikan konservasi, dan potensi ekowisata. Komoditas usaha yang lebih aman dikembangkan adalah jenis yang dapat dibudidayakan, dipanen secara lestari, atau tidak merusak struktur ekosistem.

2.11 Fauna dan Keanekaragaman Hayati

Hutan Desa Katimpun dan lanskap sekitarnya merupakan habitat bagi berbagai jenis fauna rawa gambut, hutan sekunder, sungai, dan lahan basah. Keberadaan satwa seperti orangutan Kalimantan, beruang madu, kijang, monyet ekor panjang, enggang/rangkong, buaya, biawak, serta berbagai jenis ikan rawa menunjukkan bahwa kawasan memiliki nilai biodiversitas yang penting. Keberadaan fauna ini harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi dan bentuk kegiatan usaha.

Tabel 2.11 Fauna Penting dan Relevansi Pengelolaan

No	Kelompok	Jenis	Nilai Penting	Implikasi Pengelolaan
1	Mamalia	Orangutan Kalimantan	Satwa konservasi dan ikon lanskap gambut	Perlindungan habitat, edukasi, dan jasa lingkungan.
2	Mamalia	Beruang madu	Satwa dilindungi dan indikator hutan	Pengurangan gangguan habitat dan konflik.
3	Mamalia	Kijang	Satwa hutan sekunder	Indikator keberadaan habitat dan sumber pakan.
4	Burung	Enggang/rangkong	Penyebar biji dan indikator kanopi	Perlindungan pohon besar dan koridor habitat.
5	Reptil	Buaya/biawak/ular	Komponen ekosistem sungai dan rawa	Pengelolaan keselamatan dan perlindungan habitat.
6	Ikan	Haruan/gabus	Komoditas perikanan lokal	Pengelolaan tangkap lestari dan pengolahan nilai tambah.
7	Ikan	Betok/papuyu	Ikan rawa bernilai konsumsi	Pengembangan perikanan rawa dan budidaya lokal.
8	Ikan	Baung/tapah/udang galah	Komoditas bernilai ekonomi	Perlu pengaturan habitat dan alat tangkap.

Sumber: Profil Desa Katimpun; dokumen pendukung keanekaragaman hayati, diolah.

Keanekaragaman hayati memberi peluang bagi pengembangan jasa lingkungan, pendidikan gambut, riset, dan ekowisata berbasis masyarakat. Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan secara terbatas dan berbasis daya dukung agar tidak menimbulkan gangguan terhadap satwa liar dan habitat sensitif.

2.12 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Katimpun memiliki hubungan erat dengan sungai, rawa, hutan, dan kebun. Sumber penghidupan masyarakat terkait dengan petani/pekebun, nelayan tangkap, petani rotan, pembudidaya madu kelulut, pembibitan, perdagangan kecil, dan pekerjaan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan Hutan Desa perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal, bukan sekadar kegiatan konservasi.

Data demografi dalam dokumen sumber menunjukkan jumlah penduduk sekitar 827 jiwa dengan komposisi 442 laki-laki dan 385 perempuan. Jumlah kepala keluarga tercatat berbeda pada beberapa dokumen; RKPS mencantumkan 254 KK, sedangkan profil desa tahun 2021 mencatat 263 KK. Perbedaan ini perlu diverifikasi dalam pembaruan data desa, namun tidak mengubah gambaran umum bahwa Desa Katimpun merupakan desa dengan jumlah penduduk relatif kecil sehingga pengembangan usaha perlu dirancang realistis, bertahap, dan berbasis kelompok.

Tabel 2.12 Kondisi Demografi Desa Katimpun

No	Uraian	Jumlah	Catatan
1	Jumlah penduduk	827 jiwa	Data konsisten pada dokumen profil dan RKPS.
2	Laki-laki	442 jiwa	-
3	Perempuan	385 jiwa	-
4	Anak <15 tahun	144 jiwa	Kelompok usia muda yang perlu diperhatikan dalam pendidikan dan regenerasi.
5	Usia produktif 15-65 tahun	363 jiwa	Potensi tenaga kerja untuk usaha KUPS dan kegiatan rehabilitasi.
6	Usia >65 tahun	32 jiwa	Kelompok tidak produktif yang tetap menjadi bagian penerima manfaat sosial.
7	Jumlah KK	254-263 KK	Perlu verifikasi data terbaru; RKPS mencantumkan 254 KK, profil desa mencatat 263 KK.

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034; Profil Desa Katimpun 2021/2022, diolah.

Tabel 2.13 Mata Pencapaian dan Keterkaitan dengan Pengembangan Hutan Desa

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah/Indikasi	Keterkaitan dengan Studi Potensi
1	Petani/pekebun	±345 orang	Agroforestri, tanaman buah, karet, rotan, dan tanaman lokal.
2	Pembibitan	±130 orang	Peluang pembibitan tanaman gambut dan rehabilitasi kawasan.
3	Petani rotan	±34 orang	Bahan baku rotan dan budidaya rotan.
4	Nelayan tangkap	±25 orang	Perikanan rawa, pengolahan ikan, dan wisata perairan.
5	Buruh pabrik	±23 orang	Alternatif pendapatan; kebutuhan diversifikasi ekonomi desa.
6	Pedagang sembako	±17 orang	Saluran distribusi lokal dan pemasaran awal produk desa.
7	Budidaya madu kelulut	±13 orang	Pengembangan madu sebagai HHBK bernilai tambah.
8	Honorar	±7 orang	Sumber daya pendukung administrasi, pendidikan, dan kelembagaan.

Sumber: RKPS LPHD Katimpun Periode 2025-2034, diolah.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Katimpun telah memiliki basis keterampilan dan pengalaman yang relevan dengan pengembangan Hutan Desa, terutama pada rotan, perikanan, madu, pembibitan, dan usaha kecil. Namun, kapasitas produksi, pengolahan, pencatatan usaha, dan akses pasar masih perlu diperkuat agar potensi tersebut dapat menjadi usaha yang berkelanjutan.

2.13 Sarana, Prasarana, dan Kondisi Pendukung Desa

Kondisi sarana dan prasarana desa berpengaruh terhadap pengembangan potensi Hutan Desa. Fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, pasar, air bersih, komunikasi, dan transportasi menjadi faktor pendukung maupun pembatas bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Profil Desa Katimpun mencatat keberadaan fasilitas pendidikan dasar, fasilitas kesehatan seperti Poskesdes, Posyandu, dan Pustu, serta pasar desa yang beroperasi secara berkala. Di sisi lain, akses listrik, air bersih, dan telekomunikasi pernah menjadi tantangan, meskipun terdapat perkembangan jaringan setelah pembangunan tower pemancar di Desa Sei Ahas.

Tabel 2.14 Sarana Prasarana Utama dan Implikasinya terhadap Pengembangan Usaha

No	Sarana/Prasarana	Kondisi Umum	Implikasi terhadap Studi Potensi
1	Pendidikan	Tersedia PAUD/TK, SD, dan SMP satu atap dalam perkembangan	Mendukung pendidikan dasar dan regenerasi pelaku usaha lokal.
2	Kesehatan	Tersedia Poskesdes, Pustu, dan Posyandu	Mendukung ketahanan masyarakat dan kegiatan lapangan.
3	Pasar desa	Pasar beroperasi berkala/mingguan	Menjadi pasar awal produk lokal, tetapi pasar lebih luas tetap perlu dibangun.
4	Air bersih	Masih menjadi tantangan; sebagian masyarakat bergantung pada air sungai dan pembelian air	Kegiatan pengolahan pangan/madu/ikan memerlukan standar higienitas lebih baik.
5	Penerangan/listrik	Belum sepenuhnya stabil; penggunaan panel surya/aki/genset pada sebagian kondisi	Produksi dan pengolahan perlu mempertimbangkan energi alternatif.
6	Telekomunikasi	Akses membaik setelah pembangunan tower di Desa Sei Ahas	Membuka peluang pemasaran digital dan koordinasi kelembagaan.
7	Transportasi	Jalur air dan darat terbatas	Mendorong pengembangan produk tahan simpan dan bernilai tambah.

Sumber: Profil Desa Katimpun; RKPS LPHD Katimpun, diolah.

2.14 Kelembagaan Pengelola Hutan Desa

Kelembagaan merupakan faktor kunci dalam pengelolaan Hutan Desa Katimpun. LPHD Katimpun berperan sebagai lembaga pengelola kawasan, sedangkan KUPS menjadi unit usaha masyarakat yang mengelola komoditas tertentu. Keberadaan LPHD dan KUPS menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki dasar organisasi untuk mengembangkan perhutanan sosial, tetapi kapasitas kelembagaan perlu terus diperkuat agar mampu mengelola kawasan dan usaha secara profesional.

Tabel 2.15 Kelembagaan Utama Pengelolaan Hutan Desa Katimpun

No	Lembaga/Kelompok	Fokus Peran	Kebutuhan Penguatan
1	LPHD Katimpun	Pengelola kawasan Hutan Desa, koordinasi perlindungan, pemanfaatan, dan kerja sama	Administrasi, pelaporan, rencana usaha, tata kelola manfaat, dan kemitraan.
2	KUPS Pengrajin Rotan 'Dare Jawet Katimpun'	Produksi dan pengembangan kerajinan rotan	Desain produk, alat produksi, rumah produksi, pembukuan, dan pasar.
3	KUPS Budidaya Lebah Madu 'Sari Madu Lebah'	Budidaya lebah dan produksi madu	Teknik budidaya, panen higienis, kemasan, branding, dan pemasaran.
4	KUPS Perikanan 'Harapan Jadi'	Pemanfaatan dan pengembangan perikanan rawa/perairan umum	Budidaya, pengolahan ikan, pengelolaan stok, dan akses pasar.
5	Pemerintah Desa Katimpun	Dukungan kebijakan dan integrasi program desa	Sinkronisasi rencana desa dengan rencana kelola Hutan Desa.
6	KPHL Kapuas Kahayan	Pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan hutan	Koordinasi rutin, pendampingan teknis, dan fasilitasi program.

Sumber: Hasil Studi Potensi HD Katimpun; RKPS LPHD Katimpun, diolah.

Pengembangan Hutan Desa Katimpun akan lebih kuat apabila LPHD diposisikan sebagai payung pengelolaan kawasan, sementara KUPS menjadi pelaksana usaha. Pembagian peran yang jelas akan memudahkan penataan produksi, pembagian manfaat, pelaporan, dan pembangunan kerja sama dengan pemerintah, mitra konservasi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

2.15 Potensi Awal Pengembangan Hutan Desa

Berdasarkan kondisi kawasan, sosial ekonomi, dan kelembagaan, terdapat beberapa potensi awal yang dapat menjadi dasar pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun. Potensi tersebut mencakup hasil hutan bukan kayu, perikanan, tanaman adaptif gambut, jasa lingkungan, serta kegiatan konservasi berbasis masyarakat.

Tabel 2.16 Potensi Awal dan Keterkaitannya dengan Pengembangan Usaha

No	Potensi	Kondisi Awal	Peluang	Pengembangan
1	Rotan	Tersedia sebagai HHBK dan telah dikelola KUPS	Kerajinan, bahan baku, budidaya rotan	Menjadi komoditas prioritas pengembangan usaha.
2	Madu kelulut/madu hutan	Ada pelaku budidaya dan KUPS	Madu kemasan, produk turunan, branding konservasi	Perlu strategi produksi, mutu, dan pemasaran.
3	Perikanan rawa	Masyarakat memiliki pengalaman menangkap ikan	Budidaya, ikan olahan, wisata perairan	Perlu pengaturan stok dan alat tangkap.
4	Tanaman obat	Pengetahuan lokal dan jenis lokal tersedia	Simplisia, produk herbal, kebun tanaman obat	Perlu budidaya dan legalitas produk.
5	Tanaman hias	Kantong semar dan anggrek bernilai konservasi	Budidaya legal dan wisata edukasi	Perlu kerja sama dengan lembaga konservasi.
6	Pembibitan tanaman gambut	Ada rencana pengayaan dan rehabilitasi	Bibit belangeran, pulai, rotan, tanaman lokal	Mendukung restorasi dan ekonomi hijau.
7	Jasa lingkungan	Gambut, biodiversitas, karbon, tata air	Ekowisata, edukasi, karbon jangka panjang	Perlu data baseline, kelembagaan, dan kemitraan.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan RKPS dan Profil Desa

2.16 Riwayat Kebakaran dan Kerawanan Kawasan

Salah satu isu strategis dalam pengelolaan Hutan Desa Katimpun adalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Riwayat kebakaran menunjukkan bahwa kawasan dan lanskap sekitarnya pernah mengalami kebakaran besar, terutama pada periode 2015-2019. Kebakaran tidak hanya merusak tutupan vegetasi dan sumber daya hutan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, transportasi, pendidikan, ibadah, pekerjaan, serta kebun masyarakat.

Tabel 2.17 Riwayat Kebakaran Hutan dan Lahan di Lanskap Hutan Desa Katimpun

Tahun	Lokasi/Kejadian	Perkiraan Luas	Penyebab/Keterangan	Dampak Utama
2015	Blok B (belakang desa/barat Sungai Kapuas)	±2.000 ha	Api rambatan dan aktivitas manusia	Kabut asap, gangguan kesehatan, transportasi, kegiatan masyarakat, dan kebun terbakar.

Tahun	Lokasi/Kejadian	Perkiraan Luas	Penyebab/Keterangan	Dampak Utama
2015	Blok A (seberang desa)	±1.200 ha	Api rambatan dan aktivitas manusia	Kebakaran berlangsung lama dan sulit ditangani.
2016	Blok A perbatasan Katimpun-Mantangai Hulu	±200 ha	Api rambatan	Jauh dari desa, penanganan terbatas.
2017	Blok A perbatasan desa	±250 ha	Rambatan dari desa tetangga	Kebun warga terbakar dan gangguan asap.
2018	Tidak ada kejadian besar	-	Didukung pembasahan gambut dan himbauan larangan membakar	Menunjukkan pentingnya pencegahan dan pembasahan lahan.
2019	Blok A dan Blok B	±200 ha dan ±1.000 ha	Api rambatan dari arah luar dan perkebunan	Aktivitas masyarakat terganggu, pemadaman oleh MPA/masyarakat.
2020-2021	Tidak terjadi kebakaran besar	-	Upaya pencegahan dan patroli	Perlu dipertahankan melalui sistem pencegahan rutin.

Sumber: Laporan Proses Sosialisasi dan Lokakarya Manajemen Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan LPHD Katimpun, diolah.

Riwayat tersebut menegaskan bahwa pengembangan potensi Hutan Desa harus disertai dengan sistem perlindungan kawasan. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan tidak boleh meningkatkan risiko kebakaran, misalnya melalui pembukaan lahan kering, penggunaan api, atau pembuatan kanal baru. Sebaliknya, usaha yang mendukung gambut tetap basah, seperti perikanan rawa, paludikultur, pembibitan, madu, dan jasa lingkungan, perlu diprioritaskan.

2.17 Isu Strategis Wilayah dan Implikasi terhadap Studi Potensi

Berdasarkan gambaran umum wilayah, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi dasar dalam penyusunan analisis potensi dan rekomendasi pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun.

Tabel 2.18 Isu Strategis dan Implikasi Pengembangan Hutan Desa Katimpun

No	Isu Strategis	Implikasi	Arah Tindak Lanjut
1	Status kawasan Hutan Lindung	Pemanfaatan tidak boleh merusak fungsi lindung	Prioritas pada HHBK, jasa lingkungan, rehabilitasi, dan edukasi.
2	Dominasi ekosistem rawa gambut	Sangat tergantung pada tata air dan rawan kebakaran	Pemeliharaan sekat kanal, pembasahan gambut, dan paludikultur.

No	Isu Strategis	Implikasi	Arah Tindak Lanjut
3	Tutupan belukar rawa dominan	Mebutuhkan pengayaan dan rehabilitasi	Penanaman jenis lokal dan pengembangan komoditas adaptif gambut.
4	Ketersediaan HHBK	Potensi ekonomi masyarakat cukup besar	Penguatan rotan, madu, tanaman obat, dan tanaman hias legal.
5	Ketergantungan masyarakat pada SDA	Usaha harus berbasis kapasitas lokal	Pelatihan, pendampingan, dan penguatan KUPS.
6	Akses pasar terbatas	Produk mentah bernilai rendah dan biaya angkut tinggi	Pengolahan, pengemasan, branding, dan pemasaran kolektif.
7	Kelembagaan sudah terbentuk tetapi perlu diperkuat	LPHD dan KUPS memerlukan sistem administrasi dan bisnis	AD/ART, SOP, pembukuan, rencana usaha, dan kemitraan.
8	Kerawanan karhutla	Ancaman terhadap ekonomi, ekologi, dan kesehatan	Patroli, edukasi, peralatan, dan kerja sama pencegahan karhutla.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan dokumen RKPS, Profil Desa, dan laporan karhutla.

Hutan Desa Katimpun merupakan kawasan Hutan Lindung rawa gambut seluas sekitar 2.642 hektare yang dikelola oleh LPHD Katimpun melalui skema Perhutanan Sosial. Secara ekologis, kawasan ini penting sebagai bagian dari lanskap rawa gambut Kapuas-Mantangai yang berfungsi menjaga tata air, menyimpan karbon, menyediakan habitat flora-fauna, dan mendukung kehidupan masyarakat.

Kondisi biofisik kawasan didominasi topografi datar, belukar rawa, rawa, dan lahan terbuka yang relatif kecil. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan hasil hutan bukan kayu, pembibitan tanaman gambut, paludikultur, perikanan rawa, madu kelulut, kerajinan rotan, tanaman obat, tanaman hias legal, dan jasa lingkungan. Namun, karakter gambut yang rentan terhadap pengeringan dan kebakaran menuntut pendekatan pengelolaan yang hati-hati.

Dari aspek sosial ekonomi, masyarakat Katimpun memiliki hubungan kuat dengan hutan, sungai, rawa, dan kebun. Mata pencaharian masyarakat seperti petani, petani rotan, nelayan, pembudidaya madu, pembibitan, dan perdagangan kecil menunjukkan adanya basis ekonomi lokal yang relevan dengan pengembangan Hutan Desa. Keberadaan LPHD dan KUPS menjadi modal kelembagaan penting, tetapi masih membutuhkan penguatan administrasi, manajemen usaha, pencatatan, kapasitas produksi, pemasaran, dan kemitraan.

BAB III METODOLOGI STUDI

Bab ini menjelaskan pendekatan, jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis, tahapan pelaksanaan, serta batasan studi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Studi Potensi Hutan Desa Katimpun. Penyusunan metodologi dibuat agar selaras dengan Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Wilayah Studi, Bab IV Hasil Identifikasi Potensi dan Peluang Usaha, Bab V Prioritas Pengembangan Usaha, serta Bab VI Rekomendasi dan Tindak Lanjut.

Metodologi dalam laporan ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai potensi Hutan Desa Katimpun, baik dari sisi kawasan, sumber daya alam, sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan LPHD dan KUPS, peluang usaha, risiko ekologis, maupun kebutuhan tindak lanjut. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat inventarisasi komoditas, tetapi juga menjadi dasar perencanaan pengembangan usaha perhutanan sosial yang produktif, legal, lestari, dan mudah ditindaklanjuti.

3.1 Pendekatan Studi

Studi Potensi Hutan Desa Katimpun menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, partisipatif, dan analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kawasan, masyarakat, kelembagaan, dan potensi usaha berdasarkan data dokumen dan informasi lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengetahuan lokal, pengalaman masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta persepsi para pihak mengenai peluang dan kendala pengembangan usaha. Pendekatan partisipatif digunakan karena pengelolaan Hutan Desa menempatkan masyarakat, LPHD, dan KUPS sebagai pelaku utama.

Dalam pelaksanaannya, studi ini juga menggunakan pendekatan kehati-hatian ekologis karena Hutan Desa Katimpun berada pada kawasan Hutan Lindung rawa gambut. Setiap potensi usaha dinilai tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kesesuaian dengan fungsi kawasan, risiko terhadap tata air gambut, risiko kebakaran hutan dan lahan, serta keberlanjutan sumber daya. Pendekatan ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak mendorong pemanfaatan yang merusak kawasan.

Tabel 3.1 Pendekatan yang Digunakan dalam Studi

Pendekatan	Uraian
Deskriptif-kualitatif	Menggambarkan kondisi kawasan, potensi sumber daya, sosial ekonomi, dan kelembagaan berdasarkan data dokumen dan informasi lapangan.
Partisipatif	Melibatkan LPHD, KUPS, masyarakat, pemerintah desa, KPHL, dan mitra sebagai sumber informasi dan pelaku pengelolaan.
Analisis potensi usaha	Menilai peluang usaha berdasarkan ketersediaan sumber daya, kesiapan pelaku, pasar, dan nilai tambah.

Kehati-hatian ekologis	Menilai kesesuaian usaha dengan fungsi Hutan Lindung, ekosistem gambut, tata air, dan risiko karhutla.
Berorientasi tindak lanjut	Mengarahkan hasil studi menjadi strategi, program, kemitraan, dan monitoring.

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

3.2 Lokasi, Objek, dan Unit Analisis Studi

Lokasi studi adalah Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fokus pada Hutan Desa Katimpun yang dikelola oleh LPHD Katimpun. Kawasan ini memiliki luas sekitar 2.642 ha dan berada pada fungsi Hutan Lindung. Dengan karakter tersebut, objek studi tidak hanya berupa kawasan hutan, tetapi juga mencakup masyarakat, kelembagaan, komoditas, usaha pendukung, serta peluang kerja sama para pihak.

Unit analisis dalam studi ini dibuat berlapis agar hasil kajian mampu menjelaskan hubungan antara kondisi kawasan dan pengembangan usaha. Pada tingkat kawasan, analisis difokuskan pada legalitas, fungsi hutan, biofisik, tutupan lahan, gambut, dan risiko kebakaran. Pada tingkat sosial, analisis difokuskan pada mata pencaharian, keterampilan, peran perempuan dan pemuda, serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan dan lahan basah. Pada tingkat kelembagaan, analisis difokuskan pada LPHD dan KUPS. Pada tingkat usaha, analisis difokuskan pada komoditas HHBK, perikanan, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, serta usaha pendukung off-farm seperti ayam petelur dan pakan berbasis jagung.

Tabel 3.2 Lokasi, Objek, dan Unit Analisis Studi

Unit Analisis	Fokus Kajian
Kawasan Hutan Desa	Legalitas, fungsi Hutan Lindung, biofisik, tutupan lahan, gambut, tata air, risiko karhutla.
Masyarakat Desa Katimpun	Mata pencaharian, keterampilan, pengalaman usaha, peran perempuan dan pemuda, kebutuhan ekonomi.
LPHD dan KUPS	Struktur, peran, kapasitas administrasi, rencana usaha, pembukuan, kemitraan.
Komoditas dan peluang usaha	Rotan, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry, jasa lingkungan, ekowisata.
Usaha pendukung off-farm	Ayam petelur, pakan ternak berbasis jagung, dan usaha rumah tangga yang tidak menekan kawasan hutan.
Para pihak/mitra	KPHL, pemerintah desa, dinas teknis, BPSKL, mitra konservasi, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga pendanaan.

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penggalan informasi langsung dari masyarakat, pengurus LPHD, KUPS, pemerintah desa, pelaku usaha, dan pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan, dokumen legal, laporan kegiatan, profil desa, data RKPS, serta dokumen pendukung yang relevan.

Penggunaan dua jenis data tersebut diperlukan agar hasil studi tidak hanya bergantung pada dokumen formal, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, informasi lapangan juga diperkuat melalui dokumen resmi agar analisis lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.3 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis Data	Data yang Dikumpulkan	Sumber Data
Legal dan administrasi	SK Hutan Desa, status kawasan, fungsi hutan, luas areal, dasar hukum perhutanan sosial.	RKPS, dokumen legal LPHD, KPHL, pemerintah desa.
Biofisik kawasan	Topografi, tutupan lahan, gambut, hidrologi, rawa, kanal, potensi kebakaran.	RKPS, profil desa, laporan karhutla, observasi lapangan.
Potensi komoditas	Rotan, madu, perikanan, tanaman obat, tanaman hias, jamur, pembibitan, agroforestry, jasa lingkungan.	RKPS, hasil studi awal, wawancara, FGD, observasi.
Sosial ekonomi	Mata pencaharian, jumlah pelaku, keterampilan, minat usaha, peran perempuan/pemuda.	Profil desa, wawancara, FGD, data KUPS.
Kelembagaan	Struktur LPHD/KUPS, rencana kerja, kapasitas administrasi, pembukuan, kemitraan.	Dokumen LPHD/KUPS, wawancara pengurus, FGD.
Pasar dan rantai nilai	Bentuk produk, harga indikatif, saluran pemasaran, peluang nilai tambah, kendala mutu.	Wawancara, data rencana usaha, pasar lokal, pelaku usaha.
Risiko dan keberlanjutan	Karhutla, pengeringan gambut, overharvest, konflik akses, regulasi, fluktuasi pasar.	Laporan karhutla, RKPS, FGD, analisis penyusun.

Usaha pendukung off-farm	Ayam petelur, ayam kampung, jagung untuk bahan pakan, kebutuhan kandang, pasar telur.	Wawancara, analisis kebutuhan ekonomi lokal, rencana usaha pendukung.
--------------------------	---	---

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi telaah dokumen, wawancara, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, dokumentasi, dan verifikasi informasi. Metode tersebut digunakan secara saling melengkapi agar setiap temuan dapat diperiksa dari lebih dari satu sumber.

3.4.1 Telaah Dokumen

Telaah dokumen dilakukan untuk memahami dasar legal, rencana pengelolaan, kondisi kawasan, potensi sumber daya, kelembagaan, serta program yang telah atau akan dijalankan. Dokumen yang ditelaah meliputi RKPS LPHD Katimpun 2025-2034, profil desa, laporan karhutla, dokumen kelembagaan LPHD/KUPS, dan dokumen hasil studi potensi sebelumnya. Telaah dokumen juga digunakan untuk menelusuri angka-angka indikatif seperti luas kawasan, tutupan lahan, rencana komoditas, rencana produksi, dan kebutuhan program.

3.4.2 Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan kepada narasumber kunci yang memahami kondisi Hutan Desa Katimpun dan usaha masyarakat. Narasumber dapat meliputi pengurus LPHD, pengurus KUPS Rotan, KUPS Madu, KUPS Perikanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, perempuan pengrajin, nelayan, petani, pemuda, pendamping, KPHL, dan mitra terkait. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai sejarah pemanfaatan kawasan, potensi komoditas, kendala usaha, kebutuhan pendampingan, dan peluang kerja sama.

3.4.3 Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

FGD digunakan untuk memperoleh informasi kolektif mengenai potensi dan prioritas pengembangan usaha. FGD penting karena data potensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman, kesepakatan, dan persepsi masyarakat. Melalui FGD, informasi mengenai rotan, madu, perikanan, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry, jasa lingkungan, ayam petelur, dan pakan jagung dapat dibahas secara bersama sehingga menghasilkan gambaran yang lebih realistis.

3.4.4 Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat kondisi aktual kawasan, lokasi usaha, aksesibilitas, sarana produksi, aktivitas KUPS, serta titik-titik yang relevan dengan potensi usaha. Observasi diarahkan pada kondisi biofisik, vegetasi, rawa, kanal, lokasi pemanfaatan HHBK, lokasi kerajinan rotan, lokasi madu, perairan, dan ruang usaha pendukung di sekitar permukiman. Observasi juga digunakan untuk mengidentifikasi risiko seperti kebakaran, akses yang sulit, dan keterbatasan sarana pengolahan.

3.4.5 Pemetaan Partisipatif dan Dokumentasi

Pemetaan partisipatif digunakan untuk menggambarkan secara awal lokasi sumber daya, akses, area pemanfaatan, area perlindungan, lokasi rawan kebakaran, serta potensi jalur ekowisata. Dokumentasi dilakukan melalui foto, catatan lapangan, daftar hadir, dan catatan hasil

diskusi. Metode ini membantu mengubah informasi lisan menjadi data yang lebih mudah diverifikasi dan digunakan dalam perencanaan.

3.4.6 Penelusuran Pasar Awal

Penelusuran pasar awal dilakukan untuk melihat peluang produk, bentuk produk yang diminati, harga indikatif, pembeli potensial, kendala pemasaran, dan peluang nilai tambah. Penelusuran ini terutama relevan untuk rotan, madu kelulut, ikan olahan, tanaman obat, tanaman hias, bibit tanaman gambut, telur ayam, dan pakan ternak berbasis jagung. Karena sifatnya awal, hasil penelusuran pasar digunakan sebagai indikasi, bukan sebagai analisis kelayakan finansial final.

Tabel 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode	Informasi yang Digali
Telaah dokumen	Legalitas, RKPS, potensi komoditas, rencana kegiatan, kelembagaan, riwayat karhutla.
Wawancara mendalam	Pengalaman pengelolaan, potensi lokal, kendala, kebutuhan usaha, pandangan pelaku.
FGD	Validasi potensi, prioritas masyarakat, masalah bersama, peluang kerja sama.
Observasi lapangan	Kondisi kawasan, lokasi potensi, akses, sarana produksi, risiko ekologis.
Pemetaan partisipatif	Lokasi potensi, area rawan, jalur akses, ruang pemanfaatan, ruang perlindungan.
Penelusuran pasar awal	Harga, pembeli, bentuk produk, standar mutu, peluang pemasaran.

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

3.5 Aspek dan Indikator Kajian

Agar analisis berjalan terarah, setiap aspek studi diturunkan ke dalam indikator kajian. Indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa Bab IV tidak hanya memuat daftar potensi, tetapi juga menjelaskan kesiapan pengembangan dan risiko yang harus diperhatikan. Indikator tersebut juga menjadi dasar dalam Bab V untuk menentukan prioritas dan Bab VI untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut.

Tabel 3.5 Aspek dan Indikator Kajian

Aspek Kajian	Indikator Utama
Legalitas dan fungsi kawasan	Status Hutan Desa, fungsi Hutan Lindung, ruang pemanfaatan/perlindungan, kesesuaian dengan perhutanan sosial.

Ekologi gambut	Tutupan lahan, tata air, rawa, kanal, risiko kebakaran, kebutuhan tabat dan rehabilitasi.
Potensi HHBK	Ketersediaan rotan, madu, tanaman obat, tanaman hias, jamur, dan komoditas lain.
Perikanan dan lahan basah	Jenis ikan, lokasi tangkap/budidaya, alat tangkap, musim, potensi pengolahan.
Pembibitan dan agroforestry/paludikultur	Jenis lokal, kebutuhan bibit, lokasi tanam, pemeliharaan, potensi hasil jangka menengah.
Usaha pendukung off-farm	Ayam petelur, ayam kampung, jagung untuk pakan, kandang, pasar telur, risiko pakan.
Kelembagaan	LPHD, KUPS, struktur, rencana kerja, pembukuan, koordinasi, kemitraan.
Pasar dan nilai tambah	Bentuk produk, harga, pembeli, kemasan, branding, pemasaran digital, rantai nilai.
Kemitraan	Peran KPHL, pemerintah desa, dinas, BPSKL, NGO, kampus, swasta, offtaker.

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan dukungan matriks dan skoring sederhana. Analisis digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: potensi apa yang tersedia, potensi mana yang paling layak dikembangkan, dan dukungan apa yang diperlukan agar potensi tersebut menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan.

3.6.1 Analisis Legal dan Kesesuaian Fungsi Kawasan

Analisis legal dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi usaha sesuai dengan status Hutan Desa Katimpun sebagai Hutan Lindung. Usaha yang berisiko membuka hutan, mengeringkan gambut, menebang kayu, atau mengganggu ruang perlindungan tidak direkomendasikan sebagai prioritas. Kegiatan yang lebih sesuai adalah HHBK, jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan yang tidak merusak, pembibitan, agroforestry/paludikultur, dan usaha off-farm yang tidak menekan kawasan.

3.6.2 Analisis Biofisik dan Risiko Gambut

Analisis biofisik digunakan untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan kondisi rawa gambut. Aspek yang dianalisis meliputi topografi, tutupan lahan, rawa, kanal, tata air, vegetasi, dan riwayat karhutla. Analisis ini penting untuk menempatkan perlindungan kawasan sebagai dasar pengembangan usaha.

3.6.3 Analisis Potensi Komoditas dan Peluang Usaha

Analisis potensi komoditas dilakukan terhadap rotan, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, jamur hutan, pembibitan, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, ekowisata, ayam petelur, dan pakan jagung. Setiap komoditas dianalisis berdasarkan ketersediaan sumber daya, pelaku utama, bentuk produk, peluang pasar, nilai tambah, risiko, dan kebutuhan penguatan.

3.6.4 Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat

Analisis sosial ekonomi digunakan untuk memahami hubungan masyarakat dengan kawasan dan peluang usaha. Aspek yang dinilai meliputi mata pencaharian, pengalaman usaha, keterampilan, peran perempuan dan pemuda, kebutuhan pendapatan, serta kesiapan rumah tangga dalam menjalankan usaha jangka pendek dan menengah.

3.6.5 Analisis Kelembagaan LPHD dan KUPS

Analisis kelembagaan dilakukan untuk menilai kesiapan LPHD dan KUPS sebagai pengelola kawasan dan penggerak usaha. Aspek yang dianalisis meliputi struktur organisasi, administrasi, pembukuan, pembagian peran, koordinasi, rencana kerja, SOP, dan kemampuan membangun kemitraan.

3.6.6 Analisis Pasar dan Rantai Nilai

Analisis pasar dan rantai nilai digunakan untuk melihat posisi produk dari hulu sampai hilir. Analisis ini mencakup bahan baku, produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran, pembeli, dan pembagian manfaat. Tujuannya adalah mengidentifikasi titik nilai tambah agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah.

3.6.7 Analisis SWOT dan Prioritas

Analisis SWOT digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman setiap kelompok usaha. Hasil SWOT digunakan bersama kriteria prioritas untuk menentukan usaha jangka pendek, menengah, dan panjang pada Bab V.

3.6.8 Analisis Kemitraan dan Tindak Lanjut

Analisis kemitraan dilakukan untuk mengidentifikasi para pihak yang dapat mendukung pengembangan usaha, perlindungan kawasan, pembiayaan, pemasaran, riset, dan monitoring. Hasil analisis ini menjadi dasar rekomendasi dan matriks tindak lanjut pada Bab VI.

Tabel 3.6 Metode Analisis Data

Jenis Analisis	Fokus Analisis	Keluaran
Analisis legal	Kesesuaian usaha dengan Hutan Lindung dan perhutanan sosial.	Batasan dan arahan pemanfaatan yang aman secara hukum.
Analisis biofisik	Gambut, tutupan lahan, tata air, risiko kebakaran, habitat.	Kriteria ekologis dan mitigasi risiko.

Analisis komoditas	Ketersediaan, bentuk produk, pelaku, kendala, peluang pasar.	Daftar potensi dan peluang usaha.
Analisis sosial ekonomi	Mata pencaharian, kapasitas, minat, peran kelompok masyarakat.	Kesiapan pelaku dan kebutuhan pemberdayaan.
Analisis kelembagaan	LPHD/KUPS, administrasi, pembukuan, koordinasi, SOP.	Kebutuhan penguatan kelembagaan.
Analisis pasar/rantai nilai	Hulu-hilir, nilai tambah, saluran pemasaran, standar mutu.	Strategi peningkatan nilai produk dan pasar.
Analisis SWOT	Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman.	Dasar penentuan strategi dan prioritas.
Analisis kemitraan	Peran para pihak dan peluang kerja sama.	Matriks rekomendasi dan tindak lanjut.

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

3.7 Kriteria Penilaian Prioritas Pengembangan Usaha

Untuk menentukan prioritas pengembangan usaha, studi ini menggunakan penilaian multi-kriteria secara sederhana. Penilaian ini tidak dimaksudkan sebagai studi kelayakan finansial penuh, tetapi sebagai alat bantu untuk mengurutkan komoditas berdasarkan kesiapan dan kelayakan awal. Skala penilaian dapat menggunakan nilai 1 sampai 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Hasil penilaian kemudian digunakan sebagai dasar pengelompokan prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang.

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Prioritas Usaha

Kriteria	Bobot Indikatif (%)	Makna Penilaian
Kesesuaian legal dan ekologis	20	Usaha sesuai fungsi Hutan Lindung, tidak merusak gambut, dan tidak meningkatkan risiko karhutla.
Ketersediaan sumber daya	15	Bahan baku atau sumber daya tersedia, dapat dibudidayakan, atau dapat dipulihkan.
Kesiapan masyarakat	15	Masyarakat memiliki keterampilan, minat, dan pelaku yang dapat menjalankan usaha.

Kesiapan kelembagaan	15	LPHD/KUPS memiliki struktur, peran, rencana kerja, dan potensi pengelolaan usaha.
Peluang pasar dan nilai tambah	15	Produk memiliki pasar, peluang pengolahan, kemasan, branding, dan pemasaran.
Kemudahan implementasi	10	Teknologi mudah diterapkan, modal relatif terjangkau, dan dapat dimulai bertahap.
Risiko dan keberlanjutan	10	Risiko ekologis, sosial, pasar, dan teknis dapat dikendalikan.

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

Berdasarkan kriteria tersebut, usaha seperti rotan, madu kelulut, dan perikanan dapat dianalisis sebagai prioritas awal karena telah memiliki pelaku dan pasar awal. Usaha ayam petelur dan pakan jagung ditempatkan sebagai usaha pendukung jangka pendek/off-farm karena tidak menjadi pemanfaatan inti kawasan Hutan Desa, tetapi dapat membantu ketahanan pangan, pendapatan rumah tangga, dan mengurangi tekanan ekonomi terhadap kawasan. Sementara itu, jasa lingkungan, karbon, dan ekowisata ditempatkan sebagai prioritas jangka panjang karena membutuhkan data teknis, kelembagaan kuat, SOP, baseline, dan kemitraan khusus.

3.8 Validasi dan Triangulasi Data

Validasi data dilakukan melalui triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan data lebih dapat dipercaya. Triangulasi penting karena sebagian data potensi masih bersifat indikatif, sebagian berasal dari rencana dalam dokumen RKPS, dan sebagian lainnya berasal dari pengalaman masyarakat di lapangan.

Tabel 3.8 Validasi dan Triangulasi Data

Bentuk Triangulasi	Cara Pelaksanaan
Triangulasi sumber	Membandingkan informasi dari LPHD, KUPS, masyarakat, pemerintah desa, KPHL, dan dokumen.
Triangulasi metode	Membandingkan hasil telaah dokumen, wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi.
Triangulasi spasial	Mengecek lokasi potensi melalui peta, sketsa, GPS, dan informasi masyarakat.
Triangulasi usaha	Membandingkan volume rencana, produksi aktual, kapasitas pelaku, dan peluang pasar.
Validasi kelembagaan	Membahas hasil sementara dengan LPHD, KUPS, dan para pihak.

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

3.9 Tahapan Pelaksanaan Studi

Pelaksanaan studi dilakukan secara bertahap agar hasilnya sistematis dan mudah digunakan sebagai dasar perencanaan. Tahapan dimulai dari persiapan dan telaah dokumen, dilanjutkan pengumpulan data, analisis, validasi, penyusunan laporan, serta perumusan tindak lanjut.

Tabel 3.9 Tahapan Pelaksanaan Studi

Tahap	Kegiatan Utama	Keluaran
1. Persiapan	Menyusun rencana kerja, daftar data, instrumen wawancara, daftar narasumber, dan kebutuhan dokumen.	Kerangka kerja studi dan instrumen pengumpulan data.
2. Telaah dokumen	Mengkaji RKPS, profil desa, dokumen legal, laporan karhutla, dan dokumen kelembagaan.	Data dasar kawasan, potensi, dan kelembagaan.
3. Pengumpulan data lapangan	Wawancara, FGD, observasi, dokumentasi, dan penelusuran pasar awal.	Informasi primer dan catatan lapangan.
4. Pengolahan data	Mengelompokkan data berdasarkan biofisik, sosial ekonomi, kelembagaan, komoditas, pasar, risiko, dan kemitraan.	Matriks data dan ringkasan temuan.
5. Analisis	Analisis potensi, SWOT, rantai nilai, prioritas, risiko, dan kemitraan.	Temuan Identifikasi dan Peluang Usaha
6. Validasi	Membahas temuan sementara dengan LPHD/KUPS dan pihak terkait.	Perbaikan data dan kesepahaman hasil.
7. Penyusunan laporan	Menyusun Bab I sampai Bab VII serta bagian pendukung laporan.	Dokumen laporan studi.
8. Tindak lanjut	Merumuskan rekomendasi program, pembagian peran, jadwal, indikator, dan kebutuhan dukungan.	Matriks rekomendasi Bab VI.

Sumber: Diolah penyusun, 2026.

3.10 Batasan Studi

Studi ini merupakan kajian potensi dan peluang usaha, sehingga hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan awal. Beberapa batasan perlu dipahami agar rekomendasi tidak ditafsirkan sebagai hasil studi kelayakan teknis dan finansial penuh.

1. Studi ini belum merupakan inventarisasi biologis lengkap seluruh flora dan fauna Hutan Desa Katimpun.
2. Data produksi beberapa komoditas masih bersifat indikatif dan perlu diverifikasi melalui pencatatan lapangan.
3. Angka rencana produksi dan harga yang berasal dari dokumen rencana belum dapat langsung dianggap sebagai keuntungan usaha.
4. Analisis finansial rinci belum dilakukan untuk seluruh komoditas karena membutuhkan data biaya, tenaga kerja, transportasi, risiko, dan margin pemasaran.
5. Potensi jasa karbon, tata air, dan jasa lingkungan masih bersifat indikatif dan membutuhkan studi teknis, baseline, dan sistem MRV apabila akan dikembangkan.
6. Usaha ayam petelur dan pakan jagung diposisikan sebagai usaha pendukung off-farm, sehingga membutuhkan kajian lokasi, biaya pakan, kesehatan ternak, dan pasar telur secara lebih rinci.
7. Rekomendasi pemanfaatan kawasan tetap harus disesuaikan dengan fungsi Hutan Lindung, ruang perlindungan, ruang pemanfaatan, RKPS, dan arahan KPHL.

3.11 Prinsip Etika dan Kehati-hatian Pengelolaan Data

Dalam pengumpulan dan penggunaan data, studi ini memperhatikan prinsip etika sosial dan kehati-hatian ekologis. Informasi yang berasal dari masyarakat perlu digunakan dengan menghormati pengetahuan lokal, hak masyarakat, dan kesepakatan bersama. Informasi mengenai lokasi sumber daya penting, satwa dilindungi, atau tanaman bernilai konservasi tidak boleh digunakan untuk mendorong pemanfaatan yang merusak atau melanggar ketentuan.

Pada aspek usaha, setiap rekomendasi harus mengutamakan transparansi pembagian manfaat, keterlibatan masyarakat, keterwakilan perempuan dan pemuda, serta tidak menimbulkan konflik internal. Pada aspek lingkungan, setiap pengembangan usaha harus menghindari pembakaran, pengeringan gambut, pembukaan lahan baru di ruang perlindungan, pengambilan liar berlebihan, dan gangguan terhadap habitat satwa.

Metodologi studi ini dirancang untuk menghubungkan kondisi kawasan Hutan Desa Katimpun dengan potensi usaha dan rekomendasi pengembangan yang dapat dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan menggabungkan telaah dokumen, penggalan informasi partisipatif, observasi, analisis komoditas, analisis sosial ekonomi, analisis kelembagaan, analisis pasar, SWOT, prioritas, risiko, dan kemitraan.

BAB IV

HASIL IDENTIFIKASI POTENSI DAN PELUANG USAHA

4.1 Pendahuluan

Hutan Desa Katimpun merupakan kawasan perhutanan sosial pada fungsi Hutan Lindung dengan luas sekitar 2.642 ha. Karakter utama kawasan berupa ekosistem rawa gambut, belukar rawa, rawa, dan lahan terbuka terbatas. Dengan fungsi kawasan sebagai Hutan Lindung, pengembangan usaha tidak diarahkan pada eksploitasi hasil hutan kayu, tetapi pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan yang tidak merusak, agroforestri/paludikultur, perikanan rawa, jasa lingkungan, serta usaha ekonomi pendukung yang sejalan dengan konservasi gambut.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa potensi Hutan Desa Katimpun berada pada beberapa kelompok besar, yaitu: (1) potensi HHBK seperti rotan, madu kelulut, tanaman obat, tanaman hias, jamur hutan, dan komoditas lokal lainnya; (2) potensi perikanan rawa dan silvofishery; (3) potensi tanaman rehabilitasi dan agroforestri gambut seperti balangeran, lampuda, hampuak, kambasira, aren, cempedak, dan durian; (4) potensi jasa lingkungan berupa perlindungan tata air, penyimpanan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekowisata terbatas; serta (5) potensi kelembagaan masyarakat melalui LPHD dan beberapa KUPS yang telah terbentuk.

Meskipun demikian, potensi tersebut masih memerlukan penguatan yang sistematis. Beberapa komoditas telah memiliki rencana volume dan bentuk produk dalam dokumen RKPS, namun sebagian besar masih berada pada tahap awal, belum memiliki data stok yang memadai, belum memiliki SOP panen lestari, belum kuat dalam pengolahan dan pemasaran, serta masih membutuhkan pendampingan teknis. Oleh sebab itu, hasil identifikasi dalam bab ini disusun secara analitis agar menjadi dasar yang lebih kuat bagi penentuan prioritas pada Bab V.

4.2 Kerangka Analisis Potensi dan Peluang Usaha

Identifikasi potensi Hutan Desa Katimpun dilakukan dengan melihat keterkaitan antara sumber daya kawasan, kondisi masyarakat, kelembagaan, dan pasar. Potensi usaha tidak cukup dinilai dari keberadaan komoditas di lapangan, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaian dengan fungsi Hutan Lindung, daya dukung ekosistem gambut, kesiapan kelembagaan LPHD/KUPS, kemampuan masyarakat, nilai tambah produk, serta risiko ekologis. Kerangka analisis yang digunakan dalam bab ini disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kerangka Analisis Potensi dan Peluang Usaha Hutan Desa Katimpun

Aspek Analisis	Pertanyaan Kunci	Indikator yang Dilihat
Legal dan fungsi kawasan	Apakah pemanfaatan sesuai dengan status Hutan Lindung dan Perhutanan Sosial?	Fungsi kawasan, izin HD, RKPS, aturan pemanfaatan, larangan eksploitasi kayu
Ekologi gambut	Apakah usaha menjaga tata air dan tidak meningkatkan risiko kebakaran?	Tutupan lahan, kondisi rawa, kanal, tabat, vegetasi, risiko karhutla

Ketersediaan sumber daya	Apakah bahan baku tersedia dan dapat diproduksi secara berkelanjutan?	Potensi komoditas, volume indikatif, sebaran, musim, stok alam
Sosial ekonomi	Apakah masyarakat memiliki keterampilan dan minat untuk mengelola usaha?	Mata pencaharian, pengalaman, kelompok kerja, peran perempuan dan pemuda
Kelembagaan	Apakah LPHD dan KUPS mampu menjadi pengelola usaha?	KUPS yang sudah terbentuk, administrasi, rencana kerja, pembukuan
Pasar dan nilai tambah	Apakah produk memiliki pembeli dan peluang peningkatan nilai?	Harga, volume, bentuk produk, pengemasan, branding, jaringan pasar
Risiko dan keberlanjutan	Apa risiko utama bagi kawasan dan usaha?	Overharvest, kebakaran, legalitas, fluktuasi harga, konflik akses

Sumber: Diolah dari dokumen RKPS LPHD Katimpun 2025-2034, dan hasil analisis penyusun.

4.3 Gambaran Umum Potensi Kawasan Hutan Desa Katimpun

Potensi kawasan Hutan Desa Katimpun harus dipahami dalam konteks fungsi Hutan Lindung rawa gambut. Berdasarkan RKPS LPHD Katimpun, potensi hasil hutan kayu tidak ditetapkan sebagai potensi pemanfaatan usaha. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan Hutan Lindung yang lebih menekankan perlindungan fungsi ekologis, pemanfaatan HHBK, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan. Dengan demikian, usaha ekonomi masyarakat perlu diarahkan pada kegiatan yang tidak merusak tutupan vegetasi, tidak mengeringkan gambut, dan tidak menurunkan kualitas habitat.

Potensi awal yang telah tercatat dalam RKPS menunjukkan adanya sumber daya berbasis perairan, madu kelulut, tanaman hias, tanaman obat, serta jasa lingkungan. Beberapa potensi tersebut masih dinyatakan sebagai kegiatan off-farm atau berada di sekitar Hutan Desa, sehingga perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai lokasi pemanfaatan, status ruang, serta keterkaitannya dengan rencana ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan LPHD.

Tabel 4.2 Ringkasan Potensi Kawasan Hutan Desa Katimpun Berdasarkan RKPS

Kategori	Jenis Potensi	Data Indikasi Awal	Catatan Pengembangan
Hasil hutan kayu	Tidak ditetapkan sebagai potensi usaha	Tidak ada data pemanfaatan kayu sebagai usaha utama	Tidak direkomendasikan karena kawasan berfungsi sebagai Hutan Lindung
HHBK/perikanan	Perikanan tangkap	Hasil ikan sekitar 5.280 kg/tahun pada lokasi bukan HD/off-farm	Dapat menjadi basis usaha KUPS Perikanan dengan tata kelola alat tangkap dan lokasi yang jelas
HHBK/madu	Madu kelulut	Produksi awal sekitar 12 liter/tahun (off-farm)	Perlu dikembangkan melalui budidaya stup, panen higienis, dan pengemasan
Satwa liar	Babi hutan	Tercatat sekitar 10 ekor/tahun	Tidak diposisikan sebagai usaha prioritas; perlu mengikuti ketentuan perlindungan satwa dan etika konservasi

Tanaman hias dan langka	Tanaman hias, tanaman langka, anggrek hutan	Sekitar 10 jenis/tahun	Hanya dapat dikembangkan melalui budidaya legal, bukan pengambilan liar berlebihan
Tanaman obat	Tanaman obat lokal	Sekitar 5 jenis/tahun	Perlu identifikasi jenis, SOP panen, budidaya, dan pengolahan sederhana
Jasa lingkungan	Kawasan Hutan Lindung	Luas kawasan sekitar 2.642 ha	Potensi jasa tata air, karbon gambut, biodiversitas, edukasi, dan ekowisata terbatas

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa arah pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun lebih kuat pada HHBK dan jasa lingkungan. Potensi kayu tidak menjadi basis usaha. Hal ini penting untuk ditegaskan agar laporan tidak mendorong kegiatan yang bertentangan dengan fungsi lindung. Pada sisi lain, potensi HHBK yang telah tercatat masih perlu ditingkatkan dari sekadar potensi awal menjadi kegiatan usaha yang memiliki standar produksi, kelembagaan pelaksana, pasar, dan mekanisme perlindungan kawasan.

4.4 Identifikasi Komoditas dan Peluang Usaha Utama

Berdasarkan telaah dokumen dan hasil identifikasi potensi, terdapat beberapa komoditas yang dapat menjadi basis pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun. Komoditas tersebut dikelompokkan ke dalam usaha HHBK, perikanan rawa, agroforestri dan pembibitan, jasa lingkungan, serta usaha pendukung. Pembahasan berikut menyajikan kondisi potensi, peluang pengembangan, pelaku utama, kendala, dan kebutuhan penguatan masing-masing komoditas.

4.4.1 Rotan dan Kerajinan Anyaman Rotan

Rotan merupakan salah satu komoditas paling strategis bagi Hutan Desa Katimpun. Potensi rotan memiliki hubungan langsung dengan kondisi vegetasi hutan rawa, keterampilan masyarakat, serta keberadaan KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun". Dalam dokumen hasil studi awal, KUPS ini disebut memiliki anggota relatif banyak dan mayoritas perempuan, sehingga rotan bukan hanya komoditas ekologis tetapi juga memiliki dimensi sosial dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Dari sisi peluang usaha, rotan dapat dikembangkan pada dua jalur. Jalur pertama adalah pengelolaan bahan baku rotan melalui panen selektif, sortasi, pengeringan, dan penyimpanan. Jalur kedua adalah peningkatan nilai tambah melalui kerajinan anyaman, seperti tas rotan, tikar, keranjang, souvenir, perlengkapan rumah tangga, dan produk desain modern. Pada dokumen RKPS, rencana pengembangan usaha mencatat produk anyaman rotan berupa tas rotan dengan volume 2.000 buah/tahun dan harga indikatif Rp60.000/buah. Angka ini menunjukkan bahwa rotan memiliki potensi nilai ekonomi cukup besar apabila kualitas produk, kontinuitas pasokan, desain, dan pemasaran diperkuat.

Tabel 4.3 Profil Potensi Usaha Rotan dan Kerajinan Anyaman

Aspek	Kondisi Potensi	Keterangan Pengembangan
Sumber bahan baku	Rotan pada kawasan Hutan Desa dan lanskap KPHL Kapuas Kahayan	Perlu pemetaan sebaran, stok, jenis rotan, dan zona panen
Pelaku utama	KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun"	Perlu penguatan manajemen kelompok, pembukuan, dan pembagian peran produksi

Bentuk produk awal	Anyaman rotan, termasuk tas rotan	Dapat diperluas menjadi suvenir, dekorasi, perlengkapan rumah tangga, dan produk wisata
Rencana volume RKPS	2.000 buah/tahun	Perlu dipastikan kapasitas produksi aktual per anggota
Harga indikatif RKPS	Rp60.000/buah	Belum memperhitungkan biaya bahan, tenaga kerja, kemasan, transportasi, dan margin pemasaran
Pendapatan bruto indikatif	Sekitar Rp120.000.000/tahun	Angka indikatif; harus diverifikasi melalui pencatatan produksi dan penjualan
Nilai tambah utama	Desain, finishing, branding, pengemasan, dan pemasaran kolektif	Perlu pelatihan desain, standarisasi kualitas, dan akses pasar
Risiko utama	Panen berlebih, bahan baku tidak stabil, kebakaran gambut, pasar terbatas	Perlu SOP panen lestari, budidaya rotan, dan strategi pemasaran

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034 dan analisis penyusun.

Peluang pengembangan rotan sangat kuat karena komoditas ini dapat menyerap tenaga kerja lokal, terutama perempuan, dan dapat menghasilkan produk tahan simpan. Namun, keberhasilan pengembangan rotan tidak boleh hanya bertumpu pada pemungutan dari alam. Kegiatan budidaya rotan perlu dikembangkan di ruang pemanfaatan atau area yang sesuai, sekaligus menerapkan aturan panen selektif agar stok bahan baku tidak menurun. Dalam jangka menengah, rumah produksi, rak pengeringan, ruang penyimpanan, katalog produk, dan promosi digital menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat posisi rotan Katimpun sebagai produk unggulan.

4.4.2 Madu Kelulut dan Madu Hutan

Madu kelulut dan madu hutan memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai produk khas Hutan Desa Katimpun karena usaha ini relatif ramah lingkungan dan bergantung pada terjaganya vegetasi berbunga di sekitar kawasan. Secara ekologis, madu menghubungkan manfaat ekonomi masyarakat dengan perlindungan hutan. Semakin baik kondisi tutupan vegetasi dan keanekaragaman tanaman berbunga, semakin besar peluang keberhasilan budidaya lebah dan produksi madu.

RKPS mencatat potensi awal madu kelulut sekitar 12 liter/tahun pada kegiatan off-farm. Pada rencana pemanfaatan kawasan, lebah madu/kelulut direncanakan dengan volume 100 liter/tahun dan 20 stup madu kelulut di ruang pemanfaatan, serta pengadaan alat penyedot madu kelulut sebanyak 5 unit pada tahun 2026. Pada rencana pengembangan usaha, madu kelulut juga dicatat dengan volume 30 liter/tahun, kemasan botol 200 ml, dan harga Rp50.000/botol. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa data produksi masih perlu dikonsolidasikan, tetapi sekaligus menunjukkan adanya arah pengembangan dari produksi kecil menuju usaha yang lebih terencana.

Tabel 4.4 Profil Potensi Usaha Madu Kelulut

Aspek	Data Potensi	Catatan Pengembangan
Kondisi awal	Produksi madu kelulut sekitar 12 liter/tahun (off-farm)	Masih skala kecil dan perlu pencatatan produksi aktual

Target pemanfaatan kawasan	Volume 100 liter/tahun dengan 20 stup madu kelulut	Perlu pemilihan lokasi dekat sumber pakan lebah dan perlindungan vegetasi berbunga
Sarana yang direncanakan	Pengadaan 5 unit alat penyedot madu kelulut pada 2026	Mendukung panen higienis dan efisiensi produksi
Rencana produk usaha	Madu kemasan botol 200 ml	Perlu kemasan bersih, label, PIRT/halal jika dipasarkan lebih luas
Harga indikatif RKPS	Rp50.000/botol 200 ml	Dapat menjadi produk premium bila kualitas dan cerita konservasi diperkuat
Pendapatan bruto indikatif	30 liter/tahun setara sekitar 150 botol 200 ml atau Rp7.500.000/tahun	Angka indikatif dan belum menghitung biaya produksi
KUPS/pelaku	KUPS Budidaya Lebah Madu "Sari Madu Kelulut"	Perlu pelatihan budidaya, panen, pascapanen, pemasaran
Risiko utama	Koloni tidak stabil, hama, kebakaran, kurang pakan, mutu tidak seragam	Perlu SOP budidaya, panen higienis, dan perlindungan habitat

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034 dan analisis penyusun.

Peluang pasar madu relatif baik karena madu dikenal sebagai produk kesehatan alami. Namun, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh jumlah stup, tetapi oleh kemampuan kelompok menjaga koloni, menjaga kualitas kadar air, melakukan panen bersih, mengemas produk secara baik, dan membangun kepercayaan konsumen. Branding "Madu Gambut Katimpun" dapat menjadi nilai tambah apabila dikaitkan dengan konservasi gambut, hutan, dan pengelolaan berbasis masyarakat.

4.4.3 Perikanan Rawa, Perikanan Tangkap, dan Silvofishery

Perikanan merupakan salah satu potensi ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Desa Katimpun karena wilayah ini memiliki keterkaitan kuat dengan sungai, rawa, kanal, dan lahan basah. RKPS mencatat hasil perikanan tangkap sekitar 5.280 kg/tahun pada lokasi bukan HD/off-farm. Data ini menunjukkan adanya basis sumber daya perikanan yang dapat mendukung ekonomi masyarakat, meskipun perlu dibedakan antara perikanan di dalam kawasan Hutan Desa, sekitar kawasan, dan perairan desa di luar areal HD.

Selain perikanan tangkap, RKPS juga merencanakan pengembangan silvofishery dengan jenis ikan betok/papuyu, gabus/haruan, dan lele. Masing-masing jenis direncanakan sebanyak 10.000 ekor, dengan dukungan pengadaan keramba apung sebanyak 15 buah pada tahun 2029. Pada rencana pengembangan usaha, komoditas ikan papuyu dicatat 60 kg/tahun dengan harga Rp30.000/kg, ikan lele 100 kg/tahun dengan harga Rp20.000/kg, dan ikan gabus 100 kg/tahun dengan harga Rp30.000/kg. Data tersebut perlu dipahami sebagai indikasi rencana usaha awal, bukan produksi aktual seluruh potensi perikanan.

Tabel 4.5 Profil Potensi Usaha Perikanan Rawa dan Silvofishery

Komoditas	Data Potensi	Produk Awal	Arah Pengembangan
Perikanan tangkap	Sekitar 5.280 kg/tahun pada lokasi bukan HD/off-farm	Ikan segar konsumsi rumah tangga dan pasar lokal	Pengaturan alat tangkap, zona pemijahan, dan pencatatan hasil tangkap

Ikan papuyu/betok	Rencana usaha 60 kg/tahun; rencana silvofishery 10.000 ekor	Ikan hidup/segar	Budidaya rawa/keramba, olahan ikan asap/asin, kuliner lokal
Ikan lele	Rencana usaha 100 kg/tahun; rencana silvofishery 10.000 ekor	Ikan hidup/segar	Budidaya keramba/kolam, pengolahan sederhana
Ikan gabus/haruan	Rencana usaha 100 kg/tahun; rencana silvofishery 10.000 ekor	Ikan hidup/segar	Produk segar, ikan asap, ikan asin, abon/kerupuk ikan
Keramba apung	Rencana pengadaan 15 buah pada 2029	Sarana budidaya	Perlu kajian lokasi, kualitas air, biaya pakan, dan kelembagaan pengelola
KUPS/pelaku	KUPS Perikanan	Unit usaha perikanan	Perlu pelatihan budidaya, panen, pascapanen, dan pemasaran

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034.

Pengembangan perikanan memiliki peluang jangka pendek karena masyarakat telah mengenal kegiatan menangkap ikan. Namun, jika usaha diarahkan ke budidaya dan keramba, diperlukan kajian biaya produksi, pakan, kualitas air, risiko banjir/kekeringan, dan tata kelola kelompok. Perikanan juga harus dihubungkan dengan fungsi ekologis rawa gambut. Sistem perikanan yang baik dapat menjadi bagian dari pengelolaan air, sementara praktik penangkapan yang merusak dapat menurunkan stok ikan dan merusak habitat.

4.4.4 Tanaman Obat dan Produk Herbal Lokal

Tanaman obat merupakan potensi HHBK yang penting karena masyarakat sekitar hutan umumnya memiliki pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan tumbuhan untuk kesehatan. RKPS mencatat adanya potensi tanaman obat sekitar 5 jenis/tahun. Hasil studi awal juga menyebutkan bahwa tanaman obat seperti akar kuning, sarang semut, dan sirih merah dapat menjadi bahan pengembangan produk herbal. Namun, jenis, sebaran, volume, dan tingkat ketersediaannya masih perlu diverifikasi melalui inventarisasi lapangan yang lebih rinci.

Pengembangan tanaman obat perlu diarahkan secara hati-hati. Jika bahan masih diambil dari alam, harus dibuat SOP panen lestari agar tidak merusak sumber daya. Dalam jangka menengah, tanaman obat sebaiknya dibudidayakan pada kebun contoh, pekarangan, atau sistem agroforestri yang sesuai dengan gambut. Produk yang dapat dikembangkan meliputi simplisia kering, bahan jamu, minuman herbal, dan paket edukasi tanaman obat. Untuk masuk ke pasar lebih luas, produk memerlukan standar higienitas, kemasan, label, dan izin edar sesuai ketentuan.

Tabel 4.6 Profil Potensi Tanaman Obat dan Produk Herbal

Aspek	Kondisi/Potensi	Kebutuhan Pengembangan
Potensi jenis	Sekitar 5 jenis/tahun berdasarkan RKPS; jenis spesifik perlu verifikasi lapangan	Inventarisasi jenis, nama lokal, sebaran, dan musim ketersediaan
Bentuk pemanfaatan awal	Penggunaan tradisional dan pemungutan terbatas	Pencatatan pengetahuan lokal dan praktik panen lestari
Produk potensial	Simplisia, ramuan herbal, minuman lokal, produk edukasi	Pelatihan pengolahan, pengeringan, penyimpanan, formulasi dasar

Pelaku potensial	KUPS HHBK/rotan, kelompok perempuan, rumah tangga usaha kecil	Pembentukan unit pengolahan kecil dan pembukuan produksi
Pasar awal	Masyarakat lokal, pasar desa, toko oleh-oleh, paket wisata edukasi	Perlu kemasan, label, dan penguatan promosi
Risiko utama	Overharvest, salah identifikasi jenis, mutu tidak seragam, kendala legalitas	SOP panen, budidaya, pendampingan teknis, izin sesuai produk

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034, Hasil Studi Potensi HD Katimpun, dan analisis penyusun.

4.4.5 Tanaman Hias, Kantong Semar, Anggrek Hutan, dan Jamur Hutan

Kawasan Hutan Desa Katimpun memiliki potensi tanaman hias dan tanaman khas gambut, termasuk anggrek hutan dan kantong semar. RKPS mencatat potensi tanaman hias, tanaman langka, dan anggrek hutan sekitar 10 jenis/tahun, serta rencana pemanfaatan kawasan untuk tanaman hias jenis kantong semar dengan volume 100 kg/tahun. RKPS juga mencatat potensi jamur hutan sekitar 30 kg/tahun. Potensi ini menarik karena dapat dikembangkan sebagai produk ekonomi, bahan edukasi, dan daya tarik ekowisata.

Namun, komoditas tanaman hias hutan memiliki risiko legal dan ekologis yang lebih tinggi dibanding madu atau perikanan. Beberapa jenis tanaman hias hutan dapat termasuk jenis yang diatur atau dilindungi. Oleh karena itu, pengembangan tanaman hias tidak boleh berbasis pengambilan liar secara berlebihan. Model yang lebih tepat adalah budidaya ex-situ, rumah tanaman, edukasi konservasi, dan kerja sama dengan instansi terkait apabila diperlukan. Untuk jamur hutan, pengembangan perlu dimulai dari identifikasi jenis yang aman dikonsumsi, standar panen, dan pengolahan pascapanen.

Tabel 4.7 Profil Potensi Tanaman Hias dan Jamur Hutan

Komoditas	Data Potensi	Peluang Produk/Jasa	Catatan Kehati-hatian
Tanaman hias/ anggrek hutan	Sekitar 10 jenis/ tahun menurut RKPS	Budidaya legal, koleksi edukasi, paket wisata flora	Perlu identifikasi jenis dan aturan pemanfaatan
Kantong semar	Rencana pemanfaatan 100 kg/tahun pada ruang pemanfaatan	Rumah tanaman, edukasi gambut, daya tarik wisata	Tidak boleh mengambil liar berlebihan; perlu budidaya dan izin bila diperdagangkan
Jamur hutan	Rencana 30 kg/tahun	Pangan lokal, kuliner desa, edukasi jamur rawa	Perlu identifikasi keamanan konsumsi dan standar higienitas
Pelaku potensial	KUPS HHBK, kelompok perempuan, pemuda pemandu wisata	Produk tanaman hias, paket edukasi, kuliner lokal	Perlu pelatihan budidaya, pengemasan, dan pemasaran

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034.

4.4.6 Pembibitan, Pengayaan Jenis Asli, Agroforestry, dan Paludikultur

Potensi penting lainnya adalah pembibitan dan pengayaan jenis asli gambut. RKPS LPHD Katimpun menyusun rencana pembibitan dan penanaman beberapa jenis tanaman seperti balangeran, lampuda, hampuak, kambasira, aren, cempedak, dan durian. Kegiatan ini memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekologis untuk rehabilitasi dan penguatan tutupan vegetasi gambut, serta fungsi ekonomi untuk menyediakan komoditas produktif jangka menengah dan panjang.

Rencana pengayaan jenis asli menunjukkan bahwa balangeran menjadi jenis utama dengan jumlah 73.326 batang pada luasan 60 ha, diikuti lampuda 18.331 batang pada 15 ha, hampuak 18.331 batang pada 15 ha, dan kambasira 12.221 batang pada 10 ha. RKPS juga mencatat penanaman aren sebanyak 1.650 bibit pada 25 ha, cempedak 1.000 bibit pada 5 ha, dan durian 1.500 bibit pada 5 ha. Dalam jangka panjang, aren direncanakan menghasilkan 2.500 kg/tahun dan dapat diolah menjadi gula aren sekitar 1.000 kg. Angka ini menunjukkan adanya potensi pengembangan agroforestry/paludikultur yang dapat memperkuat ekonomi tanpa menghilangkan fungsi lindung, sepanjang lokasi dan teknik budidayanya sesuai dengan karakter gambut.

Tabel 4.8 Rencana Pembibitan, Penanaman, dan Potensi Agroforestry

Jenis	Jumlah Rencana	Luas/ Lokasi	Fungsi Utama	Catatan Pengembangan
Balangeran	73.326 bibit/batang	60 ha; ruang perlindungan /pemanfaatan sesuai RKPS	Rehabilitasi gambut, pengayaan jenis asli	Prioritas restorasi dan pemulihan tutupan lahan
Lampuda	18.331 bibit/batang	15 ha	Pengayaan vegetasi lokal	Perlu kesesuaian tapak dan pemeliharaan
Hampuak	18.331 bibit/batang	15 ha	Pengayaan vegetasi lokal dan sumber pangan satwa	Perlu pengamatan pertumbuhan
Kambasira	12.221 bibit/batang	10 ha	Pengayaan jenis lokal	Perlu pembibitan dan pemeliharaan berkelanjutan
Aren	1.650 bibit; rencana 25 ha	Ruang pemanfaatan	Komoditas nira/gula aren dan tutupan vegetasi	Potensi panen 2.500 kg/tahun dan olahan gula aren sekitar 1.000 kg
Cempedak	1.000 bibit; rencana 5 ha	Ruang pemanfaatan	Buah lokal dan agroforestry	Potensi panen 1.000 buah pada tahun ke-10
Durian	1.500 bibit; rencana 5 ha	Ruang pemanfaatan	Buah lokal dan agroforestry	Potensi panen 1.500 buah pada tahun ke-10

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034.

Pembibitan tanaman gambut juga dapat dikembangkan sebagai peluang usaha tersendiri. Bibit lokal dapat disalurkan untuk program rehabilitasi, CSR, restorasi gambut, rehabilitasi DAS, atau kerja sama konservasi. Namun, usaha pembibitan memerlukan standar mutu bibit, persemaian, pencatatan sumber benih, dan kepastian pasar. Pengembangan pembibitan akan lebih kuat apabila LPHD membangun unit persemaian yang terhubung dengan rencana rehabilitasi dan program mitra.

4.4.7 Jasa Lingkungan, Tata Air Gambut, Karbon, dan Ekowisata Terbatas

Kawasan Hutan Desa Katimpun memiliki potensi jasa lingkungan yang besar karena berada pada ekosistem Hutan Lindung rawa gambut. Jasa lingkungan utama yang dapat dikembangkan meliputi jasa tata air, penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman

hayati, edukasi gambut, penelitian, dan ekowisata terbatas. Dalam RKPS, pemanfaatan jasa lingkungan seperti ekowisata/wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon, serta jasa tata air telah disebutkan, tetapi belum dilengkapi rencana kegiatan teknis yang rinci. Hal ini menunjukkan bahwa jasa lingkungan merupakan peluang jangka panjang yang perlu disiapkan sejak awal.

Salah satu prasyarat utama jasa lingkungan di kawasan gambut adalah perlindungan tata air. RKPS merencanakan pembangunan tabat kanal sebanyak 22 unit pada tahun 2026, 20 unit pada tahun 2027, dan 20 unit pada tahun 2028. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan muka air, membasahi gambut, dan mencegah kebakaran. Dengan demikian, kegiatan konservasi tata air tidak hanya menjadi kewajiban perlindungan kawasan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan jasa lingkungan dan ekonomi hijau.

Tabel 4.9 Potensi Jasa Lingkungan dan Prasyarat Pengembangannya

Jenis Jasa Lingkungan	Potensi di HD Katimpun	Prasyarat Pengembangan	Peluang Manfaat
Jasa tata air gambut	Kawasan rawa gambut, kanal, tabat, dan fungsi pengatur air	Pemeliharaan tabat, monitoring tinggi muka air, patroli kanal	Mengurangi risiko kebakaran, menjaga produktivitas rawa dan perikanan
Karbon gambut	Hutan Lindung dan gambut seluas sekitar 2.642 ha	Baseline karbon, peta tutupan lahan, MRV, kemitraan teknis	Peluang jangka panjang melalui skema jasa lingkungan/konservasi
Keanekaragaman hayati	Habitat flora-fauna gambut, termasuk satwa penting	Perlindungan ruang perlindungan, patroli, larangan perburuan, edukasi	Dukungan konservasi, edukasi, dan nilai reputasi desa hutan
Ekowisata terbatas	Susur sungai/kanal, edukasi rotan, madu, tanaman obat, gambut	Paket wisata, pemandu lokal, SOP keselamatan, papan informasi	Pendapatan pemandu, perahu, homestay, produk KUPS
Riset dan pendidikan	Lanskap gambut dan perhutanan sosial	Kemitraan kampus/NGO, izin, lokasi belajar, data dasar	Kunjungan studi, dokumentasi, penguatan kapasitas lokal

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034 dan hasil analisis penyusun.

Pengembangan ekowisata perlu dilakukan secara terbatas dan bertahap. Aktivitas wisata tidak boleh mengganggu habitat satwa liar, membuka jalur yang merusak gambut, atau menimbulkan sampah dan gangguan sosial. Model yang paling sesuai pada tahap awal adalah wisata edukasi kecil, kunjungan belajar, susur sungai/kanal, pengenalan kerajinan rotan, demonstrasi panen madu, edukasi tanaman obat, dan penjualan produk KUPS.

4.4.8 Usaha Pendukung Off-farm: Ayam Kampung, Ayam Petelur, dan Pakan Ternak Berbasis Jagung

RKPS LPHD Katimpun telah mencatat rencana pengembangan silvopasture berupa ayam kampung sebanyak 1.000 ekor, dengan pengadaan kandang ukuran 2 m x 4 m sebanyak 15 unit pada tahun 2029. Selain itu, rencana usaha mencatat produksi ayam kampung 100 kg/tahun dengan harga indikatif Rp70.000/kg. Dalam konteks studi potensi ini, usaha peternakan dapat diperkuat dengan satu peluang tambahan yang belum tercantum secara spesifik dalam RKPS,

yaitu peternakan ayam petelur skala rumah tangga/kelompok yang disandingkan dengan pembuatan pakan ternak berbasis tanaman jagung.

Usaha ayam petelur dan pakan berbasis jagung diposisikan sebagai usaha pendukung off-farm, bukan kegiatan inti pemanfaatan kawasan Hutan Lindung. Penempatannya sebaiknya berada di sekitar permukiman, pekarangan, lahan desa, atau lahan masyarakat yang telah tersedia, sehingga tidak mendorong pembukaan hutan, pengeringan gambut, atau aktivitas bakar. Argumentasi utama pengembangan usaha ini adalah menyediakan sumber pendapatan harian dari telur, memperkuat ketahanan pangan lokal, membuka ruang kerja bagi rumah tangga/perempuan/pemuda, serta mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan melalui diversifikasi sumber penghidupan masyarakat.

Pengembangan ayam petelur akan lebih kuat apabila tidak berdiri sendiri, melainkan disandingkan dengan pembuatan pakan ternak sederhana. Jagung dapat ditanam sebagai bahan pakan lokal pada lahan non-kawasan hutan, pekarangan, atau lahan desa yang sesuai. Jagung tidak menggantikan seluruh komponen pakan, tetapi dapat menjadi salah satu bahan pakan energi yang dipadukan dengan dedak, konsentrat/protein, mineral, dan bahan lain sesuai rekomendasi teknis. Dengan pola ini, biaya pakan dapat ditekan secara bertahap, sementara limbah kandang dapat diolah menjadi kompos untuk mendukung tanaman jagung, pembibitan, atau kebun rumah tangga.

Karena usaha ini tidak tercantum sebagai komoditas utama dalam RKPS, maka pengembangannya perlu dicatat sebagai peluang usaha pendukung jangka pendek yang memerlukan validasi lapangan, rencana usaha sederhana, pendampingan teknis dari dinas peternakan/pertanian, serta kesepakatan lokasi yang tidak bertentangan dengan fungsi perlindungan Hutan Desa. Dengan demikian, ayam petelur dan pakan jagung dapat melengkapi usaha HHBK seperti rotan, madu, dan perikanan, bukan menggantikan arah utama pengelolaan Hutan Desa Katimpun.

Tabel 4.9a Profil Peluang Usaha Ayam Petelur dan Pakan Ternak Berbasis Jagung

Aspek	Uraian	Catatan Pengembangan
Status dalam laporan	Peluang usaha tambahan yang belum tercantum spesifik dalam RKPS	Diposisikan sebagai usaha pendukung off-farm jangka pendek
Lokasi yang disarankan	Pekarangan, lahan desa, atau lahan masyarakat yang sudah tersedia	Tidak dilakukan di ruang perlindungan Hutan Desa dan tidak membuka hutan/gambut
Produk utama	Telur ayam konsumsi, ayam afkir, dan kompos kandang	Memberikan arus kas lebih rutin dibanding komoditas musiman
Pendukung usaha	Tanam jagung untuk bahan pakan lokal dan pembuatan pakan campuran sederhana	Jagung menjadi salah satu komponen pakan, bukan satu-satunya bahan pakan
Pelaku potensial	Rumah tangga, kelompok perempuan, pemuda, KUPS peternakan/unit usaha desa	Perlu pembagian tugas kandang, pakan, pencatatan, dan pemasaran

Kebutuhan awal	Kandang, bibit ayam petelur/pullet, tempat pakan-minum, obat/vitamin, jagung, alat pencacah/penggiling sederhana	Perlu dihitung dalam rencana usaha dan disesuaikan dengan skala kemampuan kelompok
Risiko utama	Penyakit ternak, fluktuasi harga telur, biaya pakan, bau/limbah kandang, kegagalan tanam jagung	Perlu biosecurity, sanitasi, pengelolaan limbah, formulasi pakan, dan pendampingan teknis
Keterkaitan dengan HD	Diversifikasi pendapatan agar ketergantungan pada pemanfaatan hutan berkurang	Mendukung ekonomi masyarakat tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan kebutuhan diversifikasi usaha masyarakat dan prinsip pengelolaan Hutan Desa Katimpun.

4.4.9 Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Pengelolaan Usaha

Selain potensi komoditas, Hutan Desa Katimpun juga memiliki modal sosial berupa kearifan lokal. RKPS mencatat beberapa kegiatan kearifan lokal seperti ritual adat Manyamburup, Basalamatan atau Tolak Bala, serta pembuatan tanggul/tukungan tanaman. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya pengetahuan lokal dan praktik sosial yang dapat mendukung pengelolaan kawasan, terutama dalam menjaga hubungan masyarakat dengan alam, membersihkan wilayah desa, serta mengembangkan teknik lokal budidaya di lahan basah.

Tabel 4.10 Kearifan Lokal yang Mendukung Pengelolaan Hutan Desa

Kearifan Lokal	Bentuk Kegiatan	Lokasi Status	Relevansi
Manyamburup	Membersihkan wilayah desa	Di Desa Katimpun/ off-farm	Mendukung kebersihan lingkungan dan gotong royong
Basalamatan/Tolak Bala	Doa bersama dan ritual keselamatan	Di Desa Katimpun/off-farm	Memperkuat kohesi sosial dan kesadaran kolektif
Tukungan/tanggul tanaman	Membuat tanggul atau dukungan tanam	Di Hutan Desa/on-farm	Relevan untuk budidaya pada lahan basah/gambut

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034.

Kearifan lokal perlu diposisikan sebagai unsur pendukung, bukan sekadar lampiran budaya. Dalam pengembangan usaha, kearifan lokal dapat memperkuat partisipasi masyarakat, memperjelas aturan sosial, serta menjadi identitas dalam pemasaran produk dan ekowisata. Produk rotan, madu, ikan rawa, dan tanaman obat akan lebih kuat apabila dikaitkan dengan cerita lokal, praktik konservasi, dan identitas Hutan Desa Katimpun.

4.5 Ringkasan Peluang Usaha Hutan Desa Katimpun

Berdasarkan hasil identifikasi, peluang usaha Hutan Desa Katimpun dapat dikelompokkan berdasarkan kedekatan dengan sumber daya, kesiapan masyarakat, dan jangka waktu pengembangan. Usaha jangka pendek adalah usaha yang relatif mudah dimulai karena bahan baku dan keterampilan awal tersedia atau dapat segera disiapkan melalui pendampingan. Dalam konteks ini, rotan, madu, perikanan, serta usaha pendukung off-farm seperti ayam petelur dan

pakan berbasis jagung dapat ditempatkan sebagai peluang awal yang realistis. Usaha jangka menengah membutuhkan penguatan teknis, fasilitas, dan pemasaran. Usaha jangka panjang membutuhkan data teknis, kelembagaan kuat, kemitraan, dan investasi yang lebih matang.

Tabel 4.11 Ringkasan Peluang Usaha Hasil Hutan Desa Katimpun

No	Peluang Usaha	Bentuk Produk / Jasa	Pelaku Utama	Tahap Pengembangan
1	Kerajinan rotan	Tas rotan, anyaman, suvenir, produk rumah tangga	KUPS Pengrajin Rotan, kelompok perempuan	Jangka pendek-menengah
2	Madu kelulut	Madu botol 200 ml, madu kemasan khas gambut	KUPS Madu Kelulut	Jangka pendek-menengah
3	Perikanan rawa	Ikan segar, ikan hidup, ikan asap/asin, olahan ikan	KUPS Perikanan, nelayan lokal	Jangka pendek-menengah
4	Tanaman obat	Simplisia, jamu lokal, minuman herbal	KUPS HHBK/kelompok rumah tangga	Jangka menengah
5	Tanaman hias dan jamur	Kantong semar budidaya, anggrek, jamur hutan, edukasi flora	KUPS HHBK, pemuda, kelompok perempuan	Jangka menengah
6	Agroforestry/paludi kultur	Aren, cempedak, durian, tanaman lokal gambut	LPHD, kelompok tani, KUPS	Jangka menengah-panjang
7	Pembibitan tanaman gambut	Bibit balangeran, lampuda, hampuak, kambasira, aren, rotan	LPHD/KUPS pembibitan	Jangka menengah
8	Jasa lingkungan	Karbon, tata air, konservasi biodiversitas	LPHD, KUPS Jasa Lingkungan, KPHL, mitra teknis	Jangka panjang
9	Ekowisata edukasi	Susur kanal, edukasi gambut, rotan, madu, tanaman obat	LPHD, KUPS Jasa Lingkungan, pemuda	Jangka panjang bertahap
10	Ayam kampung	Ayam hidup/daging ayam kampung	KUPS Peternakan/rumah tangga	Usaha pendukung/off-farm
11	Ayam petelur dan pakan ternak berbasis jagung	Telur konsumsi, ayam afkir, jagung pipil, pakan campuran sederhana, kompos kandang	Rumah tangga, kelompok perempuan/pemuda, KUPS peternakan/unit usaha desa	Usaha jangka pendek pendukung/off-farm

Sumber: Diolah dari RKPS LPHD Katimpun 2025-2034, Hasil Studi Potensi HD Katimpun, dan analisis penyusun.

4.6 Analisis Kelayakan Awal dan Tingkat Kesiapan Usaha

Analisis kelayakan awal dilakukan untuk memberikan gambaran komoditas mana yang paling mudah dikembangkan pada tahap awal, mana yang membutuhkan penguatan, dan mana yang lebih tepat diposisikan sebagai peluang jangka panjang. Analisis ini bukan pengganti studi kelayakan finansial penuh, tetapi berguna untuk menyusun prioritas program pada Bab V.

Kriteria yang digunakan meliputi kesesuaian legal dengan fungsi Hutan Lindung, ketersediaan sumber daya, kesiapan kelembagaan, kapasitas teknis masyarakat, peluang pasar, potensi nilai tambah, dan risiko ekologis. Hasil klasifikasi awal disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Klasifikasi Kesiapan Pengembangan Usaha

Komoditas	Tingkat Kesiapan	Alasan Utama	Tindak Lanjut
Kerajinan rotan	Tinggi - perlu penguatan	KUPS telah ada, keterampilan awal tersedia, rencana produk dan harga sudah tercatat	Perkuat desain, finishing, rumah produksi, standar mutu, dan pemasaran
Madu kelulut	Sedang-tinggi	KUPS telah ada, pasar madu cukup baik, usaha ramah lingkungan	Perlu stabilisasi koloni, alat panen, kemasan, label, PIRT/halal
Perikanan rawa	Sedang	Sumber daya perikanan tersedia dan masyarakat mengenal aktivitas tangkap	Perlu aturan tangkap, budidaya, pengolahan, dan pencatatan stok
Tanaman obat	Sedang	Potensi jenis ada, tetapi data jenis dan stok belum kuat	Perlu inventarisasi, kebun budidaya, SOP panen, dan izin produk
Tanaman hias/jamur	Sedang - hati-hati	Potensi ekonomi dan edukasi ada, tetapi aspek legal dan ekologis sensitif	Perlu budidaya legal, identifikasi jenis, dan kerja sama instansi teknis
Pembibitan tanaman gambut	Sedang-tinggi	Sejalan dengan restorasi dan pengayaan jenis asli	Perlu persemaian, standar bibit, sumber benih, dan pasar program restorasi
Agroforestry/paludikultur	Sedang	Cocok untuk komoditas aren, cempedak, durian, rotan jika tapak sesuai	Perlu perencanaan ruang, pemeliharaan jangka panjang, dan kajian biaya
Jasa lingkungan/karbon	Belum siap - potensi jangka panjang	Nilai ekologis tinggi, tetapi membutuhkan baseline, MRV, dan mitra khusus	Mulai dari patroli, tata air, data spasial, dan dokumentasi konservasi
Ekowisata edukasi	Belum siap - dapat disiapkan bertahap	Atraksi potensial ada, tetapi sarana, SOP, dan pemandu belum kuat	Mulai dari paket kecil untuk edukasi dan kunjungan terbatas
Ayam petelur dan pakan jagung	Sedang-tinggi sebagai usaha pendukung jangka pendek	Permintaan telur relatif rutin, dapat dikelola skala rumah tangga/kelompok, dan jagung dapat mendukung bahan pakan lokal	Harus dikembangkan off-farm, perlu analisis biaya pakan, biosecurity, pengelolaan limbah, dan pendampingan teknis peternakan

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan RKPS LPHD Katimpun.

Berdasarkan analisis tersebut, usaha yang paling realistis dikembangkan pada tahap awal adalah kerajinan rotan, madu kelulut, perikanan rawa dengan pengolahan

sederhana, serta usaha pendukung off-farm berupa ayam petelur dan pakan ternak berbasis jagung. Komoditas tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, dan agroforestry memerlukan penguatan teknis lebih lanjut. Sementara itu, jasa karbon dan ekowisata sebaiknya dipersiapkan sebagai peluang jangka panjang melalui penguatan data, kelembagaan, dan kemitraan.

4.7 Analisis SWOT Komoditas Unggulan

Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari komoditas utama. Analisis ini membantu menentukan strategi yang lebih tepat sebelum menetapkan prioritas pengembangan pada Bab V.

Tabel 4.13 Analisis SWOT Rotan dan Kerajinan Anyaman

Aspek	Uraian
Strengths/ Kekuatan	KUPS Pengrajin Rotan telah terbentuk; keterampilan anyaman sudah ada; produk rotan tahan simpan; rencana volume dan harga produk tercatat dalam RKPS.
Weaknesses/ Kelemahan	Data stok rotan belum lengkap; panen dari alam belum memiliki SOP rinci; desain dan finishing perlu ditingkatkan; pembukuan dan pemasaran masih perlu diperkuat.
Opportunities/ Peluang	Pasar kerajinan alami, souvenir, pameran, toko oleh-oleh, dan penjualan daring; dapat dikaitkan dengan ekowisata dan identitas Hutan Desa.
Threats/ Ancaman	Overharvest rotan, kebakaran gambut, persaingan produk kerajinan dari daerah lain, fluktuasi permintaan, dan ketergantungan pada pembeli perantara.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan data RKPS dan LPHD Katimpun

Tabel 4.14 Analisis SWOT Madu Kelulut

Aspek	Uraian
Strengths/Kekuatan	Usaha ramah lingkungan; KUPS madu telah terbentuk; produk mudah dikemas; bernilai kesehatan; sejalan dengan konservasi vegetasi berbunga.
Weaknesses/Kelemahan	Produksi masih kecil; teknik budidaya dan panen higienis perlu diperkuat; kemasan, label, dan izin produk belum kuat; pencatatan produksi belum rutin.
Opportunities/Peluang	Permintaan madu alami meningkat; dapat dibangun sebagai "Madu Gambut Katimpun"; dukungan kemitraan konservasi dan program perhutanan sosial.
Threats/Ancaman	Koloni gagal berkembang, kurang pakan lebah, kebakaran, perubahan musim, produk pesaing yang lebih murah, dan isu keaslian madu.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan data RKPS LPHD Katimpun.

Tabel 4.15 Analisis SWOT Perikanan Rawa dan Silvofishery

Aspek	Uraian
Strengths/Kekuatan	Masyarakat mengenal perikanan; potensi ikan lokal tersedia; KUPS Perikanan telah terbentuk; produk ikan memiliki pasar konsumsi lokal.
Weaknesses/Kelemahan	Data stok ikan belum kuat; pengolahan pascapanen terbatas; belum ada cold chain; budidaya keramba memerlukan modal dan pakan.
Opportunities/Peluang	Ikan segar, ikan asap, ikan asin, abon/kerupuk ikan, kuliner lokal, dan wisata memancing; dapat dikaitkan dengan pengelolaan rawa.
Threats/Ancaman	Alat tangkap tidak ramah lingkungan, fluktuasi air, kebakaran lahan, pencemaran, penyakit ikan, dan biaya pakan.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan data RKPS LPHD Katimpun.

Tabel 4.16 Analisis SWOT Tanaman Obat, Tanaman Hias, dan Jamur

Aspek	Uraian
Strengths/Kekuatan	Memiliki potensi jenis lokal; ada pengetahuan tradisional; cocok untuk produk edukasi dan usaha skala rumah tangga.
Weaknesses/Kelemahan	Data jenis dan stok belum rinci; legalitas produk belum siap; risiko salah identifikasi; teknik budidaya dan pengolahan masih terbatas.
Opportunities/Peluang	Tren herbal, tanaman hias, wisata edukasi flora, rumah tanaman, dan produk lokal khas gambut.
Threats/Ancaman	Pengambilan liar berlebihan, regulasi konservasi tanaman tertentu, mutu produk tidak konsisten, dan pasar khusus yang membutuhkan standar tinggi.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan data RKPS LPHD Katimpun.

Tabel 4.17 Analisis SWOT Jasa Lingkungan dan Ekowisata

Aspek	Uraian
Strengths/Kekuatan	Luas kawasan 2.642 ha, fungsi Hutan Lindung, ekosistem gambut, biodiversitas, dan rencana KUPS Jasa Lingkungan.
Weaknesses/Kelemahan	Belum ada baseline karbon, paket wisata, SOP layanan, pemandu terlatih, fasilitas wisata, dan mekanisme pembagian manfaat.
Opportunities/Peluang	Dukungan konservasi gambut, pendidikan lingkungan, kunjungan studi, jasa tata air, karbon jangka panjang, dan promosi produk KUPS.
Threats/Ancaman	Kebakaran gambut, gangguan satwa, kunjungan tidak terkendali, konflik akses, serta tingginya kebutuhan data teknis untuk skema karbon.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan data RKPS LPHD Katimpun.

Analisis SWOT menunjukkan bahwa hampir semua komoditas memiliki peluang, tetapi belum semuanya siap dikembangkan pada skala besar. Rotan dan madu relatif paling dekat dengan kesiapan usaha karena telah memiliki KUPS dan rencana produk. Perikanan memiliki pasar lokal yang jelas tetapi membutuhkan tata kelola sumber daya. Peternakan ayam petelur

dan pakan berbasis jagung memiliki peluang sebagai usaha pendukung jangka pendek karena pasar telur relatif rutin, namun membutuhkan analisis biaya pakan, kesehatan ternak, dan lokasi off-farm yang tepat. Tanaman obat, tanaman hias, dan jasa lingkungan memiliki potensi penting, namun membutuhkan data teknis, legalitas, dan pendampingan lebih kuat.

Tabel 4.17a Analisis SWOT Peternakan Ayam Petelur dan Pakan Ternak Berbasis Jagung

Aspek	Uraian
Strengths/Kekuatan	Permintaan telur relatif rutin untuk konsumsi rumah tangga; usaha dapat dimulai secara bertahap pada skala kecil; melibatkan perempuan dan pemuda; kotoran ternak dapat diolah menjadi kompos untuk jagung, pekarangan, atau pembibitan.
Weaknesses/Kelemahan	Belum tercantum spesifik dalam RKPS; membutuhkan modal awal untuk kandang dan bibit ayam petelur; biaya pakan menjadi komponen terbesar; pengetahuan formulasi pakan, kesehatan ternak, dan pencatatan produksi masih perlu diperkuat.
Opportunities/Peluang	Telur memiliki pasar harian di desa dan kecamatan; jagung dapat dikembangkan sebagai bahan pakan lokal; peluang kemitraan dengan dinas peternakan/pertanian, BUMDes, CSR, dan pasar lokal; mendukung ketahanan pangan desa.
Threats/Ancaman	Penyakit ternak, fluktuasi harga telur dan pakan, kegagalan tanam jagung, bau/limbah kandang, konflik lokasi kandang, serta risiko usaha jika skala diperbesar tanpa perhitungan biaya dan pasar.

Sumber: Analisis penyusun.

SWOT tersebut menunjukkan bahwa ayam petelur dan pakan berbasis jagung layak diposisikan sebagai peluang cepat untuk memperkuat pendapatan rumah tangga, namun harus dikelola secara off-farm, bertahap, dan disiplin pada aspek kesehatan ternak, biaya pakan, serta pengelolaan limbah. Usaha ini tidak menggantikan komoditas utama Hutan Desa, tetapi melengkapi portofolio ekonomi masyarakat agar lebih tahan terhadap fluktuasi musim dan pasar HHBK.

4.8 Analisis Rantai Nilai Komoditas Unggulan

Analisis rantai nilai digunakan untuk melihat alur kegiatan dari hulu sampai hilir. Rantai nilai penting karena banyak usaha perhutanan sosial gagal berkembang bukan karena tidak memiliki bahan baku, tetapi karena nilai tambah berhenti pada penjualan bahan mentah atau produk sederhana. Dengan memahami rantai nilai, LPHD dan KUPS dapat mengetahui titik mana yang perlu diperkuat, siapa pelakunya, apa masalahnya, dan dukungan apa yang dibutuhkan.

Tabel 4.18 Rantai Nilai Rotan dan Kerajinan Rotan

Rantai Nilai	Pelaku Utama	Masalah Utama	Kebutuhan Penguatan
Pemetaan dan budidaya rotan	LPHD, KUPS Rotan, KPHL	Data sebaran dan stok belum lengkap; budidaya masih terbatas	Pemetaan blok rotan, aturan panen, demplot budidaya rotan

Panen dan pengumpulan	Anggota KUPS, pemungut rotan	Panen belum seragam; risiko overharvest; akses lokasi sulit	SOP panen selektif, jadwal panen, pencatatan volume
Sortasi dan pengeringan	KUPS, rumah tangga perajin	Mutu bahan tidak seragam; fasilitas pengeringan terbatas	Rak pengering, tempat simpan, standar kualitas bahan
Produksi kerajinan	Perajin, kelompok perempuan	Desain terbatas; finishing belum standar	Pelatihan desain, finishing, standar ukuran, kontrol kualitas
Pemasaran	KUPS, LPHD, mitra dagang	Pasar lokal terbatas; branding lemah	Katalog, merek, pameran, toko oleh-oleh, pemasaran digital

Sumber: Analisis penyusun.

Tabel 4.19 Rantai Nilai Madu Kelulut

Rantai Nilai	Pelaku Utama	Masalah Utama	Kebutuhan Penguatan
Penyediaan habitat dan pakan	LPHD, KUPS Madu, masyarakat	Vegetasi pakan perlu dijaga; lokasi stup belum dipetakan	Tanaman pakan lebah, lokasi stup, perlindungan vegetasi berbunga
Budidaya koloni	KUPS Madu, rumah tangga	Teknik pemeliharaan belum seragam	Pelatihan budidaya, SOP, pencatatan stup dan produksi
Panen	Anggota KUPS	Panen belum sepenuhnya higienis; peralatan terbatas	Alat panen, saringan, wadah food grade, pelatihan panen
Pengemasan	KUPS, LPHD	Kemasan dan label belum kuat	Botol standar, label, PIRT/halal, informasi produk
Pemasaran	KUPS, LPHD, mitra	Pasar terbatas dan belum ada branding kuat	Branding Madu Gambut Katimpun, media sosial, toko oleh-oleh

Sumber: Analisis penyusun.

Tabel 4.20 Rantai Nilai Perikanan Rawa

Rantai Nilai	Pelaku Utama	Masalah Utama	Kebutuhan Penguatan
Pengelolaan habitat ikan	LPHD, KUPS Perikanan, masyarakat	Belum ada data stok ikan dan zona pemijahan	Kajian stok ikan, aturan lokal alat tangkap, perlindungan zona pemijahan
Penangkapan/ budidaya	Nelayan, KUPS Perikanan	Produksi musiman; budidaya belum kuat	Pelatihan budidaya, keramba, manajemen pakan
Pascapanen	Rumah tangga, kelompok usaha	Penyimpanan dan higienitas terbatas	Boks ikan, pelatihan olahan ikan, sanitasi

Pengolahan	KUPS, UMKM desa	Produk olahan belum berkembang	Ikan asap, ikan asin, abon, kerupuk, kemasan sederhana
Pemasaran	KUPS, pedagang, rumah makan	Pasar masih lokal dan harga fluktuatif	Jaringan rumah makan, pasar desa, branding ikan rawa Katimpun

Sumber: Analisis penyusun.

Tabel 4.20a Rantai Nilai Peternakan Ayam Petelur dan Pakan Ternak Berbasis Jagung

Rantai Nilai	Pelaku Utama	Masalah Utama	Kebutuhan Penguatan
Penyiapan lokasi dan kandang	Kelompok ternak, rumah tangga, pemerintah desa	Lokasi harus tidak mengganggu permukiman dan tidak berada pada ruang perlindungan; desain kandang perlu memperhatikan sanitasi	Penetapan lokasi off-farm, desain kandang sederhana, drainase kandang, tempat penampungan kotoran
Pengadaan bibit ayam petelur	Kelompok ternak, penyedia bibit, dinas peternakan	Kualitas bibit menentukan produktivitas; risiko penyakit dan kematian awal	Pemilihan bibit/pullet sehat, vaksinasi, karantina awal, pendampingan teknis
Produksi pakan berbasis jagung	Kelompok tani jagung, kelompok ternak, BUMDes/KUPS	Jagung belum menjamin pakan lengkap; perlu formulasi dengan dedak, protein, mineral, dan bahan lain	Demplot jagung non-kawasan hutan, pelatihan formulasi pakan, alat giling/pencampur, pencatatan biaya pakan
Pemeliharaan dan produksi telur	Kelompok ternak, rumah tangga pengelola kandang	Butuh kedisiplinan pakan, air, kebersihan, pencatatan telur, dan pengendalian penyakit	SOP pemeliharaan, biosecurity, jadwal pakan, catatan produksi harian, supervisi teknis
Pascapanen dan pemasaran telur	Kelompok ternak, pedagang lokal, warung, pasar desa	Harga telur fluktuatif; telur perlu disortir dan dipasarkan rutin	Sortasi ukuran, kemasan rak/pack, pelanggan tetap, kerja sama warung dan pasar lokal
Pengelolaan limbah kandang	Kelompok ternak, kelompok tani jagung/pembibitan	Kotoran ternak dapat menimbulkan bau dan komplain jika tidak dikelola	Pengomposan, pemanfaatan untuk jagung/pekarangan/persediaan, aturan kebersihan kandang

Sumber: Analisis penyusun.

Tabel 4.21 Rantai Nilai Tanaman Obat, Tanaman Hias, dan Jamur

Rantai Nilai	Pelaku Utama	Masalah Utama	Kebutuhan Penguatan
Inventarisasi jenis	LPHD, KUPS, KPHL, mitra teknis	Jenis dan stok belum terdokumentasi rinci	Survei jenis, dokumentasi nama lokal-ilmiah, peta sebaran
Budidaya/pe ngumpulan	KUPS HHBK, masyarakat	Potensi overharvest jika hanya ambil dari alam	SOP panen, kebun budidaya, rumah tanaman
Pengolahan	Kelompok rumah tangga, KUPS	Teknik pengeringan dan pengolahan terbatas	Pelatihan simplisia, jamu, produk edukasi, sanitasi
Legalitas dan kemasan	KUPS, pemerintah desa, dinas	Regulasi tanaman hias/herbal perlu diperhatikan	Pendampingan izin, label, standar mutu, kerja sama instansi
Pemasaran	KUPS, UMKM, wisata edukasi	Pasar khusus belum terbentuk	Integrasi dengan wisata, toko oleh-oleh, katalog produk

Sumber: Analisis penyusun.

Tabel 4.22 Rantai Nilai Jasa Lingkungan dan Ekowisata

Rantai Nilai	Pelaku Utama	Masalah Utama	Kebutuhan Penguatan
Penguatan dasar kawasan	LPHD, KPHL, KUPS Jasa Lingkungan	Data tata air, karbon, dan biodiversitas belum lengkap	Patroli, monitoring TMA, dokumentasi, peta kerja, data baseline
Penataan atraksi	LPHD, pemuda, mitra wisata	Belum ada jalur dan paket wisata	Survei jalur, SOP keselamatan, papan interpretasi
Layanan wisata	Pemandu lokal, pemilik perahu, rumah tangga	Pemandu dan fasilitas belum siap	Pelatihan pemandu, perahu aman, life jacket, homestay sederhana
Pemasaran wisata	LPHD, KUPS, mitra	Belum ada promosi dan paket harga	Brosur, media sosial, kerja sama sekolah/kampus/operator wisata
Skema jasa karbon/tata air	LPHD, KPHL, mitra teknis	Membutuhkan baseline, MRV, dan kemitraan khusus	Kajian teknis, kerja sama carbon developer/konservasi, dokumen kelola

Sumber: Analisis penyusun.

Dari seluruh rantai nilai tersebut, titik lemah umum berada pada empat aspek: pertama, data sumber daya dan pencatatan produksi belum kuat; kedua, pengolahan dan standar mutu produk belum seragam; ketiga, pemasaran masih terbatas dan belum dilakukan secara kolektif; keempat, untuk usaha peternakan, biaya pakan dan kesehatan ternak menjadi faktor penentu kelayakan. Oleh karena itu, intervensi program sebaiknya tidak hanya memberi bantuan alat,

tetapi juga memperkuat SOP, pencatatan produksi, kualitas produk, kelembagaan usaha, formulasi pakan, manajemen kandang, dan akses pasar.

4.9 Analisis Pasar Awal dan Nilai Tambah Produk

Analisis pasar awal dilakukan dengan melihat bentuk produk, harga indikatif, dan peluang nilai tambah. Angka yang disajikan pada bagian ini bersumber dari rencana pengembangan usaha dalam RKPS dan harus dipahami sebagai indikasi awal, bukan hasil analisis finansial final. Angka tersebut belum menghitung biaya produksi, biaya tenaga kerja, transportasi, kemasan, penyusutan alat, risiko gagal panen, dan margin pemasaran.

Tabel 4.23 Indikasi Produk, Harga, dan Pendapatan Bruto Rencana Usaha

Komoditas	Volume Indikatif	Bentuk Produk	Harga Indikatif	Pendapatan Bruto Indikatif
Ikan papuyu/betok	60 kg/tahun	Ikan hidup/segar	Rp30.000/kg	Rp1.800.000/tahun
Ikan lele	100 kg/tahun	Ikan hidup/segar	Rp20.000/kg	Rp2.000.000/tahun
Ikan gabus/haruan	100 kg/tahun	Ikan hidup/segar	Rp30.000/kg	Rp3.000.000/tahun
Madu kelulut	30 liter/tahun	Botol 200 ml	Rp50.000/botol	Rp7.500.000/tahun
Ayam kampung	100 kg/tahun	Ayam hidup/daging	Rp70.000/kg	Rp7.000.000/tahun
Rotan/anyaman tas rotan	2.000 buah/tahun	Tas rotan/anyaman	Rp60.000/buah	Rp120.000.000/tahun
Nipah/aren	2.500 kg/tahun	Gula aren	Rp25.000/kg	Rp62.500.000/tahun
Telur ayam konsumsi	Belum ditetapkan; usulan skala awal perlu dihitung	Telur konsumsi	Mengikuti harga pasar lokal	Perlu analisis rencana usaha
Pakan ternak berbasis jagung	Belum ditetapkan; bahan pakan sebagian dari jagung lokal	Jagung pipil/pakan campuran sederhana	Perlu survei harga dan biaya formulasi	Perlu analisis biaya produksi

Sumber: Diolah dari rencana pengembangan usaha dalam RKPS LPHD Katimpun 2025-2034; baris ayam petelur dan pakan jagung merupakan usulan tambahan hasil Wawancara. Angka bersifat indikatif dan belum memperhitungkan biaya.

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa produk rotan/anyaman dan gula aren memiliki nilai pendapatan bruto indikatif paling besar dalam dokumen rencana. Sementara itu, ayam petelur dan pakan berbasis jagung belum memiliki angka produksi dalam RKPS sehingga perlu disusun rencana usaha tersendiri sebelum dijalankan. Angka pendapatan bruto tidak dapat langsung dianggap sebagai keuntungan karena belum menghitung biaya bahan, tenaga kerja, pakan, bibit, kandang, transportasi, kemasan, penyusutan alat, risiko gagal panen, dan margin pemasaran. Karena itu, analisis finansial rinci tetap diperlukan sebelum peningkatan skala usaha.

Tabel 4.24 Peluang Peningkatan Nilai Tambah Produk

Produk Awal	Kelemahan Jika Dijual Mentah	Nilai Tambah yang Disarankan	Pasar Potensial
Ikan segar	Mudah rusak, harga fluktuatif	Ikan asap, ikan asin, abon, kerupuk ikan, kuliner lokal	Pasar desa, rumah makan, toko oleh-oleh
Madu cair curah	Rentan dianggap tidak standar dan sulit dipercaya pasar	Madu botol berlabel, kemasan 200 ml, paket gift, narasi madu gambut	Toko oleh-oleh, pameran, pasar kesehatan, penjualan daring
Rotan bahan baku	Nilai rendah jika hanya dijual bahan	Tas, keranjang, souvenir, dekorasi, produk desain modern	Pameran, wisata, UMKM, toko kerajinan, online
Tanaman obat segar	Cepat rusak dan sulit masuk pasar formal	Simplicia kering, minuman herbal, paket edukasi tanaman obat	Pasar lokal, wisata edukasi, toko herbal
Tanaman hias liar	Risiko legal dan ekologis	Budidaya legal, rumah tanaman, paket edukasi flora	Wisata edukasi, kolektor legal, sekolah/kampus
Bibit tanaman gambut	Butuh standar agar diterima program	Bibit bersertifikat/berstandar kelompok, paket restorasi	KPHL, CSR, NGO, program rehabilitasi
Jasa lingkungan	Belum langsung menghasilkan uang tanpa data	Paket edukasi, wisata terbatas, data konservasi, baseline karbon	Kampus, sekolah, mitra konservasi, wisata minat khusus
Telur curah tanpa sortasi	Harga mengikuti pasar harian dan mutu tidak terdiferensiasi	Telur sortir ukuran, kemasan rak/pack, langganan warung/pasar, paket pangan lokal	Warung desa, pasar kecamatan, rumah tangga, kegiatan pelatihan/kunjungan
Jagung pipil bahan pakan	Nilai rendah jika hanya dijual bahan mentah dan rentan kualitas turun saat penyimpanan	Pakan campuran sederhana untuk ayam, jagung giling, formulasi pakan kelompok	Unit peternakan desa, kelompok ayam petelur, rumah tangga peternak

Sumber: Analisis penyusun.

4.10 Risiko Ekologis dan Prinsip Pengamanan Usaha

Pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun harus memperhatikan risiko ekologis karena kawasan berada pada ekosistem rawa gambut yang rentan terhadap kebakaran dan gangguan hidrologi. Laporan kegiatan pencegahan kebakaran menunjukkan bahwa kawasan dan desa sekitar pernah mengalami kebakaran besar, antara lain pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019. Riwayat ini menjadi pengingat bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh meningkatkan risiko kekeringan, pembukaan lahan, dan kebakaran.

Dalam kerangka studi potensi, risiko ekologis perlu dipandang sebagai bagian dari analisis peluang usaha. Usaha yang tampak menguntungkan tetapi merusak gambut akan melemahkan basis ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, usaha yang menjaga tutupan vegetasi, menjaga air, memperkuat kelembagaan patroli, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dapat memperkuat keberlanjutan Hutan Desa.

Tabel 4.25 Risiko Utama dan Prinsip Mitigasi Pengembangan Usaha

Risiko	Komoditas/Kegiatan Terdampak	Dampak Potensial	Prinsip Mitigasi
Kebakaran gambut	Rotan, madu, tanaman obat, perikanan, jasa lingkungan	Kehilangan bahan baku, rusaknya habitat, gagal usaha	Patroli, tabat kanal, pemantauan hotspot, larangan bakar, kesiapan alat pemadam
Pengeringan gambut	Agroforestry, perikanan, jasa tata air	Penurunan muka air, kebakaran, produktivitas turun	Menjaga kanal, tabat, monitoring tinggi muka air, tidak membuat drainase baru
Panen berlebih	Rotan, tanaman obat, tanaman hias, jamur	Stok menurun dan kehilangan biodiversitas	SOP panen, kuota, rotasi panen, budidaya, pencatatan volume
Ketidakjelasan ruang pemanfaatan	Semua kegiatan on-farm	Konflik lokasi dan risiko melanggar fungsi perlindungan	Peta ruang perlindungan/pemanfaatan, berita acara, persetujuan LPHD-KPHL
Gangguan satwa liar	Ekowisata, agroforestry, perikanan	Konflik satwa-manusia dan gangguan habitat	Aturan kunjungan, zona tenang, edukasi, larangan perburuan
Produk tidak memenuhi standar	Madu, herbal, ikan olahan, kerajinan	Sulit masuk pasar dan menurunkan kepercayaan pembeli	SOP produksi, pelatihan mutu, kemasan, label, izin produk
Kelembagaan lemah	Semua usaha KUPS	Pembagian manfaat tidak adil, konflik internal, usaha tidak berlanjut	AD/ART, pembukuan, rapat rutin, mekanisme bagi hasil, audit sederhana
Penyakit ternak dan sanitasi kandang	Ayam petelur, ayam kampung	Kematian ternak, penurunan produksi telur, bau kandang, komplain warga	Biosecurity, vaksinasi/pendampingan teknis, kebersihan kandang, jarak kandang yang aman, pengelolaan limbah
Kenaikan biaya pakan	Ayam petelur dan pakan berbasis jagung	Biaya produksi meningkat dan margin usaha menurun	Tanam jagung di lahan non-hutan, formulasi pakan efisien, pembelian bahan pakan kolektif, pencatatan biaya pakan
Pembukaan lahan tidak sesuai	Tanam jagung untuk pakan	Risiko bertentangan dengan fungsi Hutan Lindung dan meningkatkan gangguan gambut	Jagung hanya pada lahan non-kawasan hutan/pekarangan/lahan desa yang sudah tersedia, tanpa bakar dan tanpa drainase baru

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan data RKPS dan laporan pencegahan karhutla LPHD Katimpun.

4.11 Implikasi Hasil Identifikasi terhadap Prioritas Pengembangan

Hasil identifikasi potensi dan peluang usaha menunjukkan bahwa Hutan Desa Katimpun memiliki basis ekonomi yang cukup beragam, tetapi pengembangannya perlu dilakukan bertahap. Tidak semua potensi harus dikembangkan sekaligus. Prioritas perlu dipilih berdasarkan kesiapan sumber daya, kesiapan KUPS, risiko ekologis, dan peluang pasar. Bab V selanjutnya dapat menggunakan hasil identifikasi ini untuk menyusun ranking prioritas dan tahapan pengembangan usaha.

Tabel 4.26 Implikasi Potensi terhadap Arah Prioritas Bab V

Kelompok Usaha	Kesiapan Umum	Arah Prioritas	Alasan
Rotan dan kerajinan	Relatif paling siap	Prioritas awal-jangka menengah	KUPS ada, keterampilan ada, rencana produk dan harga jelas, nilai tambah tinggi
Madu kelulut	Cukup siap dengan penguatan	Prioritas awal-jangka menengah	Ramah lingkungan, KUPS ada, pasar madu potensial, perlu mutu dan kemasan
Perikanan rawa	Cukup siap dengan tata kelola	Prioritas awal-jangka menengah	Masyarakat mengenal ikan, pasar konsumsi jelas, perlu aturan tangkap dan olahan
Tanaman obat dan tanaman hias	Perlu penguatan teknis	Prioritas menengah	Potensi ada, tetapi memerlukan inventarisasi, budidaya, legalitas, dan pasar khusus
Pembibitan dan agroforestry	Perlu perencanaan tapak dan pemeliharaan	Prioritas menengah-panjang	Sejalan dengan rehabilitasi, pengayaan jenis, dan komoditas jangka panjang
Jasa lingkungan dan ekowisata	Belum siap penuh	Prioritas jangka panjang	Membutuhkan data baseline, SOP, pemandu, fasilitas, dan kemitraan teknis
Ayam kampung/peternakan	Usaha pendukung	Pendukung ekonomi rumah tangga/off-farm	Dapat mendukung pangan dan pendapatan tetapi bukan inti pemanfaatan Hutan Lindung
Ayam petelur dan pakan jagung	Usaha pendukung jangka pendek	Pendukung ekonomi rumah tangga/off-farm	Memberikan pendapatan lebih rutin dari telur, memperkuat pangan lokal, dan dapat memanfaatkan jagung sebagai bahan pakan lokal tanpa menambah tekanan terhadap Hutan Desa

Sumber: Analisis penyusun.

Dari tabel tersebut, Bab V sebaiknya menempatkan rotan, madu kelulut, dan perikanan sebagai prioritas awal yang dapat segera diperkuat. Ayam petelur dan pakan berbasis jagung dapat ditempatkan sebagai usaha pendukung jangka pendek/off-farm untuk memperkuat pendapatan rutin dan ketahanan pangan, sepanjang lokasinya berada di luar ruang perlindungan Hutan Desa serta tidak mendorong pembukaan hutan. Tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, dan agroforestry dapat ditempatkan sebagai prioritas menengah. Jasa lingkungan dan ekowisata perlu dipersiapkan sebagai prioritas jangka panjang. Dengan demikian, Bab IV ini tidak hanya

menjelaskan potensi, tetapi juga memberikan dasar analitis bagi penyusunan strategi pada bab berikutnya.

4.12 Data yang Perlu Diverifikasi dan Diperkuat

Agar hasil studi dapat digunakan sebagai dasar pengembangan usaha yang lebih akurat, beberapa data masih perlu diperkuat melalui pengumpulan data lapangan lanjutan. Kebutuhan verifikasi data ini penting karena sebagian angka pada dokumen RKPS dan hasil studi awal masih bersifat rencana atau indikatif.

Tabel 4.27 Kebutuhan Verifikasi Data Lanjutan

Data yang Dibutuhkan	Komoditas Aspek	Tujuan Verifikasi	Metode yang Disarankan
Peta sebaran dan stok rotan	Rotan	Menentukan kuota panen dan lokasi budidaya	Survei transek, pemetaan partisipatif, GPS
Produksi aktual madu per stup	Madu kelulut	Menentukan target realistis dan biaya produksi	Buku produksi, monitoring stup, pencatatan panen
Data stok dan musim ikan	Perikanan	Menghindari tangkap berlebih dan menentukan musim panen	Wawancara nelayan, catatan tangkap, survei perairan
Daftar jenis tanaman obat dan hias	Tanaman obat/hias	Memastikan jenis aman, legal, dan layak dikembangkan	Inventarisasi jenis, dokumentasi foto, validasi ahli
Biaya dan margin produk	Semua usaha	Menyusun analisis finansial dan kelayakan usaha	Pencatatan biaya, harga, tenaga kerja, margin
Baseline jasa lingkungan	Karbon, tata air, ekowisata	Menyiapkan skema jasa lingkungan jangka panjang	Peta tutupan lahan, TMA, data kebakaran, biodiversitas
Kesiapan kelembagaan KUPS	LPHD/KUPS	Menentukan kebutuhan pendampingan	Audit sederhana administrasi, pembukuan, SOP, rapat
Skala usaha, biaya pakan, produksi telur, dan pasar lokal	Ayam petelur dan pakan jagung	Menentukan kelayakan usaha jangka pendek dan kebutuhan modal awal	Survei harga telur, survei harga pakan/jagung, pencatatan uji coba 1-3 bulan, analisis usaha sederhana
Kesesuaian lokasi tanam jagung dan kandang	Ayam petelur/pakan jagung	Memastikan usaha tidak bertentangan dengan fungsi Hutan Lindung dan tidak menimbulkan konflik sosial	Pemetaan lahan non-kawasan, konsultasi pemerintah desa, pengecekan akses air, jarak kandang, dan kesepakatan kelompok

Sumber: Analisis penyusun.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Hutan Desa Katimpun memiliki potensi sumber daya alam dan peluang usaha yang cukup beragam. Potensi utama tidak terletak pada hasil hutan kayu, melainkan pada hasil hutan bukan kayu, perikanan rawa, pembibitan dan pengayaan jenis

gambut, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, dan ekowisata terbatas. Arah ini sesuai dengan status Hutan Desa Katimpun sebagai kawasan Hutan Lindung rawa gambut yang harus dikelola secara hati-hati.

Komoditas yang paling menonjol untuk dikembangkan adalah rotan dan kerajinan anyaman, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan tanaman gambut, aren/gula aren, serta jasa lingkungan. Rotan memiliki potensi nilai tambah tinggi dan didukung KUPS Pengrajin Rotan. Madu kelulut memiliki peluang sebagai produk ramah lingkungan yang sejalan dengan konservasi. Perikanan memiliki kedekatan dengan mata pencaharian masyarakat. Tanaman obat, tanaman hias, dan jamur memiliki potensi sebagai produk lokal dan edukasi, tetapi memerlukan kehati-hatian legal dan ekologis. Pembibitan dan agroforestry penting untuk rehabilitasi sekaligus ekonomi jangka menengah. Jasa lingkungan dan ekowisata merupakan peluang jangka panjang yang perlu disiapkan melalui data, SOP, kelembagaan, dan kemitraan. Di luar komoditas utama RKPS, ayam petelur dan pakan ternak berbasis jagung dapat ditambahkan sebagai usaha pendukung jangka pendek yang bersifat off-farm untuk memperkuat pendapatan rutin, pangan lokal, dan diversifikasi ekonomi masyarakat.

Secara umum, pengembangan potensi Hutan Desa Katimpun harus dilakukan secara bertahap. Tahap awal dapat difokuskan pada usaha yang paling dekat dengan kapasitas masyarakat, yaitu rotan, madu kelulut, perikanan, serta usaha pendukung off-farm seperti ayam petelur dan pakan berbasis jagung. Tahap menengah diarahkan pada pengolahan produk, pembibitan, tanaman obat, tanaman hias, agroforestry, dan peningkatan kapasitas pemasaran. Tahap panjang diarahkan pada jasa lingkungan, karbon, tata air, ekowisata, dan ekonomi hijau berbasis konservasi gambut. Keseluruhan proses pengembangan harus memperkuat LPHD dan KUPS, menjaga fungsi ekologis kawasan, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

BAB V

PRIORITAS PENGEMBANGAN USAHA

Setelah potensi Hutan Desa Katimpun diuraikan melalui komoditas hasil hutan bukan kayu, perikanan rawa, agroforestry/paludikultur, pembibitan tanaman gambut, jasa lingkungan, ekowisata, serta usaha pendukung off-farm, maka Bab V menetapkan prioritas pengembangan yang lebih terarah, bertahap, dan realistis. Prioritas ini disusun agar LPHD Katimpun, KUPS, Pemerintah Desa, KPHL Kapuas Kahayan, dan mitra pendamping memiliki dasar yang sama dalam menentukan kegiatan yang perlu dikuatkan terlebih dahulu.

Penyusunan prioritas tidak dimaksudkan untuk menutup peluang komoditas lain, tetapi untuk menghindari pengembangan usaha yang terlalu menyebar, tidak terkelola, dan berisiko terhadap kawasan. Hutan Desa Katimpun berada pada fungsi Hutan Lindung rawa gambut, sehingga setiap usaha perlu memperhatikan prinsip perlindungan tata air, pencegahan kebakaran, pemanfaatan non-kayu, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, prioritas pengembangan usaha harus menggabungkan kepentingan ekonomi, ekologi, sosial, dan kelembagaan secara seimbang.

5.1 Kedudukan Prioritas Pengembangan Usaha

Bab II menegaskan bahwa Hutan Desa Katimpun merupakan kawasan Hutan Lindung rawa gambut seluas sekitar 2.642 ha dengan modal utama berupa fungsi ekologis, LPHD, KUPS, serta masyarakat yang memiliki hubungan kuat dengan sumber daya hutan dan lahan basah. Bab IV kemudian mengidentifikasi berbagai potensi usaha, termasuk rotan, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry, jasa lingkungan, ekowisata, dan usaha pendukung off-farm seperti ayam petelur yang dapat disandingkan dengan pembuatan pakan berbasis jagung.

Dengan dasar tersebut, Bab V berfungsi sebagai bab pengambilan keputusan awal. Potensi yang telah ditemukan tidak langsung dianggap sama pentingnya, melainkan disusun dalam urutan prioritas berdasarkan kesiapan, manfaat, risiko, dan kebutuhan penguatan. Hasil prioritas ini menjadi jembatan menuju Bab VI Rekomendasi dan Tindak Lanjut, yaitu bagian yang menerjemahkan prioritas menjadi program, pihak pelaksana, kebutuhan dukungan, dan indikator keberhasilan.

Tabel 5.1 Hubungan Identifikasi Potensi dan Arah Prioritas

Sumber Analisis	Temuan Utama	Implikasi Prioritas
Wilayah	HD Katimpun berada pada kawasan Hutan Lindung rawa gambut dengan luas sekitar 2.642 ha; memiliki LPHD dan KUPS; terdapat risiko karhutla dan kebutuhan penguatan kelembagaan.	Prioritas usaha harus ramah gambut, tidak mendorong eksploitasi kayu, memperkuat LPHD/KUPS, dan menekan risiko kebakaran.
Potensi	Potensi utama meliputi rotan, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry, jasa lingkungan, ekowisata, serta usaha off-farm ayam petelur dan pakan jagung.	Komoditas perlu diklasifikasikan menjadi prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan kesiapan dan risiko.

Kebutuhan	Rekomendasi membutuhkan dasar prioritas yang jelas agar program tidak terlalu umum.	Bab V harus menghasilkan roadmap, penguatan kelembagaan, kemitraan, dan indikator yang operasional.
-----------	---	---

Sumber: Diolah

5.2 Prinsip Dasar Penetapan Prioritas

Penetapan prioritas pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini penting karena kawasan berada pada fungsi Hutan Lindung dan ekosistem gambut yang sensitif terhadap drainase, kebakaran, perubahan tutupan lahan, dan gangguan habitat. Pengembangan usaha harus menempatkan perlindungan kawasan sebagai fondasi, bukan sebagai syarat tambahan setelah usaha berjalan.

Prinsip pengembangan usaha juga menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. LPHD berperan sebagai payung pengelolaan kawasan dan pengarah pemanfaatan, sedangkan KUPS menjadi unit pelaksana usaha sesuai komoditas. Pemerintah Desa, KPHL, dinas teknis, mitra konservasi, perguruan tinggi, dan sektor usaha berperan sebagai pendukung sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, prioritas usaha dipilih berdasarkan kemungkinan paling realistis untuk dijalankan, manfaat ekonomi yang dapat dirasakan, serta keamanan ekologisnya.

Tabel 5.2 Prinsip Pengembangan Usaha Hutan Desa Katimpun

Prinsip	Makna dalam Pengembangan Usaha	Implikasi Praktis
Sesuai fungsi Hutan Lindung	Usaha tidak boleh mengubah fungsi utama kawasan dan tidak diarahkan pada eksploitasi kayu.	Memprioritaskan HHBK, jasa lingkungan, rehabilitasi, agroforestry/paludikultur yang sesuai, dan usaha off-farm.
Ramah gambut dan tanpa bakar	Kegiatan tidak boleh mengeringkan gambut, membuka lahan dengan api, atau menambah risiko karhutla.	Semua kegiatan on-farm memerlukan peta lokasi, SOP, dan pengawasan LPHD-KPHL.
Berbasis kelembagaan	Usaha dijalankan melalui LPHD, KUPS, kelompok perempuan/pemuda, atau unit usaha desa yang jelas.	Perlu pembukuan, AD/ART, SOP, pembagian peran, dan mekanisme bagi hasil.
Bertahap dan realistis	Tidak semua potensi dikembangkan sekaligus; dimulai dari yang paling siap.	Prioritas awal difokuskan pada rotan, madu, perikanan, dan usaha pendukung off-farm.
Meningkatkan nilai tambah	Masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi memperkuat pengolahan, kemasan, dan pasar.	Perlu rumah produksi, pelatihan mutu, branding, dan promosi.

Membangun kemitraan	Beberapa usaha membutuhkan dukungan pasar, teknologi, pembiayaan, dan data teknis.	Perlu MoU/kerja sama dengan KPHL, dinas, mitra konservasi, perguruan tinggi, dan offtaker.
---------------------	--	--

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan karakter HD Katimpun sebagai Hutan Lindung rawa gambut.

5.3 Kriteria dan Pembobotan Prioritas Pengembangan Usaha

Prioritas usaha ditentukan melalui analisis multi-kriteria. Kriteria yang digunakan mencerminkan hubungan antara aspek ekologis, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan pasar. Setiap komoditas dinilai secara kualitatif berdasarkan hasil identifikasi pada Bab IV dan konteks kawasan pada Bab II. Pembobotan digunakan sebagai alat bantu perencanaan, bukan sebagai keputusan final. Nilai akhir perlu diperkuat melalui data lapangan lanjutan, rencana usaha KUPS, dan musyawarah LPHD bersama para pihak.

Tabel 5.3 Kriteria dan Bobot Penilaian Prioritas Usaha

Kriteria	Bobot (%)	Indikator Penilaian	Makna dalam Prioritas
Kesesuaian ekologis dan legal	20	Sesuai Hutan Lindung, tidak merusak gambut, tidak membuka lahan dengan api, tidak mengambil jenis dilindungi secara liar.	Menjadi saringan utama; usaha yang berisiko ekologis tinggi tidak menjadi prioritas awal.
Kesiapan sumber daya	15	Ketersediaan bahan baku, potensi produksi, lokasi, musim, dan peluang budidaya.	Menilai apakah usaha dapat berjalan berkelanjutan.
Kesiapan masyarakat dan KUPS	15	Keterampilan, jumlah pelaku, minat masyarakat, pengalaman produksi, dan keberadaan KUPS.	Menentukan kecepatan implementasi.
Nilai ekonomi dan nilai tambah	15	Harga, peluang pengolahan, produk turunan, potensi pasar lokal dan luar desa.	Menentukan potensi peningkatan pendapatan.
Kemudahan implementasi	10	Teknologi, modal awal, alat, waktu persiapan, dan kemudahan pendampingan.	Menentukan apakah usaha cocok untuk jangka pendek.
Risiko usaha dan lingkungan	10	Karhutla, penyakit, pasar, regulasi, perubahan iklim, overharvest, dan konflik akses.	Menentukan kebutuhan mitigasi.

Potensi kemitraan	10	Dukungan KPHL, dinas, mitra konservasi, perguruan tinggi, CSR, offtaker, dan pasar.	Menilai peluang percepatan pengembangan.
Dampak sosial dan inklusi	5	Peluang pelibatan perempuan, pemuda, rumah tangga miskin, dan kelompok rentan.	Menilai manfaat sosial dan pemerataan.

Sumber: Analisis penyusun.

Tabel 5.4 Kategori Nilai Prioritas

Nilai Akhir	Kategori	Arah Pengembangan
80-100	Prioritas utama	Dikembangkan pada tahap awal dengan penguatan cepat, pendampingan intensif, dan target hasil 0-2 tahun.
65-79	Prioritas penguatan	Dikembangkan bertahap setelah kesiapan teknis, pasar, atau kelembagaan diperkuat.
50-64	Potensi menengah	Dikembangkan sebagai pelengkap atau demplot, belum menjadi komoditas utama.
<50	Potensi jangka panjang/indikatif	Memerlukan data teknis, legalitas, investasi, atau kemitraan khusus sebelum dikembangkan.

Sumber: Analisis penyusun.

5.4 Hasil Penilaian Prioritas Usaha

Berdasarkan kriteria di atas, komoditas dan kegiatan usaha dalam Hutan Desa Katimpun dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkat prioritas. Rotan dan kerajinan rotan menjadi prioritas tertinggi karena memiliki KUPS, keterampilan masyarakat, peluang nilai tambah, serta pasar yang dapat diperluas. Madu kelulut dan perikanan rawa menempati prioritas awal karena dekat dengan kondisi masyarakat dan relatif sesuai dengan karakter gambut. Usaha ayam petelur dan pakan jagung ditempatkan sebagai prioritas jangka pendek pendukung karena tidak bergantung langsung pada pemanfaatan kawasan Hutan Lindung, tetapi dapat memperkuat arus kas rumah tangga dan ketahanan pangan desa.

Tanaman obat, tanaman hias, jamur, pembibitan tanaman gambut, agroforestry, dan paludikultur masuk dalam prioritas menengah karena memiliki potensi, tetapi memerlukan inventarisasi, teknik budidaya, standar mutu, dan kepastian pasar. Sementara itu, jasa lingkungan, karbon, tata air, dan ekowisata ditempatkan sebagai prioritas jangka panjang karena membutuhkan data dasar, SOP, SDM, infrastruktur, dan kemitraan teknis yang lebih kuat.

Tabel 5.5 Hasil Penilaian Indikatif Prioritas Usaha Hutan Desa Katimpun

Komoditas/Usaha	Nilai Indikatif	Kategori	Alasan Utama
Rotan dan kerajinan anyaman	85	Prioritas utama	KUPS dan keterampilan tersedia; nilai tambah tinggi; produk tahan simpan; cocok untuk pemberdayaan perempuan.
Madu kelulut	78	Prioritas penguatan	Usaha ramah lingkungan, KUPS tersedia, peluang pasar baik, tetapi produksi dan mutu perlu diperkuat.
Perikanan rawa dan olahan ikan	74	Prioritas penguatan	Dekat dengan mata pencaharian masyarakat dan pasar lokal, tetapi perlu tata kelola stok, budidaya, dan pascapanen.
Ayam petelur dan pakan jagung off-farm	72	Prioritas pendukung jangka pendek	Memberi arus kas rutin dari telur, mendukung pangan desa, dan tidak menekan kawasan jika ditempatkan di luar HD.
Pembibitan tanaman gambut	70	Prioritas penguatan	Sejalan dengan rehabilitasi dan pengayaan jenis asli; perlu persemaian, standar bibit, dan pasar program restorasi.
Tanaman obat dan produk herbal	66	Prioritas penguatan	Ada potensi jenis dan pengetahuan lokal, tetapi perlu inventarisasi, budidaya, standar mutu, dan legalitas.
Agroforestry/paludi kultur	65	Prioritas penguatan	Cocok untuk aren, cempedak, durian, rotan, dan tanaman lokal jika tapak sesuai; membutuhkan pemeliharaan jangka menengah.
Tanaman hias dan jamur hutan	60	Potensi menengah	Memiliki nilai edukasi dan pasar khusus, tetapi perlu kehati-hatian legal, identifikasi jenis, dan budidaya.
Ekowisata edukasi	55	Potensi jangka panjang	Atraksi potensial ada, tetapi SOP, pemandu, fasilitas, dan pasar wisata belum siap.
Jasa lingkungan/karbon/tata air	50	Potensi jangka panjang	Nilai ekologis tinggi, tetapi membutuhkan baseline, MRV, dokumentasi, dan mitra teknis.

Sumber: Analisis penyusun, nilai bersifat indikatif untuk perencanaan awal.

5.5 Prioritas Pengembangan Jangka Pendek (0-2 Tahun)

Prioritas jangka pendek diarahkan pada usaha yang paling realistis dijalankan dalam waktu dekat, menggunakan kapasitas masyarakat yang sudah ada, tidak membutuhkan teknologi terlalu rumit, serta dapat memberikan manfaat ekonomi lebih cepat. Empat kelompok usaha yang direkomendasikan untuk tahap awal adalah rotan dan kerajinan anyaman, madu kelulut, perikanan rawa dengan pengolahan sederhana, serta ayam petelur dan pakan jagung sebagai usaha pendukung off-farm.

5.5.1 Prioritas I: Rotan dan Kerajinan Anyaman

Rotan ditempatkan sebagai prioritas utama karena memiliki hubungan paling kuat antara potensi kawasan, kemampuan masyarakat, dan kelembagaan KUPS. KUPS Pengrajin Rotan Dare Jawet Katimpun menjadi modal sosial penting karena kegiatan ini melibatkan keterampilan masyarakat, terutama perempuan. Pada tahap awal, pengembangan rotan perlu difokuskan pada penguatan kualitas produk dan tata kelola bahan baku, bukan perluasan panen secara tidak terkendali.

Strategi jangka pendek untuk rotan adalah memperkuat pemetaan bahan baku, menyusun SOP panen selektif, meningkatkan kualitas pengolahan dan desain, membangun katalog produk, serta menyiapkan pemasaran kolektif. Dalam konteks Hutan Lindung rawa gambut, rotan harus dikembangkan sebagai HHBK lestari dan bukan sebagai alasan untuk membuka tutupan vegetasi. Budidaya rotan di lokasi yang sesuai perlu mulai disiapkan agar bahan baku tidak semata-mata bergantung pada alam.

Tabel 5.6 Rencana Prioritas Jangka Pendek Rotan dan Kerajinan Anyaman

Aspek	Program Prioritas	Output 0-2 Tahun	Pelaku Utama
Bahan baku	Pemetaan sebaran rotan dan penyusunan aturan panen selektif.	Peta indikatif lokasi rotan, daftar jenis rotan, dan SOP panen awal.	LPHD, KUPS Rotan, KPHL.
Produksi	Pelatihan desain, finishing, pengeringan, dan kontrol mutu.	Produk lebih seragam, rapi, dan siap dipasarkan.	KUPS Rotan, kelompok perempuan, dinas/mitra.
Fasilitas	Penguatan rumah produksi, rak pengering, alat kerja sederhana, dan tempat penyimpanan.	Ruang produksi dan penyimpanan lebih tertib.	KUPS, Pemdes, mitra program.
Pemasaran	Pembuatan katalog, label, merek, dan promosi digital.	Identitas produk Rotan Katimpun mulai terbentuk.	KUPS, LPHD, UMKM/Deperindag.
Kelembagaan	Pembukuan produksi, pembagian tugas, dan mekanisme bagi hasil.	KUPS lebih tertib dan siap menerima kemitraan pasar.	KUPS, LPHD, pendamping.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan hasil identifikasi Potensi

5.5.2 Prioritas II: Madu Kelulut dan Produk Turunan

Madu kelulut menjadi prioritas karena usahanya relatif ramah lingkungan dan secara langsung memberi insentif bagi masyarakat untuk menjaga vegetasi berbunga. Madu juga memiliki peluang pasar yang baik karena dikenal sebagai produk kesehatan alami. Namun, pengembangan madu membutuhkan penguatan teknis pada pemeliharaan koloni, panen higienis, standar mutu, kemasan, label, dan pencatatan produksi.

Pada tahap awal, usaha madu tidak perlu langsung ditargetkan skala besar. Fokus utama adalah menstabilkan koloni, memperbaiki teknik panen, memperkuat identitas produk, dan membangun kepercayaan pasar. Narasi produk dapat dikembangkan sebagai Madu Gambut Katimpun, yaitu produk yang menghubungkan manfaat ekonomi masyarakat dengan perlindungan ekosistem gambut.

Tabel 5.7 Rencana Prioritas Jangka Pendek Madu Kelulut

Aspek	Program Prioritas	Output 0-2 Tahun	Kehati-hatian
Koloni	Pendataan stup, kondisi koloni, lokasi pakan, dan musim panen.	Data awal produksi dan kesehatan koloni.	Tidak memindahkan koloni tanpa teknik yang benar.
Teknis budidaya	Pelatihan pemeliharaan, pengendalian hama, dan tanaman pakan lebah.	Budidaya lebih stabil dan produktif.	Vegetasi pakan harus dijaga.
Panen dan mutu	Pengadaan alat panen higienis, saringan, wadah food grade, dan pelatihan mutu.	Madu lebih bersih dan dipercaya konsumen.	Perlu kontrol kadar air dan kebersihan.
Produk	Kemasan botol kecil, label, tanggal produksi, informasi asal produk.	Produk siap dijual sebagai oleh-oleh/produk lokal.	Pengurusan PIRT/halal disiapkan bertahap.
Pemasaran	Branding Madu Gambut Katimpun dan promosi melalui jaringan desa, pameran, dan media sosial.	Pasar awal terbentuk.	Klaim manfaat kesehatan harus berhati-hati.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan Potensi.

5.5.3 Prioritas III: Perikanan Rawa dan Produk Olahan Ikan

Perikanan rawa menjadi prioritas karena masyarakat Desa Katimpun memiliki kedekatan dengan sungai, rawa, kanal, dan lahan basah. Usaha ini dapat dimulai dari penguatan perikanan tangkap yang sudah dikenal masyarakat, kemudian berkembang ke budidaya rawa/keramba secara bertahap. Dalam jangka pendek, perhatian utama adalah pengaturan alat tangkap, pencatatan hasil tangkap, penanganan pascapanen, dan pengolahan sederhana agar nilai tambah tidak hanya berasal dari penjualan ikan segar.

Pengembangan perikanan harus tetap memperhatikan fungsi ekologis rawa gambut. Penangkapan berlebih, alat tangkap merusak, atau budidaya yang tidak memperhatikan kualitas

air dapat menurunkan stok ikan dan merusak habitat. Karena itu, usaha perikanan perlu dikembangkan bersama aturan lokal dan pendampingan teknis.

Tabel 5.8 Rencana Prioritas Jangka Pendek Perikanan Rawa

Aspek	Program Prioritas	Output 0-2 Tahun	Pelaku Utama
Sumber daya	Pendataan lokasi tangkap, musim ikan, jenis ikan, dan alat tangkap.	Data awal stok dan musim perikanan.	KUPS Perikanan, nelayan, LPHD.
Aturan lokal	Penyusunan kesepakatan alat tangkap ramah lingkungan dan zona pemijahan.	Risiko tangkap berlebih berkurang.	LPHD, Pemdes, KUPS.
Produksi	Uji coba budidaya skala kecil dan pelatihan manajemen pakan.	Model budidaya awal yang sesuai rawa.	KUPS, Dinas Perikanan.
Pascapanen	Pelatihan pengolahan ikan asap, ikan asin, abon/kerupuk ikan.	Produk lebih tahan simpan dan bernilai tambah.	KUPS, kelompok perempuan, UMKM.
Pemasaran	Pemetaan pasar lokal, rumah makan, dan agenda kuliner desa.	Jaringan pasar awal terbentuk.	KUPS, Pemdes, pelaku pasar.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan Potensi.

5.5.4 Prioritas Pendukung Jangka Pendek: Ayam Petelur dan Pakan Jagung Off-farm

Ayam petelur dan pembuatan pakan berbasis tanam jagung ditempatkan sebagai prioritas pendukung jangka pendek. Usaha ini tidak diposisikan sebagai usaha inti pemanfaatan kawasan Hutan Desa, karena belum menjadi komoditas utama dalam RKPS dan tidak berkaitan langsung dengan pemanfaatan kawasan Hutan Lindung. Namun, usaha ini relevan sebagai penguat ekonomi rumah tangga, penyedia pangan protein, dan sumber arus kas rutin melalui penjualan telur.

Penempatan ayam petelur sebagai usaha off-farm penting agar tidak menimbulkan tafsir bahwa peternakan dilakukan di dalam kawasan Hutan Desa atau mendorong pembukaan lahan baru. Lokasi usaha harus berada pada pekarangan, lahan desa, atau lahan masyarakat yang sudah tersedia dan legal, bukan pada ruang perlindungan Hutan Desa. Tanam jagung untuk pakan juga harus dilakukan pada lahan yang telah tersedia, tanpa bakar, tanpa drainase gambut baru, dan tidak mengganggu fungsi lindung.

Pengembangan pakan berbasis jagung perlu dipahami sebagai pengurangan sebagian ketergantungan pakan dari luar, bukan sebagai pengganti penuh pakan komersial. Ayam petelur tetap membutuhkan formulasi pakan seimbang yang mengandung energi, protein, mineral, vitamin, dan kalsium. Jagung dapat menjadi bahan energi utama, sedangkan kebutuhan protein dan mineral perlu dipenuhi dari bahan tambahan lain sesuai rekomendasi teknis dinas peternakan atau penyuluh.

Tabel 5.9 Rencana Prioritas Pendukung Ayam Petelur dan Pakan Jagung

Komponen	Arah Pengembangan	Manfaat	Syarat Pengamanan
Ayam petelur	Usaha skala rumah tangga/kelompok sebagai sumber telur harian.	Pendapatan rutin, pangan protein, peluang kerja rumah tangga.	Kandang di luar kawasan HD, biosekuriti, sanitasi, dan pencatatan produksi.
Tanam jagung pakan	Ditanam di pekarangan/lahan desa/lahan masyarakat yang legal.	Mengurangi sebagian biaya pakan dan membuka usaha tani pendukung.	Tidak membuka hutan, tidak membakar lahan, tidak membuat drainase gambut.
Pembuatan pakan	Jagung digiling dan diramu dengan bahan pakan lain sesuai formulasi.	Efisiensi biaya pakan dan peluang unit usaha pakan lokal.	Perlu pendampingan teknis agar nutrisi seimbang dan tidak menurunkan produksi telur.
Kotoran ayam	Dikelola menjadi kompos untuk jagung, tanaman pekarangan, atau pembibitan.	Sirkular ekonomi dan pengurangan limbah.	Perlu pengelolaan bau, alat, dan limbah agar tidak mencemari lingkungan.
Kelembagaan	Dikelola oleh KUPS peternakan, BUMDes, kelompok perempuan/pemuda, atau unit usaha desa.	Lebih mudah dicatat, dipasarkan, dan dikembangkan.	Perlu pembagian peran, pembukuan, dan SOP kesehatan ternak.

Sumber: Analisis penyusun. Usaha ini merupakan usulan pendukung off-farm dan perlu dimasukkan dalam rencana usaha/RKT sesuai persetujuan para pihak.

Tabel 5.10 Rantai Nilai Ayam Petelur dan Pakan Jagung

Tahap	Pelaku	Masalah yang Perlu Diantisipasi	Kebutuhan Dukungan
Produksi jagung	Kelompok tani/rumah tangga	Produktivitas rendah, serangan hama, risiko lahan tidak sesuai.	Benih, pelatihan budidaya, lahan legal, teknik tanpa bakar.
Pengolahan pakan	Unit usaha pakan/KUPS/BUMDes	Formulasi tidak seimbang, alat giling terbatas.	Alat giling, pelatihan formulasi, penyuluh peternakan.

Pemeliharaan ayam	Kelompok peternak/rumah tangga	Penyakit, mortalitas, biaya pakan, produksi telur fluktuatif.	Vaksinasi, biosekuriti, kandang sehat, pencatatan produksi.
Pengolahan limbah	Peternak dan kelompok tani	Bau, lalat, pencemaran sekitar kandang.	Komposter, SOP kebersihan, pemanfaatan pupuk organik.
Pemasaran telur	Kelompok usaha, pedagang, warung, sekolah	Harga fluktuatif dan pasar terbatas.	Kontrak pasar lokal, kemasan sederhana, pencatatan penjualan.

Sumber: Analisis penyusun.

5.6 Prioritas Pengembangan Jangka Menengah (3-5 Tahun)

Prioritas jangka menengah diarahkan pada kegiatan yang memerlukan penguatan teknis, fasilitas produksi, dan kemitraan. Kelompok ini meliputi tanaman obat dan produk herbal, tanaman hias dan jamur, pembibitan tanaman gambut, serta agroforestry/paludikultur. Komoditas ini memiliki potensi penting, tetapi belum sekuat rotan, madu, dan perikanan dari sisi kesiapan usaha. Oleh karena itu, pendekatan yang disarankan adalah demplot, pelatihan teknis, pendataan jenis, dan pengembangan pasar terbatas terlebih dahulu.

Tabel 5.11 Program Prioritas Jangka Menengah

Program	Kegiatan Utama	Output 3-5 Tahun	Catatan Kunci
Tanaman obat dan produk herbal	Inventarisasi jenis, budidaya pekarangan /agroforestry, pengeringan, simplisia, minuman herbal.	Produk herbal lokal skala kecil dengan standar dasar.	Perlu identifikasi jenis, keamanan, izin, dan mutu.
Tanaman hias dan jamur	Rumah tanaman, budidaya legal, edukasi flora, identifikasi jamur aman konsumsi.	Demplot tanaman hias/jamur dan paket edukasi flora.	Tidak mengandalkan pengambilan liar.
Pembibitan tanaman gambut	Persemaian balangeran, lampuda, hampuak, kambasira, rotan, aren, dan jenis lokal.	Unit bibit lokal untuk rehabilitasi dan program mitra.	Perlu sumber benih, standar bibit, dan pasar restorasi.
Agroforestry /paludikultur	Demplot aren, cempedak, durian, rotan, tanaman pakan lebah, dan tanaman lokal gambut.	Model usaha jangka menengah yang mendukung tutupan vegetasi.	Harus sesuai tapak dan tidak mengeringkan gambut.
Pengolahan produk HHBK	Pengemasan, label, katalog, sertifikasi sederhana, pelatihan UMKM.	Produk bernilai tambah dan siap pasar lokal/regional.	Butuh dinas teknis dan mitra pasar.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan Bab IV.

5.7 Prioritas Pengembangan Jangka Panjang (>5 Tahun)

Prioritas jangka panjang diarahkan pada jasa lingkungan, karbon, tata air gambut, ekowisata edukasi, dan ekonomi hijau. Kelompok usaha ini memiliki nilai strategis tinggi, tetapi belum dapat dikembangkan secara cepat karena memerlukan data teknis, kapasitas kelembagaan, kemitraan profesional, dan sistem monitoring. Dalam tahap awal, LPHD perlu menyiapkan data dasar, dokumentasi kegiatan perlindungan, dan mekanisme pembagian manfaat agar peluang jangka panjang dapat diraih secara bertahap.

Tabel 5.12 Program Prioritas Jangka Panjang

Bidang	Arah Pengembangan	Prasyarat Utama	Output yang Diharapkan
Jasa tata air gambut	Pemeliharaan tabat kanal, monitoring TMA, patroli kanal, dan dokumentasi hidrologi.	Alat ukur, SOP, petugas, data berkala.	Risiko karhutla turun dan fungsi gambut terjaga.
Karbon dan konservasi	Penyusunan data tutupan lahan, riwayat karhutla, rehabilitasi, dan potensi karbon.	Baseline, MRV, peta, mitra teknis.	Kesiapan awal skema jasa lingkungan/karbon.
Ekowisata edukasi	Paket susur kanal, edukasi rotan, madu, tanaman obat, gambut, dan satwa.	Pemandu, SOP keselamatan, rambu, perahu aman.	Pendapatan pemandu, promosi produk KUPS, dan edukasi publik.
Riset dan pendidikan	Kerja sama sekolah, kampus, dan lembaga riset.	Lokasi belajar, data dasar, izin, pendamping lokal.	Kunjungan edukasi dan dokumentasi ilmiah.
Ekonomi hijau desa	Integrasi produk HHBK, pangan lokal, wisata edukasi, dan konservasi.	Kelembagaan kuat dan kemitraan multipihak.	Model perhutanan sosial yang memberi manfaat ekonomi dan ekologis.

Sumber: Analisis penyusun.

5.8 Integrasi Antar-Usaha dan Pembentukan Klaster Pengembangan

Pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun sebaiknya tidak dilihat sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Beberapa komoditas dapat saling mendukung sehingga membentuk klaster pengembangan. Pendekatan klaster membuat pendampingan lebih mudah, penggunaan fasilitas lebih efisien, dan promosi produk lebih kuat. Misalnya, rotan dapat menjadi produk utama kerajinan, madu dan tanaman obat menjadi produk oleh-oleh, perikanan dan ayam petelur menjadi penguat pangan lokal, sementara ekowisata menjadi kanal promosi untuk semua produk KUPS.

Tabel 5.13 Integrasi Klaster Pengembangan Usaha

Klaster	Komoditas/Kegiatan	Arah Integrasi	Manfaat
Klaster HHBK dan kerajinan	Rotan, tanaman obat, tanaman hias, jamur.	Rumah produksi, katalog, promosi, paket edukasi HHBK.	Produk bernilai tambah dan identitas Hutan Desa.
Klaster pangan dan protein	Perikanan rawa, ayam petelur, jagung pakan, telur, ikan olahan.	Pangan lokal, pengolahan, pemasaran desa, suplai kegiatan wisata/pelatihan.	Arus kas rutin dan ketahanan pangan.
Klaster rehabilitasi dan agroforestry	Pembibitan, balangeran, rotan, aren, cempedak, durian, tanaman pakan lebah.	Demplot restorasi-produktif dan dukungan program rehabilitasi.	Pemulihan gambut dan ekonomi jangka menengah.
Klaster jasa lingkungan dan edukasi	Tata air, karbon, biodiversitas, ekowisata, riset.	Paket kunjungan, data konservasi, kemitraan pendidikan.	Manfaat jangka panjang dan reputasi desa hutan.

Sumber: Analisis penyusun.

5.9 Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Prioritas Usaha

Keberhasilan pengembangan usaha sangat bergantung pada kemampuan LPHD dan KUPS menjalankan peran masing-masing. LPHD perlu bertindak sebagai pengarah kawasan, penjaga fungsi lindung, penghubung dengan KPHL dan pemerintah desa, serta pengelola kerja sama. KUPS perlu menjadi pelaksana usaha dengan pembukuan, target produksi, pembagian peran, dan standar mutu. Tanpa penguatan kelembagaan, prioritas usaha yang baik dapat berhenti sebagai rencana tanpa implementasi.

Tabel 5.14 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan untuk Setiap Prioritas

Prioritas Usaha	Kelembagaan Pelaksana	Kebutuhan Penguatan	Bentuk Dukungan
Rotan dan kerajinan	KUPS Pengrajin Rotan, LPHD, kelompok perempuan.	Pembukuan, SOP panen, standar mutu, rumah produksi, pemasaran.	Pelatihan, alat kerja, katalog, kemitraan pasar.
Madu kelulut	KUPS Madu, LPHD, rumah tangga pembudidaya.	Pencatatan stup, SOP panen higienis, kemasan, label.	Penyuluh, alat panen, botol, branding.
Perikanan rawa	KUPS Perikanan, nelayan lokal, Pemdes.	Aturan tangkap, budidaya, pascapanen, pengolahan.	Dinas Perikanan, alat olahan, pelatihan.

Ayam petelur dan pakan jagung	Kelompok peternak, BUMDes/KUPS peternakan, kelompok tani jagung.	SOP kandang, formulasi pakan, pencatatan telur, limbah.	Dinas Peternakan/Pertanian, penyuluh, alat giling, vaksinasi.
Pembibitan dan agroforestry	LPHD, KUPS pembibitan, kelompok tani.	Persemaian, sumber benih, peta lokasi tanam, pemeliharaan.	KPHL, Dinas Kehutanan, mitra restorasi.
Jasa lingkungan /ekowisata	LPHD, KUPS jasa lingkungan, pemuda pemandu.	SOP wisata, data konservasi, pemandu, pembagian manfaat.	Mitra konservasi, kampus, operator wisata.

Sumber: Analisis penyusun.

5.10 Analisis Kemitraan dan Peluang Kerja Sama

Pengembangan prioritas usaha membutuhkan kemitraan multipihak karena sebagian besar kebutuhan tidak dapat dipenuhi hanya oleh LPHD dan KUPS. Kemitraan diperlukan dalam bentuk pembinaan teknis, akses pasar, pembiayaan, konservasi, riset, penguatan kelembagaan, dan promosi. KPHL Kapuas Kahayan menjadi mitra teknis utama dalam menjaga kesesuaian kegiatan dengan fungsi kawasan. Pemerintah desa dapat mengintegrasikan prioritas usaha ke dalam perencanaan desa. Dinas teknis dan BPSKL dapat mendukung pelatihan, legalitas produk, dan program Perhutanan Sosial. Mitra konservasi dan perguruan tinggi dapat mendukung data dasar, restorasi, jasa lingkungan, dan inovasi produk. Sementara sektor swasta/offtaker dapat membantu akses pasar.

Tabel 5.15 Peluang Kemitraan berdasarkan Prioritas Usaha

Prioritas	Mitra Potensial	Bentuk Kerja Sama	Hasil yang Diharapkan
Rotan	KPHL, Dinas Perindustrian/UMKM, offtaker, desainer produk.	Pelatihan desain, standar mutu, katalog, pembelian produk.	Produk rotan lebih kompetitif dan pasar lebih luas.
Madu kelulut	Dinas teknis, UMKM, laboratorium/kampus, toko oleh-oleh.	Budidaya, uji mutu, kemasan, label, pemasaran.	Madu berkualitas dan dipercaya pasar.
Perikanan	Dinas Perikanan, UMKM pangan, rumah makan, pasar lokal.	Budidaya, pengolahan, pemasaran ikan olahan.	Nilai tambah ikan meningkat dan pasokan lebih stabil.
Ayam petelur dan jagung pakan	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, penyuluh, BUMDes, toko pakan.	Pelatihan kandang sehat, formulasi pakan, budidaya jagung, pasar telur.	Usaha off-farm berjalan dan mendukung pangan desa.
Pembibitan /agroforestry	KPHL, Dinas Kehutanan, CSR, NGO restorasi.	Persemaian, pengayaan jenis,	Pemulihan gambut dan pendapatan bibit.

		rehabilitasi, pembelian bibit.	
Jasa lingkungan /ekowisata	Mitra konservasi, kampus, sekolah, operator wisata.	Baseline, pemandu, paket wisata, riset, edukasi.	Ekonomi hijau dan promosi produk KUPS.

Sumber: Analisis penyusun.

5.11 Roadmap Pengembangan Usaha Hutan Desa Katimpun

Roadmap disusun untuk memastikan pengembangan dilakukan bertahap. Tahap pertama menekankan penguatan dasar usaha yang paling siap. Tahap kedua memperluas nilai tambah dan kluster usaha. Tahap ketiga membangun ekonomi hijau berbasis jasa lingkungan dan ekowisata. Roadmap ini perlu diterjemahkan ke dalam RKT LPHD/KUPS dan disesuaikan melalui musyawarah tahunan.

Tabel 5.16 Roadmap Pengembangan Usaha Hutan Desa Katimpun

Periode	Fokus Utama	Program Kunci	Indikator Keberhasilan
0-1 tahun	Penguatan dasar dan konsolidasi data.	Validasi data komoditas, rapat LPHD-KUPS, SOP awal, pencatatan produksi, pemetaan mitra.	Data komoditas awal tersedia, KUPS aktif, pembukuan sederhana berjalan.
1-2 tahun	Prioritas awal dan usaha pendukung.	Rotan, madu, perikanan, ayam petelur, pakan jagung, pelatihan mutu, kemasan, pemasaran lokal.	Produk prioritas meningkat, pasar lokal terbentuk, kandang/pakan pilot berjalan.
3-5 tahun	Penguatan nilai tambah dan kluster.	Rumah produksi, pembibitan, agroforestry, tanaman obat/hias, ikan olahan, branding produk.	Produk bernilai tambah, kemitraan pasar, demplot agroforestry dan pembibitan berjalan.
>5 tahun	Jasa lingkungan dan ekonomi hijau.	Ekowisata edukasi, data karbon/tata air, riset, paket kunjungan, kemitraan konservasi.	Paket ekowisata tersedia, data konservasi kuat, pendapatan jasa lingkungan mulai terbuka.

Sumber: Analisis penyusun.

5.12 Indikator Keberhasilan Prioritas Pengembangan

Agar pengembangan usaha dapat dipantau, setiap prioritas perlu memiliki indikator keberhasilan. Indikator tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perbaikan kelembagaan, perlindungan kawasan, keterlibatan masyarakat, dan kesinambungan pasar. Indikator ini dapat menjadi dasar monitoring pada Bab VI.

Tabel 5.17 Indikator Keberhasilan Pengembangan Usaha

Bidang	Indikator 0-2 Tahun	Indikator 3-5 Tahun	Indikator >5 Tahun
Rotan	SOP panen, katalog produk, pembukuan produksi, peningkatan kualitas anyaman.	Rumah produksi, pasar tetap, produk desain baru, budidaya rotan berjalan.	Produk rotan menjadi identitas ekonomi HD Katimpun.
Madu	Data stup, panen higienis, kemasan berlabel, penjualan lokal.	Produksi stabil, izin produk, pasar oleh-oleh/online.	Madu menjadi produk konservasi gambut.
Perikanan	Data lokasi tangkap, pelatihan olahan ikan, aturan alat tangkap.	Produk olahan ikan, budidaya rawa/keramba, pasar lokal stabil.	Perikanan terintegrasi dengan wisata dan ketahanan pangan.
Ayam petelur /jagung	Pilot kandang sehat, pencatatan telur, jagung pakan ditanam di lahan legal.	Unit pakan lokal, pasar telur desa, pemanfaatan kompos.	Usaha protein desa berkelanjutan dan mandiri sebagian pakan.
Pembibitan /agroforestry	Demplot dan persemaian awal.	Bibit lokal memenuhi program rehabilitasi, agroforestry tumbuh.	Pendapatan jangka menengah dan pemulihan tutupan vegetasi.
Jasa lingkungan /ekowisata	Data awal, rute edukasi kecil, pemandu dilatih.	Paket wisata edukasi dan kerja sama kampus/sekolah.	Ekonomi hijau dan potensi jasa lingkungan berkembang.

Sumber: Analisis penyusun.

5.13 Risiko Prioritas dan Mitigasi

Setiap prioritas memiliki risiko yang harus dikelola sejak awal. Risiko terbesar pada usaha berbasis kawasan adalah kebakaran gambut, panen berlebih, ketidakjelasan ruang, dan lemahnya kelembagaan. Risiko terbesar pada usaha off-farm seperti ayam petelur adalah penyakit ternak, biaya pakan, limbah kandang, dan fluktuasi harga. Karena itu, setiap program prioritas harus dilengkapi dengan SOP dan dukungan teknis.

Tabel 5.18 Risiko dan Mitigasi Prioritas Pengembangan Usaha

Prioritas	Risiko Utama	Dampak	Mitigasi
Rotan	Panen berlebih dan kebakaran gambut.	Stok bahan baku menurun dan usaha terganggu.	SOP panen, budidaya rotan, patroli, tabat kanal, larangan bakar.

Madu	Koloni gagal, kurang pakan, mutu tidak stabil.	Produksi rendah dan pasar tidak percaya.	Tanaman pakan lebah, alat panen higienis, pencatatan koloni, uji mutu.
Perikanan	Tangkap berlebih, penyakit ikan, fluktuasi air.	Stok turun dan budidaya gagal.	Aturan alat tangkap, zona pemijahan, pelatihan budidaya, monitoring air.
Ayam petelur dan pakan jagung	Penyakit ternak, pakan tidak seimbang, limbah kandang, harga telur turun.	Kerugian ekonomi dan gangguan lingkungan desa.	Biosekuriti, vaksinasi, formulasi pakan dengan penyuluh, kompos, kontrak pasar lokal.
Tanaman obat /hias /jamur	Salah identifikasi, overharvest, regulasi konservasi.	Risiko hukum dan kerusakan stok alami.	Inventarisasi ahli, budidaya legal, SOP panen, kerja sama instansi teknis.
Jasa lingkungan /ekowisata	Data belum cukup, gangguan habitat, kunjungan tidak terkendali.	Kegagalan program dan konflik sosial.	Baseline, SOP kunjungan, pemandu, pembagian manfaat, batas daya dukung.

Sumber: Analisis penyusun.

Prioritas pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun perlu dilakukan secara bertahap dan selektif. Berdasarkan hasil analisis, rotan dan kerajinan anyaman menjadi prioritas utama karena paling siap dari sisi kelembagaan, keterampilan masyarakat, dan nilai tambah. Madu kelulut dan perikanan rawa menjadi prioritas penguatan jangka pendek karena dekat dengan masyarakat dan memiliki peluang pasar. Ayam petelur dengan pakan jagung ditempatkan sebagai prioritas pendukung off-farm untuk memperkuat pendapatan rumah tangga dan ketahanan pangan, dengan syarat tidak menggunakan kawasan Hutan Desa dan tidak mendorong pembukaan lahan baru.

Pada tahap menengah, pengembangan diarahkan pada tanaman obat, tanaman hias, jamur, pembibitan tanaman gambut, dan agroforestry/paludikultur. Komoditas ini memiliki potensi, tetapi memerlukan data jenis, budidaya, standar mutu, dan pasar yang lebih jelas. Pada tahap panjang, jasa lingkungan, tata air gambut, karbon, ekowisata edukasi, serta riset dan pendidikan dapat dikembangkan setelah data dasar, kelembagaan, SOP, dan kemitraan teknis tersedia.

Dengan demikian, pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat perlindungan kawasan, tata kelola LPHD dan KUPS, pencegahan kebakaran, pemulihan ekosistem gambut, serta pembangunan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Hasil prioritas ini menjadi dasar bagi Bab VI dalam merumuskan rekomendasi program, tindak lanjut, pihak pelaksana, kebutuhan dukungan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

6.1 Kedudukan dan Arah Umum Rekomendasi

Bab ini merupakan tindak lanjut dari hasil gambaran umum wilayah pada Bab II, hasil identifikasi potensi dan peluang usaha pada Bab IV, serta prioritas pengembangan usaha pada Bab V. Rekomendasi disusun untuk memastikan bahwa pengembangan Hutan Desa Katimpun tidak berhenti pada daftar potensi, tetapi diterjemahkan menjadi langkah kerja yang dapat dilaksanakan oleh LPHD, KUPS, Pemerintah Desa, KPHL Kapuas Kahayan, dan mitra pendukung.

Hutan Desa Katimpun berada pada kawasan Hutan Lindung rawa gambut dengan luas kurang lebih 2.642 hektare. Karakter kawasan tersebut mengharuskan seluruh kegiatan pengembangan ekonomi tetap menjaga fungsi lindung, tata air gambut, tutupan vegetasi, dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, rekomendasi dalam bab ini menempatkan perlindungan kawasan sebagai fondasi, sedangkan pengembangan usaha menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap hutan.

Secara umum, rekomendasi diarahkan pada lima agenda utama: perlindungan dan pemulihan kawasan gambut; penguatan usaha prioritas jangka pendek; pengembangan usaha jangka menengah dan panjang; penguatan kelembagaan LPHD/KUPS; serta pembangunan kemitraan, pembiayaan, dan sistem monitoring yang berkelanjutan.

6.2 Sintesis Temuan Utama sebagai Dasar Rekomendasi

Rekomendasi tindak lanjut disusun berdasarkan sintesis temuan utama pada bab sebelumnya. Sintesis tersebut penting agar rekomendasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjawab kondisi nyata kawasan dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat.

Aspek Temuan	Kondisi Utama	Implikasi terhadap Rekomendasi
Status kawasan	Hutan Desa Katimpun berada pada fungsi Hutan Lindung rawa gambut.	Usaha harus rendah dampak, tidak membuka hutan, tidak mengeringkan gambut, dan tidak berbasis kayu.
Kondisi biofisik	Kawasan didominasi rawa gambut, belukar rawa, kanal, dan sistem tata air yang rentan.	Perlindungan tata air, karhutla, tabat kanal, dan rehabilitasi vegetasi menjadi prioritas dasar.
Potensi usaha	Potensi utama meliputi rotan, madu kelulut, perikanan rawa, tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry/ paludikultur, jasa lingkungan, ekowisata, serta usaha off-farm ayam petelur dan pakan jagung.	Pengembangan dilakukan bertahap berdasarkan kesiapan masyarakat, pasar, risiko, dan kebutuhan modal.
Kelembagaan	LPHD dan beberapa KUPS telah terbentuk, tetapi masih membutuhkan penguatan	LPHD diperkuat sebagai koordinator kawasan dan KUPS sebagai unit usaha berbasis komoditas.

	administrasi, pembukuan, SOP, dan rencana bisnis.	
Pasar dan nilai tambah	Sebagian produk masih berupa bahan mentah atau produk sederhana.	Perlu pengolahan, branding, kemasan, mutu, katalog, pemasaran digital, dan kemitraan offtaker.
Risiko utama	Risiko kebakaran gambut, panen berlebih, pasar terbatas, kelembagaan lemah, dan belum kuatnya data produksi.	Perlu SOP perlindungan kawasan, database usaha, monitoring, dan evaluasi berkala.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan Potensi, RKPS LPHD Katimpun 2025-2034, dan dokumen pendukung studi.

6.3 Prinsip Operasional Tindak Lanjut

Agar rekomendasi dapat diterapkan secara konsisten, diperlukan prinsip operasional yang menjadi pegangan bersama. Prinsip ini berfungsi sebagai batas aman dalam pengambilan keputusan, terutama karena sebagian rencana usaha berkaitan dengan sumber daya alam pada kawasan rawa gambut.

No	Prinsip	Penjelasan Operasional
1	Lestari dan sesuai fungsi lindung	Seluruh kegiatan tidak boleh merusak fungsi Hutan Lindung, tidak membuka hutan secara destruktif, dan tidak mengeringkan gambut.
2	Berbasis masyarakat	Masyarakat, LPHD, dan KUPS menjadi pelaku utama; pihak luar berperan sebagai fasilitator, mitra teknis, pasar, atau pendukung pembiayaan.
3	Bertahap dan realistis	Usaha yang siap dikembangkan didorong lebih dahulu, sedangkan usaha yang membutuhkan data dan investasi besar disiapkan secara bertahap.
4	Nilai tambah lokal	Produk tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah, diberi merek, dikemas, dan dipasarkan secara kolektif.
5	Transparansi manfaat	Setiap usaha KUPS perlu memiliki pencatatan biaya, pendapatan, pembagian manfaat, dan laporan kepada anggota.
6	Berbasis kemitraan	Pengembangan usaha dan konservasi dilakukan melalui kerja sama dengan KPHL, pemerintah, mitra konservasi, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga pendanaan.

Sumber: Analisis penyusun.

6.4 Rekomendasi Perlindungan Kawasan dan Pengamanan Ekologis

Perlindungan kawasan merupakan rekomendasi dasar karena seluruh peluang usaha Hutan Desa Katimpun bergantung pada keberlanjutan ekosistem gambut. Tanpa tata air yang terjaga, pengendalian kebakaran, dan perlindungan vegetasi, komoditas seperti rotan, madu, tanaman obat, ikan rawa, serta jasa lingkungan akan kehilangan basis sumber dayanya.

6.4.1 Penguatan Tata Air Gambut dan Pencegahan Karhutla

Kawasan gambut sangat sensitif terhadap perubahan hidrologi. Oleh karena itu, tindak lanjut utama adalah memperkuat pengelolaan tata air melalui pemeliharaan tabat kanal, monitoring tinggi muka air, pengawasan kanal, serta patroli pada musim kemarau. Kegiatan ekonomi yang berpotensi meningkatkan pengeringan gambut, seperti pembukaan kanal baru, pembakaran lahan, atau budidaya yang memerlukan drainase dalam, harus dihindari.

6.4.2 Rehabilitasi dan Pengayaan Jenis Lokal

Pengayaan jenis lokal seperti balangeran, lampuda, hampuak, kambasira, rotan, dan tanaman pakan lebah perlu dilanjutkan sebagai bagian dari pemulihan tutupan vegetasi dan penguatan bahan baku usaha. Rehabilitasi tidak hanya menjadi kegiatan konservasi, tetapi juga dapat mendukung usaha pembibitan, madu, rotan, dan jasa lingkungan.

Program	Kegiatan Prioritas	Pelaksana Utama	Output yang Diharapkan
Tata air gambut	Pemeliharaan tabat kanal, monitoring TMA, pendataan kanal kritis.	LPHD, KPHL, mitra teknis.	Gambut tetap basah, risiko karhutla menurun, data tata air tersedia.
Patroli dan karhutla	Patroli rutin, papan larangan bakar, kesiapsiagaan alat, pelaporan hotspot.	LPHD, KUPS, MPA/masyarakat, KPHL.	Pengawasan kawasan meningkat dan respons dini karhutla berjalan.
Pengayaan jenis asli	Penanaman balangeran, lampuda, hampuak, kambasira, rotan, dan tanaman pakan lebah.	LPHD, KUPS pembibitan, pemerintah/mitra.	Tutupan vegetasi meningkat dan basis HHBK lebih kuat.
Perlindungan biodiversitas	Larangan perburuan, monitoring satwa, dokumentasi flora-fauna penting.	LPHD, KPHL, mitra konservasi, perguruan tinggi.	Habitat satwa dan nilai konservasi kawasan terjaga.
Pengaturan ruang pemanfaatan	Penegasan ruang perlindungan, ruang pemanfaatan, area off-farm, dan lokasi usaha.	LPHD, Pemerintah Desa, KPHL.	Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan fungsi kawasan.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan kondisi kawasan dan kebutuhan tindak lanjut pengelolaan HD Katimpun.

6.5 Rekomendasi Pengembangan Usaha Prioritas Jangka Pendek

Prioritas jangka pendek diarahkan pada usaha yang paling dekat dengan kemampuan masyarakat, telah memiliki kelembagaan awal, memiliki peluang pasar, dan tidak membutuhkan teknologi yang terlalu rumit. Berdasarkan Bab IV dan Bab V, kelompok usaha jangka pendek meliputi rotan dan kerajinan, madu kelulut, perikanan rawa, serta peternakan ayam petelur dengan pakan berbasis jagung sebagai usaha pendukung off-farm.

6.5.1 Rotan dan Kerajinan Anyaman

Rotan perlu dijadikan prioritas utama karena telah memiliki basis keterampilan masyarakat dan KUPS Pengrajin Rotan. Tindak lanjut diarahkan pada dua sisi: menjaga keberlanjutan sumber bahan baku dan meningkatkan nilai tambah produk. Dalam jangka pendek, LPHD dan KUPS perlu menyusun SOP panen selektif, melakukan pencatatan volume bahan baku, memperbaiki kualitas pengolahan, serta mengembangkan desain dan pemasaran produk rotan.

6.5.2 Madu Kelulut dan Madu Hutan

Madu kelulut merupakan usaha ramah lingkungan yang sejalan dengan perlindungan vegetasi berbunga. Tindak lanjut diarahkan pada penambahan stup secara bertahap, pelatihan pemeliharaan koloni, panen higienis, pengemasan, label, dan pencatatan produksi. Produk perlu diposisikan sebagai Madu Gambut Katimpun agar memiliki nilai cerita konservasi dan identitas lokal.

6.5.3 Perikanan Rawa dan Olahan Ikan

Perikanan memiliki pasar lokal yang jelas dan dekat dengan mata pencaharian masyarakat. Rekomendasi diarahkan pada pendataan stok ikan, pengaturan alat tangkap ramah lingkungan, penguatan budidaya rawa/keramba yang sesuai daya dukung, dan pengolahan hasil ikan menjadi ikan asap, ikan asin, abon, kerupuk, atau kuliner lokal. Perikanan perlu dikelola agar tidak merusak habitat dan tidak menurunkan stok ikan.

6.5.4 Ayam Petelur dan Pakan Jagung sebagai Usaha Pendukung Off-farm

Peternakan ayam petelur dan pembuatan pakan ternak berbasis jagung direkomendasikan sebagai usaha pendukung jangka pendek di luar kegiatan inti pemanfaatan kawasan Hutan Desa. Usaha ini tidak tercantum sebagai komoditas utama RKPS, sehingga harus ditempatkan sebagai kegiatan off-farm di pekarangan, lahan desa, atau lahan masyarakat yang sudah tersedia, bukan pada ruang perlindungan Hutan Desa. Rekomendasi ini penting karena ayam petelur dapat memberikan pendapatan rutin melalui telur, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemungutan sumber daya langsung dari hutan.

Pengembangan pakan berbasis jagung perlu dilihat sebagai upaya menekan biaya pakan, bukan sebagai kewajiban mengganti seluruh komponen pakan komersial. Jagung dapat menjadi bahan pakan lokal sebagian, yang dikombinasikan dengan sumber pakan lain sesuai formulasi teknis. Penanaman jagung harus dilakukan tanpa bakar, tanpa membuka lahan gambut baru, dan tidak membangun drainase yang mengeringkan gambut. Dengan demikian, usaha ayam petelur dan pakan jagung dapat menjadi penguat ekonomi rumah tangga yang tetap selaras dengan prinsip perlindungan kawasan.

Komoditas Usaha	Rekomendasi Produksi	Kebutuhan Pendukung	Catatan Pengamanan
Rotan dan kerajinan	Panen selektif, budidaya rotan, rumah produksi, peningkatan desain dan finishing.	SOP panen, alat kerja, rak pengering, pelatihan desain, katalog produk.	Tidak mengambil bahan berlebihan; rotasi panen dan pencatatan stok wajib dilakukan.

Madu kelulut	Penambahan stup, pemeliharaan koloni, panen higienis, kemasan botol berlabel.	Pelatihan budidaya, alat panen, botol, label, uji mutu dasar, branding.	Perlindungan vegetasi pakan lebah dan larangan pembakaran lahan.
Perikanan rawa	Pengaturan tangkap lestari, budidaya keramba/kolam rawa, pengolahan ikan.	Kajian stok, alat tangkap ramah lingkungan, boks ikan, pelatihan olahan.	Perlu aturan lokal alat tangkap dan perlindungan zona pemijahan.
Ayam petelur dan pakan jagung	Kandang skala rumah tangga/kelompok, pemeliharaan ayam petelur, tanam jagung di lahan non-kawasan sebagai bahan pakan sebagian.	Bibit ayam, kandang, pakan awal, pelatihan kesehatan ternak, formulasi pakan, benih jagung.	Harus off-farm; tidak membuka hutan, tidak membakar, tidak mengeringkan gambut, dan perlu pengelolaan limbah kandang.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan Bab IV dan Bab V.

6.6 Rekomendasi Pengembangan Usaha Jangka Menengah

Usaha jangka menengah diarahkan pada komoditas yang memiliki potensi kuat, tetapi masih membutuhkan penguatan teknis, inventarisasi, fasilitas produksi, legalitas, dan pasar. Komoditas yang termasuk kelompok ini adalah tanaman obat, tanaman hias, jamur hutan, pembibitan tanaman gambut, agroforestry/paludikultur, aren, cempedak, durian, dan rotan budidaya.

Program	Rekomendasi Tindak Lanjut	Output	Kebutuhan Mitra
Tanaman obat	Inventarisasi jenis, kebun contoh, SOP panen lestari, pelatihan simplisia/herbal.	Produk herbal lokal yang aman dan memiliki standar dasar.	Dinas kesehatan/UMKM, perguruan tinggi, pendamping teknis.
Tanaman hias dan jamur	Budidaya legal, rumah tanaman, identifikasi jenis, pelatihan pengolahan jamur aman konsumsi.	Produk edukasi flora dan usaha tanaman hias legal.	KPHL, BKSDA/instansi teknis, perguruan tinggi, pelaku tanaman hias.
Pembibitan tanaman gambut	Membangun persemaian, standar bibit, sumber benih, pencatatan produksi bibit.	Unit bibit lokal untuk rehabilitasi dan peluang usaha bibit.	KPHL, Dinas Kehutanan, CSR, NGO restorasi.
Agroforestry /paludikultur	Penataan tapak, penanaman aren, cempedak, durian, rotan,	Tutupan vegetasi produktif dan sumber	KPHL, penyuluh, dinas pertanian/perkebunan, mitra teknis.

	dan tanaman lokal adaptif gambut.	pendapatan jangka menengah.	
Aren/gula aren	Pemeliharaan tanaman aren, pelatihan sadap, pengolahan gula aren, pengemasan.	Produk gula aren lokal sebagai komoditas bernilai tambah.	UMKM pangan, koperasi, dinas perdagangan, offtaker.

Sumber: Analisis penyusun berdasarkan potensi jangka menengah Bab IV dan prioritas Bab V.

6.7 Rekomendasi Pengembangan Usaha Jangka Panjang

Usaha jangka panjang diarahkan pada jasa lingkungan, tata air gambut, karbon, ekowisata terbatas, pendidikan lingkungan, dan riset. Kelompok usaha ini memiliki nilai strategis, tetapi membutuhkan data dasar, kapasitas kelembagaan, infrastruktur sederhana, SOP, dan kemitraan teknis. Karena itu, tindak lanjut jangka panjang harus dimulai sejak awal melalui penguatan data, dokumentasi, dan perlindungan kawasan.

Bidang	Rekomendasi	Prasyarat	Manfaat Jangka Panjang
Jasa tata air	Monitoring TMA, pemeliharaan tabat, pencatatan kondisi kanal dan rawa.	Alat ukur sederhana, petugas monitoring, dukungan teknis.	Risiko karhutla menurun dan fungsi hidrologi gambut terjaga.
Karbon gambut	Menyiapkan data tutupan lahan, riwayat kebakaran, pengamanan kawasan, dan baseline awal.	Peta, data spasial, MRV, mitra teknis, dokumen kerja sama.	Peluang skema jasa lingkungan/konservasi berbasis karbon.
Ekowisata edukasi	Menyusun paket wisata kecil: rotan, madu, tanaman obat, susur kanal, edukasi gambut.	Pemandu lokal, SOP keselamatan, rute, papan informasi, promosi.	Pendapatan jasa pemandu, perahu, produk KUPS, dan reputasi desa hutan.
Riset dan pendidikan	Membuka kerja sama kunjungan belajar, penelitian biodiversitas, sosial ekonomi, dan gambut.	Kemitraan kampus/sekolah/NGO, data dasar, izin kegiatan.	Transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas lokal.

Sumber: Analisis penyusun.

6.8 Rekomendasi Peningkatan Nilai Tambah, Mutu, dan Pemasaran

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian produk potensial masih berada pada tingkat bahan mentah atau produk sederhana. Rekomendasi pemasaran harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah lokal melalui desain produk, mutu, kemasan, label, branding, dan kanal pemasaran yang lebih luas. LPHD dapat membangun identitas payung seperti "Produk Hutan Desa Katimpun" untuk menghubungkan berbagai produk KUPS dalam satu narasi konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Produk/Jasa	Masalah Saat Ini	Rekomendasi Nilai Tambah	Pasar Potensial
Rotan	Produk masih terbatas dan mutu belum seragam.	Desain modern, finishing, katalog, merek Rotan Katimpun, kemasan sederhana.	Pameran, toko oleh-oleh, marketplace, wisata edukasi.
Madu	Kemasan dan standar mutu perlu diperkuat.	Botol standar, label, cerita Madu Gambut Katimpun, paket oleh-oleh.	Pasar kesehatan, toko lokal, pameran, penjualan daring.
Ikan	Dominan segar dan mudah rusak.	Ikan asap, ikan asin, abon, kerupuk ikan, kuliner lokal.	Pasar desa, rumah makan, toko oleh-oleh, wisata desa.
Tanaman obat	Pemanfaatan masih tradisional.	Simplisia, minuman herbal, paket edukasi tanaman obat.	Pasar lokal, wisata edukasi, toko herbal.
Ayam petelur	Usaha masih berupa gagasan pendukung.	Telur konsumsi lokal, kemasan rak sederhana, pasokan untuk konsumsi desa dan kegiatan pelatihan.	Rumah tangga, warung, pasar desa, kebutuhan kegiatan desa.
Pakan jagung	Bahan pakan bergantung dari luar.	Jagung pipil/kering sebagai bahan pakan sebagian, pencampuran pakan berbasis formulasi teknis.	KUPS peternakan, peternak rumah tangga, usaha ayam lokal.
Ekowisata	Belum ada paket siap jual.	Paket edukasi gambut, rotan, madu, tanaman obat, susur kanal.	Sekolah, kampus, NGO, wisata minat khusus.

Sumber: Analisis penyusun.

6.9 Program Penguatan Masyarakat, LPHD, dan KUPS

Penguatan kapasitas merupakan syarat utama agar rekomendasi usaha dapat berjalan. Pelatihan tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi perlu disusun sebagai program bertahap mulai dari pelatihan teknis, administrasi, manajemen usaha, pemasaran, konservasi, hingga monitoring. Penguatan masyarakat perlu mengutamakan pengurus LPHD, pengurus KUPS, anggota aktif, perempuan perajin, pemuda, dan rumah tangga pelaku usaha.

Program Penguatan	Materi Utama	Sasaran	Output
Pelatihan teknis komoditas	Rotan, madu, perikanan, tanaman obat, pembibitan,	Anggota KUPS dan pelaku usaha.	Kemampuan produksi meningkat

	ayam petelur, pakan jagung.		dan SOP teknis tersedia.
Pelatihan administrasi dan pembukuan	Buku kas, pencatatan produksi, aset, laporan kegiatan, dokumentasi.	Pengurus LPHD dan KUPS.	Kelompok memiliki data usaha dan laporan berkala.
Pelatihan kewirausahaan	Business plan, biaya produksi, harga jual, margin, target produksi.	Pengurus KUPS, LPHD, pemuda.	Rencana usaha per komoditas tersusun.
Pelatihan pemasaran	Branding, foto produk, katalog, media sosial, negosiasi pembeli.	KUPS dan unit pemasaran.	Produk memiliki identitas dan kanal pasar.
Pelatihan konservasi	Karhutla, tata air gambut, biodiversitas, patroli, pelaporan.	LPHD, KUPS, masyarakat patroli.	Perlindungan kawasan menjadi bagian dari usaha.
Pelatihan gender dan regenerasi	Peran perempuan, pemuda, pembagian kerja, kepemimpinan kelompok.	Perempuan perajin, pemuda, pengurus.	Partisipasi kelompok rentan dan generasi muda meningkat.

Sumber: Analisis penyusun.

6.10 Rekomendasi Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Manfaat

LPHD Katimpun perlu berperan sebagai payung pengelolaan kawasan dan koordinator lintas KUPS. KUPS perlu diperkuat sebagai unit usaha yang menjalankan kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan pencatatan usaha. Untuk menghindari konflik internal, perlu ada aturan tertulis mengenai pembagian peran, pembagian manfaat, penggunaan fasilitas bersama, dan mekanisme pelaporan kepada anggota.

Aspek Tata Kelola	Kondisi/Kebutuhan	Rekomendasi
Struktur dan mandat	LPHD dan KUPS telah terbentuk tetapi perlu pembagian peran yang lebih operasional.	Susun bagan kerja LPHD-KUPS, uraian tugas, dan jadwal koordinasi rutin.
AD/ART dan SOP	Belum semua kegiatan memiliki SOP tertulis.	Susun SOP panen rotan, budidaya madu, perikanan, produk olahan, off-farm ayam petelur, dan pemasaran.
Pembukuan usaha	Pencatatan produksi dan keuangan masih perlu diperkuat.	Wajib buku produksi, buku kas, buku aset, dan laporan bulanan setiap KUPS.
Pembagian manfaat	Mekanisme manfaat perlu dibuat transparan.	Tetapkan persentase untuk anggota, kas KUPS, kas LPHD, dan dana konservasi jika ada.

Fasilitas bersama	Rumah produksi, alat, dan promosi dapat digunakan lintas KUPS.	Buat aturan penggunaan, perawatan, jadwal, dan tanggung jawab aset.
Evaluasi tahunan	Belum ada mekanisme evaluasi terpadu.	Lakukan musyawarah tahunan LPHD-KUPS untuk evaluasi produksi, keuangan, kawasan, dan rencana tahun berikutnya.

Sumber: Analisis penyusun.

6.11 Rekomendasi Kemitraan dan Kerja Sama

Pengembangan Hutan Desa Katimpun membutuhkan kemitraan multipihak karena LPHD dan KUPS tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan teknis, pembiayaan, pasar, dan data secara mandiri. Kemitraan harus berbasis kesetaraan, tertulis, transparan, dan tetap menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. KPHL Kapuas Kahayan menjadi mitra teknis utama pada aspek kawasan, sedangkan pemerintah desa, dinas terkait, BPSKL, mitra konservasi, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga pendanaan dapat berperan sesuai bidangnya.

Mitra	Peran yang Direkomendasikan	Bidang Prioritas	Bentuk Kerja Sama
KPHL Kapuas Kahayan	Pembinaan teknis kawasan, sinkronisasi ruang, pengawasan, dan pendampingan konservasi.	HHBK, tata air, rehabilitasi, jasa lingkungan.	Koordinasi rutin, pendampingan teknis, verifikasi lokasi kegiatan.
Pemerintah Desa Katimpun	Dukungan regulasi desa, integrasi dengan RKPDes/RPJMDes, dan fasilitasi kelembagaan.	Kelembagaan, sarana usaha, ekonomi desa.	SK, perdes/perkades, dukungan anggaran dan fasilitasi forum.
Dinas/BPS	Fasilitasi program perhutanan sosial, pelatihan, akses program, dan peningkatan kapasitas.	KUPS, HHBK, pemasaran, legalitas usaha.	Pelatihan, bantuan alat, akses pameran, pendampingan usaha.
Mitra konservasi /NGO	Pendampingan gambut, biodiversitas, mitigasi perubahan iklim, dan ekowisata.	Restorasi, karbon, edukasi, perlindungan habitat.	Program konservasi, data baseline, pendampingan patroli dan wisata edukasi.
Perguruan tinggi	Riset, inovasi teknologi, kajian finansial, dan monitoring.	Tanaman obat, pakan, perikanan, karbon, sosial ekonomi.	KKN, riset terapan, pelatihan, uji mutu produk.

Swasta/offtaker /UMKM	Pembelian produk, desain produk, akses pasar, dan pendampingan mutu.	Rotan, madu, ikan olahan, telur, produk herbal.	MoU pemasaran, kontrak pembelian, desain kemasan.
Lembaga pembiayaan/CSR	Dukungan modal, sarana produksi, dan investasi sosial.	Rumah produksi, kandang, pakan, kemasan, wisata.	Hibah alat, pinjaman mikro, CSR, dana bergulir.

Sumber: Analisis penyusun.

6.12 Rekomendasi Investasi dan Pembiayaan Bertahap

Pembiayaan perlu dilakukan bertahap agar tidak membebani LPHD dan KUPS. Investasi awal sebaiknya difokuskan pada usaha yang paling siap dan memberi manfaat cepat, kemudian diperluas ke usaha menengah dan jangka panjang. Seluruh dukungan pembiayaan perlu disertai rencana operasional, pencatatan aset, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Tahap	Bidang Investasi	Kebutuhan Utama	Sumber Pembiayaan Potensial
0-2 tahun	Rotan dan kerajinan	Alat kerja, rak pengering, bahan finishing, katalog, kemasan, pelatihan desain.	Dinas/BPSKL, CSR, dana desa, mitra pemasaran.
0-2 tahun	Madu kelulut	Stup, alat panen higienis, botol, label, pelatihan budidaya.	Program perhutanan sosial, CSR, mitra konservasi.
0-2 tahun	Perikanan dan olahan	Boks ikan, alat olahan, pelatihan pengolahan, peralatan sanitasi.	Dinas perikanan, UMKM, dana desa.
0-2 tahun	Ayam petelur dan pakan jagung	Kandang, bibit ayam, pakan awal, benih jagung, alat pakan sederhana, pelatihan kesehatan ternak.	Dana kelompok, BUMDes, CSR, dinas peternakan/pertanian.
3-5 tahun	Pembibitan dan agroforestry	Persemaian, polibag, benih, alat semai, pemeliharaan tanaman.	KPHL, Dinas Kehutanan, NGO, CSR rehabilitasi.
3-5 tahun	Tanaman obat/hias	Rumah tanaman, alat pengering, kemasan, legalitas produk.	Dinas UMKM, perguruan tinggi, mitra tanaman hias/herbal.
>5 tahun	Jasa lingkungan dan ekowisata	Pemandu, papan informasi, jalur sederhana, life jacket, data baseline.	Mitra konservasi, kampus, operator wisata, skema jasa lingkungan.

Sumber: Analisis penyusun.

6.13 Monitoring, Evaluasi, dan Pengelolaan Data

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan sejak awal agar pengembangan usaha tidak hanya diukur dari jumlah produk, tetapi juga dari dampak sosial, kelembagaan, dan ekologis. Data yang

terkumpul akan menjadi dasar untuk memperbaiki rencana usaha, mengajukan dukungan program, dan menyiapkan peluang jasa lingkungan jangka panjang.

Aspek	Indikator yang Dipantau	Frekuensi	Penanggung Jawab
Ekonomi usaha	Volume produksi, biaya, pendapatan, margin, jumlah pembeli, produk terjual.	Bulanan /triwulan.	KUPS dan LPHD.
Kelembagaan	Rapat, laporan, buku kas, SOP, jumlah anggota aktif, kerja sama aktif.	Triwulan /tahunan.	LPHD, Pemerintah Desa, KUPS.
Sosial	Jumlah rumah tangga terlibat, peran perempuan, pemuda, tenaga kerja lokal, pembagian manfaat.	Semester /tahunan.	LPHD dan Pemerintah Desa.
Lingkungan	Kondisi tutupan lahan, kejadian karhutla, tinggi muka air, aktivitas patroli, gangguan satwa.	Bulanan saat kemarau; triwulan reguler.	LPHD, KPHL, mitra konservasi.
Ayam petelur dan pakan	Jumlah ayam produktif, produksi telur, konsumsi pakan, produksi jagung, biaya pakan, kesehatan ternak.	Mingguan /bulanan.	KUPS peternakan/kelompok rumah tangga.
Pasar dan kemitraan	Jumlah mitra, kontrak pembelian, pameran, promosi, permintaan pasar.	Triwulan /tahunan.	LPHD, KUPS, mitra pemasaran.

Sumber: Analisis penyusun.

6.14 Matriks Rencana Tindak Lanjut Terpadu

Matriks berikut menyajikan rencana tindak lanjut yang dapat menjadi acuan awal bagi LPHD, KUPS, Pemerintah Desa, KPHL, dan mitra. Matriks ini bersifat operasional awal dan dapat disesuaikan kembali melalui musyawarah LPHD/KUPS serta sinkronisasi dengan rencana kerja desa dan program KPHL.

Prioritas	Kegiatan Tindak Lanjut	Pelaksana Utama	Waktu	Output
Perlindungan kawasan	Patroli, tabat kanal, monitoring TMA, papan larangan bakar, kesiapsiagaan karhutla.	LPHD, KPHL, masyarakat patroli.	0-2 tahun dan rutin.	Risiko karhutla menurun dan data pengamanan tersedia.
Rotan	Pemetaan bahan baku, SOP panen, rumah	KUPS Rotan, LPHD, mitra.	0-2 tahun.	Produk rotan berkualitas dan

	produksi, pelatihan desain, katalog.			pemasaran meningkat.
Madu kelulut	Penambahan stup, alat panen, label, pencatatan produksi, branding Madu Gambut Katimpun.	KUPS Madu, LPHD, mitra teknis.	0-2 tahun.	Produksi dan mutu madu meningkat.
Perikanan	Kajian stok, alat tangkap ramah lingkungan, budidaya rawa/keramba, olahan ikan.	KUPS Perikanan, nelayan lokal, dinas/mitra.	0-3 tahun.	Perikanan lebih lestari dan bernilai tambah.
Ayam petelur dan pakan jagung	Demplot kandang, tanam jagung non-kawasan, formulasi pakan, pencatatan telur dan biaya pakan.	Kelompok peternakan, Pemerintah Desa, dinas/mitra.	0-2 tahun.	Pendapatan rutin off-farm dan ketahanan pangan meningkat.
Tanaman obat /hias	Inventarisasi jenis, kebun/rumah tanaman, pelatihan pengolahan, legalitas produk.	KUPS HHBK, LPHD, perguruan tinggi/dinas.	3-5 tahun.	Produk herbal/hias legal dan edukatif.
Pembibitan /agroforestry	Unit persemaian, penanaman jenis lokal, pemeliharaan, pasar bibit.	LPHD, KUPS, KPHL, mitra rehabilitasi.	3-5 tahun.	Rehabilitasi berjalan dan usaha bibit berkembang.
Jasa lingkungan /ekowisata	Paket edukasi, pelatihan pemandu, data baseline, promosi kunjungan terbatas.	LPHD, KUPS Jasa Lingkungan, KPHL, mitra.	>5 tahun bertahap.	Ekonomi hijau dan jasa lingkungan mulai berkembang.

Sumber: Analisis penyusun.

6.15 Indikator Keberhasilan Tahapan

Indikator keberhasilan disusun agar pelaksanaan rekomendasi dapat dievaluasi secara periodik. Indikator tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan dan perlindungan kawasan.

Tahap	Indikator Ekonomi	Indikator Kelembagaan	Indikator Ekologis/Sosial
0-2 tahun	Produk rotan, madu, ikan olahan, telur, dan pakan jagung mulai tercatat; ada penjualan reguler.	KUPS memiliki buku kas, buku produksi, SOP awal, dan rapat rutin.	Patroli berjalan, tidak ada pembukaan lahan bakar, masyarakat terlibat aktif.

3-5 tahun	Produk bernilai tambah meningkat; pasar lokal dan mitra pembeli mulai stabil; pembibitan/agroforestry berjalan.	Unit usaha lebih tertata; ada perjanjian kerja sama; laporan tahunan tersedia.	Rehabilitasi dan pengayaan jenis berjalan; data kawasan lebih lengkap.
>5 tahun	Ekowisata, jasa lingkungan, dan produk unggulan memiliki pasar khusus.	LPHD-KUPS memiliki sistem tata kelola dan pembagian manfaat yang kuat.	Fungsi tata air, karbon, biodiversitas, dan perlindungan gambut menjadi aset ekonomi hijau.

Sumber: Analisis penyusun.

Rekomendasi dan tindak lanjut pengembangan Hutan Desa Katimpun menegaskan bahwa potensi kawasan harus dikembangkan secara bertahap, terukur, dan selaras dengan fungsi Hutan Lindung rawa gambut. Pengembangan usaha tidak boleh hanya mengejar hasil ekonomi jangka pendek, tetapi harus memperkuat perlindungan kawasan, tata air gambut, pencegahan kebakaran, dan kelembagaan masyarakat.

Prioritas paling awal diarahkan pada usaha yang telah memiliki basis masyarakat dan peluang pasar, yaitu rotan, madu kelulut, perikanan rawa, serta ayam petelur dan pakan jagung sebagai usaha pendukung off-farm. Tahap menengah diarahkan pada tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry, dan produk bernilai tambah. Tahap panjang diarahkan pada jasa lingkungan, karbon, tata air, ekowisata edukasi, dan ekonomi hijau berbasis konservasi gambut.

Kunci keberhasilan seluruh rekomendasi terletak pada penguatan LPHD sebagai koordinator pengelolaan kawasan, KUPS sebagai penggerak usaha, Pemerintah Desa sebagai pendukung kebijakan lokal, KPHL sebagai pembina teknis, serta mitra sebagai pendukung kapasitas, pasar, pembiayaan, dan inovasi. Dengan tata kelola yang baik dan kemitraan yang tepat, Hutan Desa Katimpun dapat berkembang sebagai model perhutanan sosial yang menggabungkan kesejahteraan masyarakat, perlindungan ekosistem gambut, dan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

BAB VII

PENUTUP

Bab ini menyajikan sintesis akhir dari keseluruhan Laporan Studi Potensi Hutan Desa Katimpun. Kesimpulan dan rekomendasi dalam bab ini disusun berdasarkan gambaran umum wilayah pada Bab II, hasil identifikasi potensi dan peluang usaha pada Bab IV, prioritas pengembangan usaha pada Bab V, serta rekomendasi dan tindak lanjut pada Bab VI. Dengan demikian, bab ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi rangkuman terarah mengenai bagaimana Hutan Desa Katimpun dapat dikelola sebagai ruang perlindungan ekosistem gambut sekaligus sumber penguatan ekonomi masyarakat desa.

Secara substansi, laporan ini menegaskan bahwa pengembangan Hutan Desa Katimpun harus ditempatkan dalam kerangka Perhutanan Sosial yang menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis, manfaat sosial, dan peluang ekonomi. Potensi yang tersedia tidak boleh dipahami semata-mata sebagai daftar komoditas, melainkan sebagai modal pengelolaan kawasan yang perlu diatur, diperkuat, dan dikembangkan secara bertahap melalui LPHD, KUPS, Pemerintah Desa, KPHL, serta dukungan mitra multipihak.

7.1 Kesimpulan

7.1.1 Kondisi Umum dan Posisi Strategis Hutan Desa Katimpun

Hutan Desa Katimpun merupakan kawasan Perhutanan Sosial pada fungsi Hutan Lindung rawa gambut dengan luas kurang lebih 2.642 hektare. Kawasan ini memiliki posisi penting karena berada pada lanskap gambut yang berfungsi sebagai pengatur tata air, penyimpan karbon, habitat flora dan fauna, serta ruang penghidupan masyarakat desa. Status kawasan sebagai Hutan Lindung menegaskan bahwa arah pengelolaan tidak dapat bertumpu pada pemanfaatan kayu atau pembukaan lahan, tetapi harus diarahkan pada hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan yang tidak merusak, jasa lingkungan, restorasi, dan usaha ekonomi pendukung di luar kawasan.

Kondisi kawasan yang didominasi rawa gambut dan belukar rawa memberikan peluang sekaligus batasan. Peluangnya adalah tersedianya potensi komoditas adaptif gambut seperti rotan, madu kelulut, tanaman obat, tanaman hias, perikanan rawa, pembibitan tanaman gambut, dan jasa lingkungan. Batasannya adalah setiap bentuk pengembangan harus menjaga tata air, menghindari pembakaran, tidak mengeringkan gambut, dan tidak mengganggu ruang perlindungan serta habitat satwa liar.

Tabel 7.1 Sintesis Temuan Utama Laporan Studi

Aspek	Temuan Utama	Implikasi Pengelolaan
Legalitas dan kawasan	Hutan Desa Katimpun memiliki dasar pengelolaan melalui LPHD pada kawasan Hutan Lindung rawa gambut.	Pengelolaan harus mengikuti fungsi lindung, RKPS, dan prinsip Perhutanan Sosial.
Ekologi gambut	Kawasan memiliki fungsi tata air, karbon, biodiversitas, dan rentan terhadap kebakaran.	Setiap usaha wajib disertai pengamanan tata air, patroli, larangan bakar, dan rehabilitasi.

Potensi ekonomi	Potensi utama berada pada HHBK, perikanan rawa, pembibitan, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, dan usaha pendukung off-farm.	Pengembangan harus bertahap sesuai kesiapan masyarakat, pasar, dan daya dukung kawasan.
Kelembagaan	LPHD dan KUPS telah menjadi modal sosial utama, tetapi masih memerlukan penguatan administrasi dan manajemen usaha.	Kelembagaan harus diperkuat sebelum usaha diperluas pada skala yang lebih besar.
Risiko	Risiko utama berupa karhutla, panen berlebih, lemahnya pasar, dan belum kuatnya pencatatan produksi.	Diperlukan SOP, data dasar, monitoring, dan sistem pembagian manfaat yang transparan.
Kemitraan	Pengembangan membutuhkan dukungan KPHL, Pemerintah Desa, dinas/BPSKL, mitra konservasi, perguruan tinggi, dan pasar.	Kemitraan menjadi kunci untuk peningkatan kapasitas, pembiayaan, teknologi, pasar, dan jasa lingkungan.

Sumber: Sintesis penyusun berdasarkan Identifikasi Potensi HD Katimpun.

7.1.2 Potensi dan Peluang Usaha yang Layak Dikembangkan

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Hutan Desa Katimpun memiliki potensi usaha yang cukup beragam. Namun, tidak semua potensi memiliki tingkat kesiapan yang sama. Rotan dan kerajinan anyaman merupakan komoditas yang relatif paling siap karena telah didukung keterampilan masyarakat dan keberadaan KUPS. Madu kelulut dan perikanan rawa juga berpotensi dikembangkan pada tahap awal karena memiliki kedekatan dengan sumber daya lokal, teknologi relatif sederhana, dan peluang pasar yang cukup jelas.

Komoditas tanaman obat, tanaman hias, jamur, pembibitan tanaman gambut, dan agroforestry/paludikultur memerlukan penguatan teknis lebih lanjut, terutama pada inventarisasi jenis, budidaya, standar mutu, legalitas, dan pasar. Sementara itu, jasa lingkungan, ekowisata, karbon, dan jasa tata air perlu dipersiapkan sebagai strategi jangka panjang karena membutuhkan data dasar, sistem monitoring, SOP layanan, kapasitas pemandu, serta kemitraan teknis yang lebih kuat.

Tambahan usaha ayam petelur dan pembuatan pakan berbasis jagung dapat ditempatkan sebagai usaha pendukung jangka pendek/off-farm. Usaha ini tidak menjadi inti pemanfaatan kawasan Hutan Desa, tetapi dapat memperkuat pendapatan rumah tangga, ketahanan pangan desa, dan mengurangi tekanan ekonomi terhadap kawasan. Penanaman jagung sebagai bahan pakan perlu dilakukan di lahan non-kawasan hutan, pekarangan, lahan desa, atau lahan masyarakat yang telah tersedia, tanpa pembakaran, tanpa pembukaan kawasan hutan, dan tanpa drainase gambut baru.

Tabel 7.2 Kesimpulan Prioritas Pengembangan Usaha

Kelompok Usaha	Posisi Prioritas	Alasan Utama	Catatan Pengembangan
Rotan dan kerajinan rotan	Prioritas awal-jangka menengah	KUPS dan keterampilan awal tersedia; nilai tambah tinggi melalui desain dan pemasaran.	Perlu SOP panen, budidaya rotan, rumah produksi, kualitas produk, dan akses pasar.
Madu kelulut	Prioritas awal-jangka menengah	Ramah lingkungan dan mendorong perlindungan vegetasi pakan lebah.	Perlu stabilisasi koloni, panen higienis, kemasan, label, dan izin produk.
Perikanan rawa	Prioritas awal-jangka menengah	Dekat dengan mata pencaharian masyarakat dan memiliki pasar lokal.	Perlu tata kelola alat tangkap, budidaya, pengolahan, dan pencatatan stok.
Ayam petelur dan pakan jagung	Usaha pendukung jangka pendek/off-farm	Memberi pendapatan rutin, memperkuat pangan rumah tangga, dan tidak perlu menekan kawasan HD.	Harus dilakukan di luar kawasan hutan, tanpa bakar, dengan manajemen pakan dan kesehatan ternak.
Tanaman obat, tanaman hias, jamur	Prioritas menengah	Potensi lokal dan edukasi tersedia, tetapi masih sensitif pada aspek legal, mutu, dan jenis.	Perlu inventarisasi, budidaya legal, SOP panen, dan pendampingan teknis.
Pembibitan dan agroforestry/paludikultur	Prioritas menengah-panjang	Mendukung rehabilitasi, pengayaan jenis, dan ekonomi jangka menengah.	Perlu persemaian, standar bibit, pemeliharaan, dan kesesuaian tapak.
Jasa lingkungan dan ekowisata	Prioritas jangka panjang	Memperkuat ekonomi hijau berbasis gambut, biodiversitas, dan pendidikan lingkungan.	Perlu baseline, MRV, SOP, pemandu, sarana dasar, dan kemitraan.

Sumber: Sintesis penyusun berdasarkan Identifikasi Potensi.

7.1.3 Kelembagaan dan Kemitraan sebagai Faktor Penentu

Keberadaan LPHD Katimpun dan KUPS merupakan modal utama dalam pengelolaan Hutan Desa. Namun, laporan ini juga menunjukkan bahwa legalitas kelembagaan saja belum cukup. LPHD perlu diperkuat sebagai lembaga koordinator kawasan, sedangkan KUPS perlu diperkuat sebagai unit usaha yang memiliki rencana kerja, target produksi, pembukuan, mekanisme pembagian manfaat, dan sistem evaluasi.

Kemitraan menjadi faktor penting karena pengembangan usaha Hutan Desa membutuhkan dukungan teknis, pasar, pembiayaan, riset, dan konservasi. KPHL Kapuas

Kahayan, Pemerintah Desa, dinas/BPSKL, mitra konservasi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pendanaan memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pola kemitraan perlu dibangun secara tertulis, transparan, dan tetap menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Tabel 7.3 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan dan Unit Usaha

Kelembagaan / Unit	Peran Utama	Kebutuhan Penguatan
LPHD Katimpun	Koordinator pengelolaan kawasan, perlindungan hutan, dan sinkronisasi KUPS.	AD/ART, SOP, database kawasan, rencana kerja, monitoring, dan sistem pelaporan.
KUPS Rotan	Unit usaha kerajinan dan pengembangan rantai nilai rotan.	Rencana usaha, standar mutu, rumah produksi, pembukuan, dan pemasaran.
KUPS Madu	Unit usaha budidaya, panen, pengemasan, dan pemasaran madu.	SOP budidaya, pencatatan produksi, alat panen, kemasan, dan label.
KUPS Perikanan	Unit usaha perikanan rawa dan pengolahan hasil ikan.	Data stok ikan, aturan alat tangkap, pengolahan, dan pemasaran.
Unit usaha off-farm/peternakan	Pengembangan ayam petelur dan pakan jagung sebagai usaha pendukung.	Rencana teknis kandang, pakan, kesehatan ternak, lahan jagung non-kawasan, dan analisis usaha.
KUPS/Unit Jasa Lingkungan	Persiapan ekowisata, edukasi, tata air, biodiversitas, dan karbon.	Data baseline, SOP wisata, pemandu lokal, paket kunjungan, dan kemitraan teknis.

Sumber: Sintesis penyusun berdasarkan Identifikasi dan Analisis Potensi

7.1.4 Risiko Pengelolaan dan Prinsip Kehati-hatian

Risiko utama dalam pengembangan Hutan Desa Katimpun adalah kebakaran hutan dan lahan, gangguan tata air gambut, panen berlebih, lemahnya kelembagaan, terbatasnya pasar, serta belum lengkapnya data produksi dan data ekologis. Karena itu, seluruh pengembangan usaha harus disertai prinsip kehati-hatian. Kegiatan yang berada di dalam atau berhubungan dengan kawasan Hutan Desa harus mengikuti ruang kelola, fungsi kawasan, dan arahan KPHL. Kegiatan off-farm seperti ayam petelur dan pakan jagung tetap perlu dikendalikan agar tidak mendorong pembukaan lahan baru atau praktik bakar.

Tabel 7.4 Risiko Utama dan Prinsip Pengamanan

Risiko	Kegiatan Terkait	Dampak Potensial	Prinsip Mitigasi
Kebakaran gambut	Semua komoditas berbasis kawasan dan masyarakat desa	Hilangnya bahan baku, rusaknya habitat, gagal usaha, menurunnya fungsi tata air.	Patroli, tabat kanal, larangan bakar, pemantauan hotspot, kesiapan alat, dan edukasi karhutla.

Panen berlebih	Rotan, tanaman obat, tanaman hias, jamur	Penurunan stok alam dan hilangnya biodiversitas.	SOP panen, kuota, rotasi panen, budidaya, dan pencatatan volume.
Lemahnya pasar	Rotan, madu, ikan, herbal, tanaman hias, telur	Produk sulit berkembang dan pendapatan tidak stabil.	Branding, kemasan, kontrak pembeli, pameran, pemasaran digital, dan koperasi/unit usaha.
Kelembagaan lemah	LPHD dan seluruh KUPS	Konflik internal, pembagian manfaat tidak jelas, usaha tidak berkelanjutan.	AD/ART, SOP, pembukuan, rapat rutin, laporan berkala, dan audit sederhana.
Ekspansi usaha off-farm yang tidak terkendali	Ayam petelur dan tanam jagung pakan	Risiko pembukaan lahan, limbah kandang, konflik lahan, dan biaya pakan tinggi.	Lokasi non-kawasan, tanpa bakar, manajemen limbah, rencana pakan, dan analisis finansial.

Sumber: Sintesis penyusun berdasarkan Bab IV, V, dan VI.

7.2 Rekomendasi

7.2.1 Rekomendasi untuk LPHD Katimpun dan KUPS

LPHD Katimpun perlu memperkuat perannya sebagai lembaga payung yang mengoordinasikan pengelolaan kawasan, perlindungan hutan, pengembangan usaha, dan kerja sama para pihak. KUPS perlu diarahkan menjadi unit usaha yang tidak hanya menerima program, tetapi memiliki rencana bisnis, pembukuan, pencatatan produksi, target pasar, dan mekanisme pembagian manfaat yang jelas.

1. Menyusun dan memperbarui rencana kerja tahunan LPHD dan KUPS berdasarkan prioritas usaha yang telah ditetapkan.
2. Menyusun SOP panen, produksi, pengolahan, pemasaran, dan pembagian manfaat untuk setiap unit usaha.
3. Memperkuat pencatatan produksi rotan, madu, ikan, telur, pakan jagung, bibit, dan produk lainnya.
4. Membangun sistem pembukuan sederhana yang mencatat biaya, pendapatan, aset kelompok, stok produk, dan keuntungan.
5. Menempatkan usaha ayam petelur dan pakan jagung sebagai usaha pendukung/off-farm yang tidak membuka kawasan hutan.
6. Melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan usaha dan kondisi kawasan.

7.2.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah perlu menjadikan Hutan Desa Katimpun sebagai bagian dari strategi pembangunan desa dan daerah berbasis ekonomi hijau. Dukungan tidak hanya berupa bantuan sarana, tetapi juga integrasi program, penguatan kelembagaan, fasilitasi legalitas produk, akses pasar, dan pengendalian risiko lingkungan.

1. Mengintegrasikan program Hutan Desa dalam RPJMDes, RKPDes, program UMKM, ketahanan pangan, perikanan, dan pariwisata desa.
2. Mendukung sarana produksi prioritas seperti rumah produksi rotan, alat panen madu, peralatan pengolahan ikan, persemaian, dan kandang ayam petelur skala rumah tangga/kelompok.
3. Memfasilitasi pelatihan manajemen usaha, pengemasan, legalitas produk, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan kelompok.
4. Memastikan usaha pakan jagung dilakukan di lahan non-kawasan hutan dan menerapkan prinsip tanpa bakar.
5. Mendukung penguatan sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersama LPHD, KPHL, dan masyarakat.

7.2.3 Rekomendasi untuk KPHL, Dinas Teknis, dan BPS Kalimantan

KPHL Kapuas Kahayan, dinas teknis, dan BPSKL memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengembangan usaha tetap sesuai fungsi Hutan Lindung dan rencana kelola Perhutanan Sosial. Dukungan teknis diperlukan terutama pada tata batas, ruang perlindungan-pemanfaatan, HHBK, rehabilitasi gambut, jasa lingkungan, dan penguatan KUPS.

1. Memfasilitasi pemetaan potensi, ruang pemanfaatan, ruang perlindungan, dan lokasi komoditas prioritas.
2. Mendampingi penyusunan SOP panen rotan, pengembangan madu, perikanan berkelanjutan, tanaman obat, tanaman hias, dan pembibitan.
3. Mendukung verifikasi data produksi, data ekologis, dan data tata air sebagai dasar pengembangan jasa lingkungan.
4. Menghubungkan LPHD/KUPS dengan program perhutanan sosial, rehabilitasi, penguatan usaha, dan pasar produk HHBK.
5. Memastikan kegiatan off-farm pendukung tidak bertentangan dengan fungsi kawasan dan tidak mendorong pembukaan lahan gambut.

7.2.4 Rekomendasi untuk Mitra Konservasi, Perguruan Tinggi, dan Swasta

Mitra konservasi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dapat memperkuat pengembangan Hutan Desa Katimpun melalui pendampingan teknis, penelitian, inovasi produk, pemasaran, dan pembiayaan sosial. Kemitraan harus dibangun dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat serta kawasan.

Tabel 7.5 Rekomendasi Peran Mitra dalam Pengembangan HD Katimpun

Mitra	Bidang Dukungan	Bentuk Tindak Lanjut
Mitra konservasi /NGO	Restorasi gambut, karhutla, biodiversitas, ekowisata, karbon.	Pendampingan lapangan, data konservasi, patroli, edukasi, dan paket ekowisata.
Perguruan tinggi	Riset dan inovasi.	Kajian stok rotan, madu, ikan, jagung pakan, analisis finansial, mutu produk, dan baseline jasa lingkungan.
Swasta/offtaker	Akses pasar dan pengembangan produk.	Pembelian rotan, madu, ikan olahan, telur, produk herbal, dan pengembangan kemasan/branding.

Lembaga pembiayaan /CSR	Dukungan investasi sosial.	Rumah produksi, alat panen, kandang ayam petelur, mesin pakan sederhana, persemaian, dan sarana ekowisata dasar.
-------------------------	----------------------------	--

Sumber: Sintesis penyusun berdasarkan Bab V dan Bab VI.

7.3 Agenda Tindak Lanjut Prioritas

Tindak lanjut pengembangan Hutan Desa Katimpun perlu dilaksanakan secara bertahap. Tahapan ini penting agar program tidak berjalan terlalu luas tanpa kesiapan kelembagaan, data, pasar, dan pengamanan kawasan. Tahap awal diarahkan pada usaha yang paling siap dan cepat memberi manfaat. Tahap menengah diarahkan pada penguatan nilai tambah dan rehabilitasi produktif. Tahap panjang diarahkan pada jasa lingkungan dan ekonomi hijau.

Tabel 7.6 Agenda Tindak Lanjut Bertahap

Periode	Fokus	Kegiatan Prioritas	Indikator Umum
0-2 tahun	Penguatan dasar dan usaha cepat tumbuh	Rotan, madu kelulut, perikanan rawa, ayam petelur, pakan jagung, administrasi LPHD /KUPS.	KUPS aktif, produk awal meningkat, catatan usaha berjalan, usaha off-farm terkendali, dan kegiatan tanpa bakar.
3-5 tahun	Pengolahan dan konsolidasi usaha	Tanaman obat, tanaman hias, jamur, pembibitan, agroforestry, pengolahan produk, rumah produksi.	Produk bernilai tambah, pasar mulai berkembang, kelembagaan lebih tertib, dan rehabilitasi produktif berjalan.
>5 tahun	Ekonomi hijau dan jasa lingkungan	Ekowisata edukasi, jasa tata air, data karbon, riset biodiversitas, kemitraan konservasi.	Paket ekowisata berjalan, data baseline tersedia, kemitraan aktif, dan fungsi kawasan semakin terlindungi.

Sumber: Sintesis penyusun berdasarkan Analisis Potensi.

7.4 Kebutuhan Data dan Studi Lanjutan

Studi ini telah memberikan dasar awal mengenai potensi dan prioritas pengembangan usaha Hutan Desa Katimpun. Namun, beberapa data masih perlu diperkuat sebelum dilakukan peningkatan skala usaha atau investasi lebih besar. Verifikasi data menjadi penting agar keputusan pengembangan tidak hanya berbasis asumsi, tetapi didukung oleh data produksi, biaya, pasar, ekologi, dan kelembagaan yang lebih kuat.

Tabel 7.7 Kebutuhan Studi dan Verifikasi Data Lanjutan

Data / Kajian Lanjutan	Tujuan	Metode yang Disarankan
Peta sebaran dan stok rotan	Menentukan kuota panen, lokasi budidaya, dan rencana produksi.	Survei lapangan, pemetaan partisipatif, GPS, pencatatan panen.

Produksi madu per stup	Menentukan target produksi realistis dan kebutuhan sarana.	Buku panen, monitoring koloni, data musim, pencatatan kualitas madu.
Stok dan musim ikan	Menghindari tangkap berlebih dan menentukan pola budidaya.	Catatan nelayan, survei perairan, identifikasi zona pemijahan.
Kelayakan ayam petelur dan pakan jagung	Menilai biaya pakan, produksi telur, kebutuhan lahan jagung, kesehatan ternak, dan pasar.	Analisis usaha, demplot jagung non-kawasan, pencatatan produksi telur, studi pakan lokal.
Jenis tanaman obat, hias, dan jamur	Memastikan jenis aman, legal, dan layak dikembangkan.	Inventarisasi, dokumentasi foto, validasi ahli, kerja sama instansi teknis.
Baseline jasa lingkungan	Menyiapkan skema jasa lingkungan, ekowisata, dan konservasi jangka panjang.	Peta tutupan lahan, data TMA, data karhutla, biodiversitas, dan sistem monitoring.
Data kelembagaan dan pembagian manfaat	Memastikan usaha berjalan adil dan transparan.	Audit sederhana LPHD/KUPS, pembukuan, SOP, dan evaluasi anggota.

Sumber: Sintesis penyusun berdasarkan kebutuhan data pada Bab IV, V, dan VI.

7.5 Penutup Akhir

Secara keseluruhan, Hutan Desa Katimpun memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai model pengelolaan Perhutanan Sosial berbasis ekosistem gambut. Modal utama yang dimiliki adalah legalitas pengelolaan, potensi sumber daya alam, keberadaan LPHD dan KUPS, pengetahuan lokal masyarakat, serta peluang kemitraan multipihak. Namun, modal tersebut hanya akan memberi manfaat nyata apabila dikelola secara terarah, bertahap, transparan, dan konsisten menjaga fungsi Hutan Lindung.

Arah pengembangan yang paling realistis adalah memperkuat usaha yang sudah dekat dengan kemampuan masyarakat, yaitu rotan, madu kelulut, perikanan rawa, serta usaha pendukung off-farm seperti ayam petelur dan pakan jagung. Usaha pendukung tersebut dapat memperkuat ekonomi rumah tangga selama tidak menimbulkan tekanan baru terhadap kawasan hutan. Pada saat yang sama, pengembangan tanaman obat, tanaman hias, pembibitan, agroforestry/paludikultur, jasa lingkungan, karbon, dan ekowisata perlu disiapkan secara bertahap sebagai fondasi ekonomi hijau jangka menengah dan panjang.

Dengan penguatan kelembagaan, pengamanan kawasan, peningkatan nilai tambah produk, pendampingan teknis, dan kemitraan yang tepat, Hutan Desa Katimpun dapat menjadi contoh pengelolaan hutan desa yang tidak hanya menjaga gambut dan keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tindak lanjut laporan ini harus diarahkan pada pelaksanaan program yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan Hutan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berikut memuat dokumen, regulasi, dan bahan utama yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan studi potensi Hutan Desa Katimpun.

- Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2024. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Gubernur Kalimantan Tengah. 2015. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/401/2015 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Katimpun. Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KPHL Kapuas Kahayan. Tanpa tahun. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Kapuas Kahayan Unit XXXIII. Kapuas: KPHL Kapuas Kahayan.
- Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa (LPHD) Katimpun. 2025. Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa LPHD Desa Katimpun Periode 2025-2034. Katimpun: LPHD Katimpun.
- LPHD Katimpun dan pihak pendamping. 2026. Hasil Studi Potensi dan Peluang Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Alam Hutan Desa Katimpun. Katimpun: LPHD Katimpun.
- Yayasan Puter Indonesia. 2022. Profil Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Katimpun: Yayasan Puter Indonesia.
- Yayasan Puter Indonesia dan LPHD Katimpun. 2022. Laporan Proses Sosialisasi dan Lokakarya Manajemen Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Lembaga Pengelola Hutan Desa Katimpun. Katimpun: Yayasan Puter Indonesia dan LPHD Katimpun.